



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan peraturan di atas, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca  
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)  
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas (LAK)  
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dan dalam rangka pengungkapan yang memadai.  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna sesuai dengan kepentingannya. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka ini terdiri dari:
  1. Informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka selama satu periode pelaporan.

2. Informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.
4. Informasi yang berguna dalam memprediksi potensi sumber daya ekonomi untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang.

### **1.1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### **1.1.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka pada posisi antara 105°38'-106°18' Bujur Timur dan 1°3'-2°21' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu dan sebagian kecil Kecamatan Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam.

Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah kurang lebih 302.879,47 Ha atau 3.028,794 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna; (iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Tanah di daerah Kabupaten Bangka mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain sehingga memiliki potensi di bidang pertambangan. Wilayah Kabupaten Bangka juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan dan pariwisata karena sebelah utara dan timur berbatasan dengan laut.

#### **1.1.1.2 Demografi dan Administratif Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Bangka berdiri pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2022 adalah 334.344 jiwa bertambah 1,34 persen dari tahun 2021 yang jumlah penduduknya sebesar 329.911 jiwa. Pekerjaan penduduk di Kabupaten Bangka terbagi atas 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Sektor primer mencakup pekerjaan dalam usaha pertanian, kehutanan, perikanan, usaha pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup pekerjaan dalam

usaha usaha industri pengolahan dan usaha kontruksi. Sektor tersier mencakup pekerjaan dalam usaha perdagangan, reparasi, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Secara administratif, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan, 19 Kelurahan, 62 Desa yang merupakan desa definitif dan didukung 258 Dusun dan 88 Lingkungan.

**Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Dusun/Lingkungan**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun / Lingkungan
1.	Sungailiat	12	1	3
2.	Belinyu	7	5	34
3.	Merawang	-	10	38
4.	Pemali	-	6	22
5.	Puding Besar	-	7	23
6.	Riau Silip	-	9	31
7.	Bakam	-	9	33
8.	Mendo Barat	-	15	74
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>62</b>	<b>258</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

#### 1.1.1.3 Perekonomian Daerah

Kabupaten Bangka memiliki berbagai macam potensi di berbagai sektor yang meningkatkan ekonomi daerah yaitu, sektor pertanian dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan dan industri, dan sektor pariwisata.

##### 1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu program strategis di Kabupaten Bangka, karena memegang peranan yang relatif penting dalam perekonomian masyarakat. Perkebunan di Kabupaten Bangka dibagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Komoditas unggulan pada sektor perkebunan di Kabupaten Bangka yaitu kelapa sawit, karet dan lada. Ketiga komoditas unggulan perkebunan ini mengalami produksi yang fluktuatif selama tahun 2017-2022.

**Tabel 1.2 Jumlah Produksi Kelapa Sawit, Karet dan Lada di Kabupaten Bangka tahun 2017-2022**

Tahun	Kelapa Sawit (Ton)	Karet (Ton)	Lada (Ton)
2017	56.524	25.029	3.175
2018	38.551	22.672	4.260
2019	39.067	51.034	4.479
2020	88.921	50.236	3.121,5
2021	66.430,57	31.009,12	3.510,16
2022	98.099,16	29.399,20	2.896,87

*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka*

Perkebunan besar dikelola oleh 14 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit.

## 2. Sektor Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Bangka merupakan wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong (eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

**Tabel 1.3 Jumlah Produksi dan Nilai Tangkapan Ikan di Kabupaten Bangka tahun 2017-2022**

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Tangkapan (Rp)
2017	27.761,04	751.607.007 (ribu)
2018	26.017,09	703.373.762 (ribu)
2019	26.346,51	832.195.942,71 (ribu)
2020	27.110,51	1.068.306.297 (ribu)
2021	27.923,84	1.066.558.595 (ribu)
2022	28.055,24	1.123.185.500 (ribu)

**Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka**

## 3. Sektor Industri dan Pertambangan

Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah penghasil timah di Pulau Bangka. Aktivitas penambangan timah telah berlangsung lebih dari 200 tahun semenjak zaman kolonial Belanda. Area penambangan timah di Kabupaten Bangka dikuasai oleh PT. Timah Tbk. Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang timah tradisional yang dikenal dengan istilah Tambang Inkonsvensional (TI).

## 4. Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Kabupaten Bangka. Kekayaan alam serta budaya yang dimiliki memberikan nilai lebih untuk ditawarkan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Peluang investasi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Bangka juga terbuka lebar. Potensi wisatanya antara lain pantai, air panas, peninggalan sejarah, perbukitan, dan beberapa tempat yang baru mulai dikembangkan yaitu air terjun. Pada tahun 2022 jumlah hotel baik berbintang, maupun non bintang terdapat 27 unit yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang dan Mendo Barat.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada landasan hukum yang berlaku:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 06 Tahun 2022;
- q. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 80 Tahun 2022 (Perubahan Keenam);
- s. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

###### **1.1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

###### **1.1.1.1. Kondisi Geografis**

###### **1.1.1.2. Demografi dan Administratif Pemerintahan**

1.1.1.3. Perekonomian Daerah

- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 2.2.2. Kebijakan Belanja daerah
  - 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 3.3. Data Kinerja Belanja *Mandatory Spending* Kabupaten Bangka

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1. Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kabupaten Bangka. Kondisi perekonomian adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 disusun dengan kajian yang mengacu pada potensi dan objek pendapatan.

##### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Pada tahun 2022 perekonomian daerah Kabupaten Bangka yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai mencapai 17,95 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 PDRB-ADHB mencapai 16,16 triliun rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa angka PDRB-ADHB mengalami kenaikan sebesar 1,79 triliun rupiah dibandingkan tahun 2021.

**Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2020-2022**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,996,707.12	3,306,361.39	3,576,942.11
B. Pertambangan dan Penggalian	1,315,809.57	1,712,664.35	1,695,971.44
C. Industri Pengolahan	3,016,697.94	3,908,197.05	4,670,925.71
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36,564.24	41,853.91	40,846.29
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,401.09	3,756.01	3,945.54
F. Konstruksi	1,417,092.47	1,548,531.20	1,633,463.27
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,815,628.74	1,989,713.33	2,357,759.23
H. Transportasi dan Pergudangan	320,099.94	358,623.90	412,040.63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402,896.00	461,494.15	531,745.10
J. Informasi dan Komunikasi	339,571.26	370,679.10	410,954.36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	358,463.80	398,578.08	466,620.34
L. Real Estat	514,327.74	557,558.43	601,589.42
M, N Jasa Perusahaan	34,124.37	38,044.49	44,433.16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	760,659.88	813,855.76	809,399.72
P. Jasa Pendidikan	336,727.72	358,862.87	382,497.81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,485.60	176,628.58	184,425.26
R, S, T, U Jasa Lainnya	113,680.22	120,604.95	135,217.13
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>13,932,937.70</b>	<b>16,166,007.55</b>	<b>17,958,776.52</b>

Tahun 2020: Angka revisi \*Tahun 2021: Angka sementara \*\*Tahun 2022: Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka

Source Url: <https://bangkakab.bps.go.id/indicator/11/45/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>

Access Time: March 5, 2023, 10:16 am



## 2. Inflasi

Kabupaten Bangka tidak termasuk dari 66 wilayah di Indonesia yang menjadi daerah terpilih penghitungan inflasi. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan yang dilakukan penghitungan inflasi. Hal ini menyebabkan laju inflasi untuk Kabupaten Bangka digunakan pendekatan dengan wilayah terdekat yaitu Pangkalpinang. Tingkat inflasi Kabupaten Bangka per Desember 2022 sebesar 0,99 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahunan (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 6,07 persen.

**Tabel 2.2. Tingkat Inflasi Tahunan (persen) 2020-2022**

TAHUN		
2020	2021	2022
0,44	3,60	6,07

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

## 3. Angka Pengangguran

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

**Tabel 2.3. Angka Pengangguran Kabupaten Bangka (persen), 2020-2022**

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	TPAK	63,93	62,68	68,81
2.	TPT	5,42	5,97	5,39

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa TPAK Kabupaten Bangka mengalami peningkatan sebesar 6,13 persen maka dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 meningkat pesat dibandingkan tahun 2021. Sementara untuk TPT Kabupaten Bangka pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,58 persen dibanding tahun 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Bangka terserap pada pasar kerja.

## 4. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Bangka dari tahun 2012 s.d. tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka (persen), 2012-2022**

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bangka										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.57	5.40	5.20	5.63	5.52	5.10	5.47	4.92	4.51	4.81	4,26

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

Tabel tersebut menggambarkan persentase penduduk miskin yang diperoleh dari jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikali 100. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka mengalami

penurunan sebesar 0,55 persen dibanding tahun 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka mengalami penurunan.

## 5. Gini Ratio

Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali.

**Tabel 2.5. Gini Ratio Kabupaten Bangka 2020-2022**

Gini Ratio		
2020	2021	2022
0,262	0,256	0,219

**Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka masuk dalam kategori dengan ketimpangan rendah, karena nilai Indeks Gini kurang dari 0,3.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

**Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka (persen), 2020-2022**

Indeks Pembangunan Manusia		
2020	2021	2022
72,40	72,46	72,95

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IPM di Kabupaten Bangka berada pada level *tinggi* selama tiga tahun terakhir. Dan dapat dilihat juga terjadi peningkatan IPM setiap tahunnya. Meningkatnya nilai IPM ini menunjukkan perbaikan dalam pembangunan di Kabupaten Bangka. Manfaat dari pengukuran IPM dalam rangka keuangan daerah adalah sebagai salah satu target pembangunan dan salah satu faktor dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), dan juga sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak

yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a. Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak.
3. Membangun sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Menyempurnakan regulasi Retribusi Jasa Umum dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Memberikan *reward* kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target.

b. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau. DBH-Pajak Penghasilan terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), PPh Pasal 21 berupa pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi Pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi penerimaan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2021, 2020 dan 2019.
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

- 4) Kebijakan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2022.
- 5) Kebijakan mengenai Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DID Tahun Anggaran 2022.
- 6) Kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Dana Insentif Daerah adalah dengan memperbaiki performa kinerja pemerintah daerah. Untuk Dana Desa, Pemerintah Daerah mendorong perangkat desa agar realisasi Dana Desa bisa maksimal.

#### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka penganggaran tersebut didasarkan pada Alokasi Tahun Anggaran sebelumnya.

### 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ayat 2 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana amanah RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Belanja daerah terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan arahan visi dan misi Kepala Daerah serta arahan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka tahun 2005 – 2025 melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial yang menyasar pada 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yakni (1) sarana dan prasarana; (2) lingkungan hidup, (3) ekonomi; (4) kesejahteraan sosial; (5) pemerintahan; dan (6) pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Memprioritaskan alokasi dana hibah terutama kepada MUI, PMI, KONI, BAZNAS, Pramuka, insentif GTT/PTT tingkat SD/SMP swasta, BOS tingkat SD/SMP swasta, insentif guru TK, guru PAUD serta beberapa lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- 3) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Pembangunan pendidikan digunakan untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.
- 4) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri.
- 5) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- 6) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi.

- 7) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.
- 8) Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
- 9) Mengelola defisit anggaran dalam batas yang diperkenankan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Namun jika APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

- 1) Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran sebelumnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran berjalan.
- 3) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan pencairan dana cadangan serta berusaha menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

- 1) Pengeluaran pembiayaan daerah diusahakan hanya dialokasikan untuk menutup keperluan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai pasal 77 sampai dengan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran dana bergulir dalam

APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



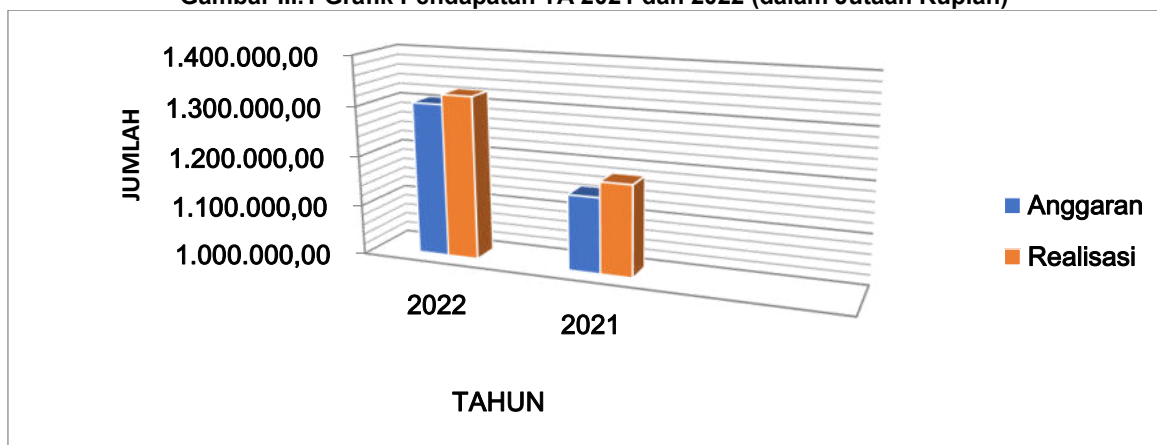
### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

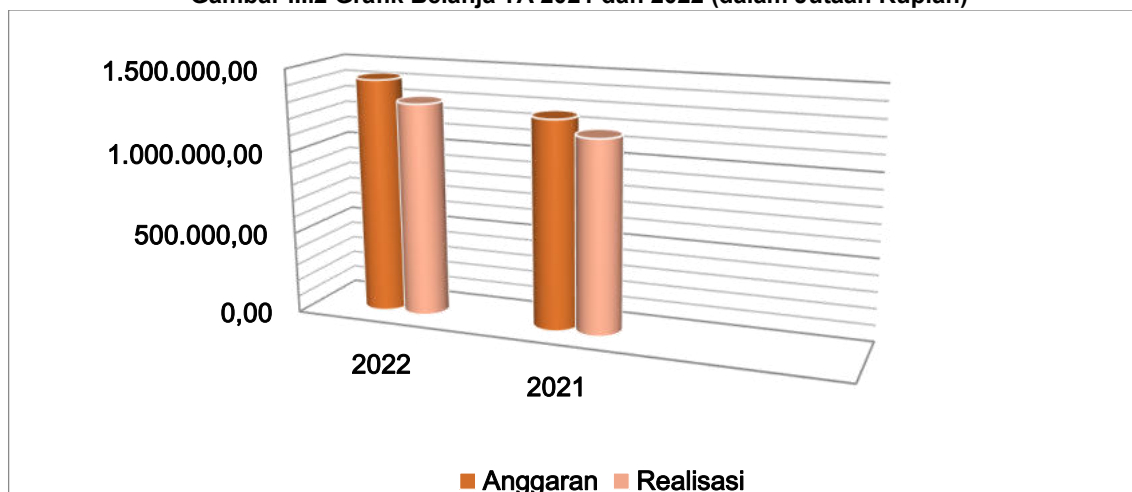
##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.305.675.039.221,00 dan realisasi sebesar Rp1.325.554.052.155,13 atau 101,52%. Dibandingkan tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan untuk anggaran pendapatan sebesar Rp155.152.811.146,00 dan kenaikan realisasi sebesar Rp143.880.717.014,75. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar Rp1.428.064.472.737,07 dan realisasi sebesar Rp1.299.818.887.715,34. Dibandingkan tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan untuk anggaran belanja dan transfer sebesar Rp162.869.696.203,46 dan kenaikan realisasi sebesar Rp127.364.345.065,78.

Gambar III.1 Grafik Pendapatan TA 2021 dan 2022 (dalam Jutaan Rupiah)



Gambar III.2 Grafik Belanja TA 2021 dan 2022 (dalam Jutaan Rupiah)





**a. Pendapatan**

Anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.305.675.039.221,00 dan realisasi sebesar Rp1.325.554.052.155,13 atau 101,52%. dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel III.1 Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

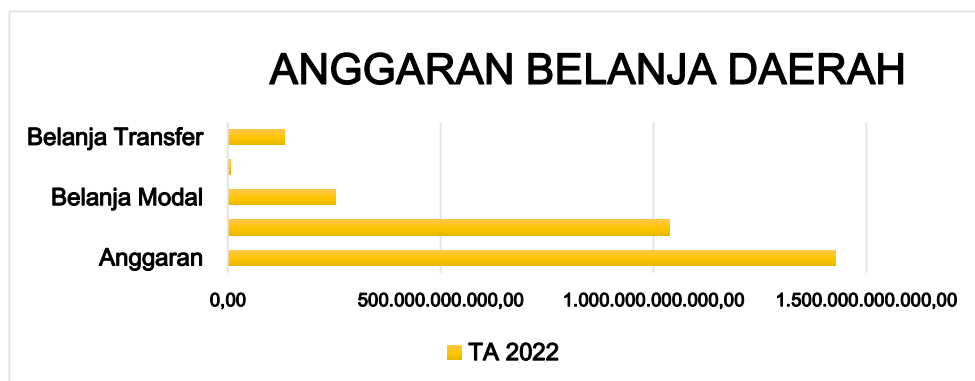
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>153.303.935.200,00</b>	<b>186.489.553.928,57</b>	<b>121,65</b>
Pendapatan Pajak Daerah	67.324.310.750,00	63.695.737.792,48	94,61
Pendapatan Retribusi Daerah	8.034.806.500,00	8.678.759.954,00	108,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.500.000,00	5.789.289.832,02	130,76
Lain-Lain PAD yang Sah	73.517.317.950,00	108.325.766.350,07	147,35
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.008.254.465.600,00</b>	<b>1.040.734.366.256,00</b>	<b>103,22</b>
Dana Bagi Hasil (DBH)	206.056.234.000,00	261.440.131.473,00	126,88
Dana Alokasi Umum (DAU)	488.311.618.000,00	488.311.585.830,00	99,99
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.263.655.000,00	110.782.375.074,00	95,29
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	127.247.876.600,00	109.825.191.879,00	86,31
Dana Insentif Daerah (DID)	14.987.147.000,00	14.987.147.000,00	100,00
Dana Desa	55.387.935.000,00	55.387.935.000,00	100,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>130.708.936.221,00</b>	<b>85.091.744.760,00</b>	<b>65,10</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.591.969.555,00	78.522.778.094,00	63,53
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	7.116.966.666,00	6.568.966.666,00	92,30
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>13.212.306.000,00</b>	<b>13.042.991.000,00</b>	<b>98,72</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.212.306.000,00	13.042.991.000,00	98,72
<b>Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>195.396.200,00</b>	<b>195.396.210,56</b>	<b>100,00</b>
Lain-Lain Pendapatan	195.396.200,00	195.396.210,56	100,00

*Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka*

**b. Belanja**

Anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp1.428.064.472.737,07 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.037.536.324.848,47, belanja modal sebesar Rp252.966.922.483,60,00, belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.593.480,00, dan belanja transfer sebesar Rp132.560.631.925,00.

**Gambar III.3 Grafik Anggaran Belanja Daerah TA 2022**



*Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka*

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.037.536.324.848,47 dan realisasi sebesar Rp931.631.058.685,67 atau 89,79%, yang terdiri dari:

**Tabel III.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	501.382.213.669,68	437.149.234.967,00	87,19
Belanja Barang dan Jasa	489.111.167.664,79	450.063.522.895,51	92,02
Belanja Subsidi	500.000.000,00	260.388.170,00	52,08
Belanja Hibah	40.604.193.514,00	38.446.789.953,16	94,69
Belanja Bantuan Sosial	5.938.750.000,00	5.711.122.700,00	96,17
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.037.536.324.848,47</b>	<b>931.631.058.685,67</b>	<b>89,79</b>

*Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka*

2. Belanja Modal merupakan belanja yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan program pada OPD yang hasilnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Pada tahun 2022, belanja modal dianggarkan sebesar Rp252.966.922.483,60 dan terealisasi sebesar Rp233.234.112.180,67 atau 92,20%, yang terdiri dari:

**Tabel III.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.830.036.253,60	62.965.864.127,83	81,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.776.512.669,00	48.648.039.422,84	97,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	126.001.993.311,00	121.264.201.430,00	96,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	358.380.250,00	356.007.200,00	99,34
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>252.966.922.483,60</b>	<b>233.234.112.180,67</b>	<b>92,20</b>

*Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka*

3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp5.000.593.480,00 dan realisasi sebesar Rp2.397.478.875,00 atau 47,94%:

**Tabel III.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	5.000.593.480,00	2.397.478.875,00	47,94
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.593.480,00</b>	<b>2.397.478.875,00</b>	<b>47,94</b>

*Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka*

4. Belanja Transfer tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp132.560.631.925,00 yang terdiri dari belanja transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp7.535.911.725,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp125.024.720.200,00.
  - a) Belanja transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp7.535.911.725,00 dan realisasi sebesar Rp7.535.911.725,00.
  - b) Belanja transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp125.024.720.200,00 dan realisasi sebesar Rp125.020.326.249,00.

**Tabel III.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>7.535.911.725,00</b>	<b>7.535.911.725,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.732.431.075,00	6.732.431.075,00	100,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	803.480.650,00	803.480.650,00	100,00
<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>125.024.720.200,00</b>	<b>125.020.326.249,00</b>	<b>100,00</b>

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	124.824.720.200,00	124.820.326.249,00	100,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>132.560.631.925,00</b>	<b>132.556.237.974,00</b>	<b>100,00</b>

**Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka**

### c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

**Tabel III.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pembiayaan</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>125.389.433.516,07</b>	<b>128.201.931.505,43</b>	<b>102,24</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)</b>	125.339.422.816,07	125.339.422.816,43	100,00
Pelampauan Penerimaan PAD	18.223.782.599,00	92.837.371.150,04	509,43
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.594.341.934,07	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(251.610.000,00)	0,00	0,00
Penghematan Belanja	89.223.022.305,00	0,00	0,00
<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>50.010.700,00</b>	<b>2.862.508.689,00</b>	<b>5.723,79</b>
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	5.100.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.010.700,00	2.857.408.689,00	5.713,59
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>122.389.433.516,07</b>	<b>125.201.931.505,43</b>	<b>102,30</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.937.095.945,22</b>	<b>0,00</b>

**Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka**

## 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah telah melampaui target dari yang telah dianggarkan. Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 103,22% dan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar 65,10%. Dana transfer yang mengalami penurunan terutama bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar 63,53%.

Akan tetapi pendapatan yang bersumber dari PAD, realisasi melampaui target dari yang telah ditetapkan yaitu sebesar 121,65% terutama pendapatan dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain Lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target. Meskipun pada tahun 2022 perekonomian di Kabupaten Bangka mulai menurun akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan inflasi dan dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka pada tahun 2022 sebesar 4,87 persen yang mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 7,48 persen, namun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka masih dapat melampaui target.

### 3.3. Data Kinerja Belanja *Mandatory Spending* Kabupaten Bangka Tahun 2022

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

(dikutip dari: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>)

Berikut data ringkasan Kinerja Belanja *Mandatory Spending* Kabupaten Bangka Tahun 2022:

**Tabel III.7. Ringkasan Kinerja Belanja *Mandatory Spending* Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Uraian (per fungsi)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% APBD (Anggaran /Total Anggaran Belanja Daerah x 100%)
1.	Pendidikan	355.321.460.276,07	318.772.290.643,15	24,88
2.	Kesehatan	306.268.783.092,32	280.693.522.040,36	21,45
3.	Pengawasan	10.699.347.260,00	8.160.845.061,00	0,75
4.	Perlindungan Sosial	22.300.890.957,00	19.890.636.298,00	1,56

Catatan: Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 sebesar **Rp1.428.064.472.737,07**.

**Sumber: SIMDA Keuangan Kabupaten Bangka**

### 3.4. Dampak Pandemi, Kenaikan Inflasi dan Kenaikan BBM

#### 3.4.1. Dampak Pandemi Covid-19

Pada tahun 2022 Kabupaten Bangka kembali menganggarkan belanja terkait Penanganan Covid-19 walaupun pada tahun 2022 kondisi pandemi sudah mulai menurun, namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bangka terkait dengan Penanganan Covid-19. Berikut ringkasan Laporan Covid-19 tahun 2022, untuk rincian terperinci dapat dilihat pada informasi tambahan yang terdapat pada CALK-LRA Kabupaten Bangka tahun 2022:

**Tabel III. 8. Anggaran dan Realisasi Penanganan COVID-19  
Berdasarkan Refocusing 8% Dari DAU dan DBH  
Per 31 Desember 2022**

No.	Uraian Alokasi Anggaran Refocusing	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penanganan Covid-19	1.000.000.000,00	629.209.370,00	62,92
2.	Dukungan Vaksinasi	3.703.550.000,00	3.076.175.000,00	83,06
3.	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	1.900.000.000,00	1.803.768.539,00	94,94
4.	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	5.500.000.000,00	4.412.767.423,00	80,23
5.	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas	27.972.409.440,00	26.464.231.033,36	94,61
	<b>Total Penyesuaian/Refocusing APBD TA 2022 (Earmarked 8% DBH/DAU)</b>	<b>40.075.959.440,00</b>	<b>36.386.151.365,36</b>	<b>90,79</b>

**Sumber: Laporan Realisasi COVID-19 per 31 Desember 2022 Kabupaten Bangka**

Adapun dampak dari pandemi Covid-19 tahun 2022 pada Kabupaten Bangka khususnya pada bidang perekonomian sudah mulai membaik dibandingkan tahun 2021, hal ini dapat dilihat dari mulai membaiknya sektor perekonomian dengan dibukanya kembali usaha-usaha di sektor pariwisata yang tingkat pengunjungnya sudah mulai meningkat dibandingkan tahun 2021.

### **3.4.2. Kenaikan Inflasi**

Tingkat inflasi tahunan di Kabupaten Bangka pada tahun 2022 mengacu pada tingkat inflasi wilayah terdekat yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 6,07 persen. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,60 persen, kenaikan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan September 2022. Namun masih dikategorikan sebagai inflasi ringan karena kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi terkait mitigasi risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sudah melakukan pengendalian jangka pendek sebagai upaya pengendalian inflasi sebagai dampak pengalihan subsidi BBM dengan membentuk Tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan melakukan beberapa program dan kegiatan selama tahun 2022 yang dilaksanakan oleh beberapa OPD terkait. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Bangka terkait dengan OPD yang melaksanakan, strategi serta program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Informasi Tambahan pada CALK-LRA.

Adapun dampak dari kenaikan inflasi ini yaitu menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan gaji/penghasilan yang tetap sementara pengeluaran atau belanja meningkat.

### **3.4.3. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Setelah berlakunya pengalihan subsidi BBM oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 03 September 2022, dampaknya adalah terhadap kenaikan nilai inflasi, termasuk di Kabupaten Bangka yaitu sebagai berikut:

**Tabel III. 9. Nilai Inflasi Kabupaten Bangka (Bulanan)**

Bulan	Inflasi
Agustus	-1,20
September	1,04
Oktober	-0,30
November	0,19
Desember	0,99

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

Selain berdampak pada nilai inflasi, kenaikan BBM juga mempengaruhi tarif angkutan umum di Kabupaten Bangka dari yang sebelumnya sebesar Rp5.000,00/orang menjadi Rp7.000,00/orang. Kenaikan tarif ini dilakukan karena penumpang yang sepi sementara harga bahan-bahan pokok naik. Kenaikan tarif angkutan umum ini menyebabkan semakin sedikit masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dan menurunkan tingkat pendapatan supir angkutan (<https://bangka.tribunnews.com/2022/09/08/harga-bbm-bersubsidi-naik-tarif-angkot-sungailiat-naik-jadi-rp7000-per-orang>)

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Sosial
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Pangan dan Pertanian
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Satuan Polisi Pamong Praja
27. Kecamatan Sungailiat
28. Kecamatan Belinyu
29. Kecamatan Riau Silip

30. Kecamatan Mendo Barat
31. Kecamatan Bakam
32. Kecamatan Puding Besar
33. Kecamatan Pemali
34. Kecamatan Merawang

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran untuk Tahun Anggaran 2022 berpegang pada asumsi dasar sebagai dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansinya yang terdiri dari.

1. Kemandirian entitas yang berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
2. Kesenambungan entitas yang berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
3. Keterukuran dalam satuan uang yang berarti bahwa semua kegiatan yang disajikan dapat diukur dengan uang.

Pokok-pokok kebijakan akuntansi tersebut adalah:

##### **1. Kebijakan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
- b. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.
- d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



- e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).
- f. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **2. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
  - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
  - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - 5) menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - 6) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya.
- b. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - 3) Neraca;
  - 4) Laporan Operasional (LO);
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LRA diakui dalam periode berjalan pada saat uang kas diterima. Pendapatan dicatat sebesar uang kas yang diterima selama periode berjalan.
- b. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan-LRA (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan-LRA. Pengembalian yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
- e. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan- LO (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan-LO. Pengembalian yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **2. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA dan Beban-LO**

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya ditandatangani oleh pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- b. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain yang Sah.
- c. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- d. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

## **3. Kebijakan Akuntansi Piutang**

- a. Piutang pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- b. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima direkening kas umum daerah.
- c. Aset berupa piutang dineraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
- d. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.
- e. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

- f. Pendapatan diterima di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, apabila transaksi dilaksanakan pada tanggal 15 dan atau dibawah tanggal tersebut, maka dicatat pada bulan yang sama, tetapi apabila transaksi dilakukan setelah tanggal 15 maka dicatat pada bulan berikutnya.
- g. Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :
  - 1) Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen);
  - 2) Kurang lancar, apabila umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);
  - 3) Diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen);
  - 4) Macet, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen);
- h. Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :
  - 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen);
  - 2) Kurang lancar, apabila setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);
  - 3) Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen);
  - 4) Macet, apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)
- i. Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi :
  - 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen)
  - 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen)
  - 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen)
  - 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada

Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penyisihan Piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

- j. Piutang Transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan :
- 1) Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 2) Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

#### **4. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

- a. Persediaan diakui:
- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
  - 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b. Persediaan disajikan sebesar:
- 1) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian,
  - 2) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
  - 3) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- c. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- d. Dalam hal persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- e. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada pengurus barang
- f. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- g. Pemerintah Kabupaten Bangka mencatat persediaan secara periodik, dimana jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, maka angka yang diakui adalah angka menurut *stock opname*.

#### **5. Kebijakan Akuntansi Investasi**

- a. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- b. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.

- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
  - 1) Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
  - 2) Metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
  - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- d. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
  - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
  - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
  - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
  - 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

## 6. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
  - 1) Tanah.
  - 2) Peralatan dan Mesin.
  - 3) Gedung dan Bangunan.
  - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  - 5) Aset Tetap Lainnya.
  - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- b. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Berwujud.
  - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
  - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dibagi ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut:
  - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- 2) Pengeluaran untuk alat berat, konstruksi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 3) Pengeluaran aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku peustakaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan dalam *on face* neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai aset *extra comptable*.
  - e. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - f. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
  - g. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  - h. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
  - i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
  - j. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
  - k. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
  - l. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata guna mendapatkan nilai penyusutan per bulan.
  - m. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  - n. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
  - o. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku peustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  - p. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

## 7. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
  - b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
    - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    - 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
  - c. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
    - 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
    - 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
  - d. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
8. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
- a. Aset tak berwujud meliputi:
    - 1) Piranti lunak (*software*) komputer;
    - 2) lisensi dan *franchise*;
    - 3) hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya;
    - 4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
    - 5) aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
    - 6) aset tak berwujud dalam pengerjaan.
  - b. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - 1) kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dimasa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi;
    - 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  - c. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.
  - d. Masa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dimaksud.
  - e. Umur atau masa manfaat dan/atau tarif amortisasi aset tak berwujud barang milik daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :
    - 1) Aset tak berwujud yang diperoleh secara internal ataupun pihak lainnya atas nama pemerintah daerah, maka ditetapkan umur atau masa manfaatnya 5 (lima) tahun dan batas kapitalisasi adalah 2 (dua) tahun



- 2) Aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal, maka ditetapkan umur atau masa manfaatnya berdasarkan lisensi/ijin penggunaan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam rangka mengoperasikan aset tak berwujud tersebut. Apabila tidak diketahui lisensinya, maka aset tak berwujud tersebut tidak dilakukan amortisasi.
- f. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- g. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
- h. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
  - 1) Meningkatkan fungsi *software*; dan
  - 2) Meningkatkan efisiensi *software*.

## 9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (duabelas) bulan dan lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- c. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- f. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

## 10. Kebijakan Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

- a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
  - Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
  - Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar.
- c. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset



- konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- d. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
  - e. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
  - f. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat imbalan yang disediakan oleh mitra.
  - g. Pengukuran kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
  - h. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.
  - i. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
  - j. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.
  - k. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

## **11. Kebijakan Properti Investasi**

- a. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
  - Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan.
  - Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (Biaya Transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- c. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- d. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
- e. Properti investasi dinilai dengan metode biaya yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Properti investasi, kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

- g. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- h. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- i. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- j. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- k. Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- l. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

## **12. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan**

- a. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- b. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- d. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- f. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- g. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- i. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- j. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- k. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
- l. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- m. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- n. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Pemerintah Daerah**

##### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Belanja BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2019**

- a. BLUD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) ke BUD dan BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).
- b. Pejabat penandatanganan SP3BP adalah PA/KPA pada OPD.
- c. Untuk OPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis yang berstatus BLUD yang mana melakukan penunjukan pemimpin BLUD berdasarkan aturan yang berlaku maka wewenang penandatanganan SP3BP ada di pemimpin BLUD yang bertindak sebagai KPA.
- d. Periode penyampaian SP3BP ke BUD adalah setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- e. SP3BP dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan oleh PPKD.
- f. SP3BP disampaikan ke BUD dengan melampirkan :
  - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh PA / KPA;
  - 2) Berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan OPD;
  - 3) Bukti pengembalian uang dan pendapatan langsung (apabila menurut peraturan perundang-undangan saldo uang harus dikembalikan); dan
  - 4) Fotokopi rekening Koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan uang dan pendapatan langsung.
- g. BUD menerbitkan SP2BP berdasarkan SP3BP yang diajukan oleh OPD setelah dilakukan pengujian terhadap SP3BP.
- h. Pengujian terhadap SP3BP meliputi:
  - 1) memeriksa kelengkapan lampiran penyampaian SP3BP;
  - 2) memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
  - 3) memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3BP dengan SPTJ; dan
  - 4) mencocokkan tanda tangan PA/KPA pada SP3BP dan tanda tangan PA/KPA pada SPTJ dengan *specimen* tanda tangan.

##### **2. Kebijakan Akuntansi Belanja Dana BOS APBN berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2019**

- a. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari Dana BOS APBN yang digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri, Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) BOS APBN ke PPKD selaku BUD.
- b. SP2B BOS APBN dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan oleh PPKD.

- c. Periode penyampaian SP2B BOS APBN ke PPKD selaku BUD dilakukan satu kali dalam tiga bulan (per triwulan).
- d. Penyampaian SP2B BOS APBN sebagaimana dimaksud dengan melampirkan :
  - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan Negeri;
  - 2) Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN; dan
  - 3) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Dana BOS APBN (ditandatangani dan di cap oleh pejabat yang berwenang).
- e. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) BOS APBN berdasarkan SP2B BOS APBN yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.
- f. SPB BOS APBN diterbitkan setelah dilakukan pengujian administrasi terhadap SP2B BOS APBN.

Pengujian secara administrasi meliputi :

- 1) memeriksa kesesuaian kelengkapan lampiran;
- 2) memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja sumber dana BOS APBN;
- 3) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
- 4) memeriksa jumlah belanja BOS APBN tidak melebihi ambang batas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BOS APBN;
- 5) memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP2B BOS APBN dengan SPTJ; dan
- 6) mencocokkan tanda tangan Penggua Anggaran pada SP2B dengan speciemen tanda tangan.

### **3. Kebijakan Akuntansi Hibah Langsung berupa Barang/Jasa/Surat Berharga berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2019**

- a. Penyampaian MPHL-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD.
- b. Atas Pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa barang/jasa/surat berharga.
- c. Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh OPD, BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS.
- d. Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian.
- e. Pengujian MPHL-BJS meliputi :
  - 1) memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud;
  - 2) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
  - 3) menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan speciemen tandatangan;
  - 4) mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam SPTMHL;

- 5) menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan
- 6) memeriksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang.

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

*Penjelasan khusus: pemberian nomor dalam bab ini disesuaikan dengan kode rekening akun.*

### A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

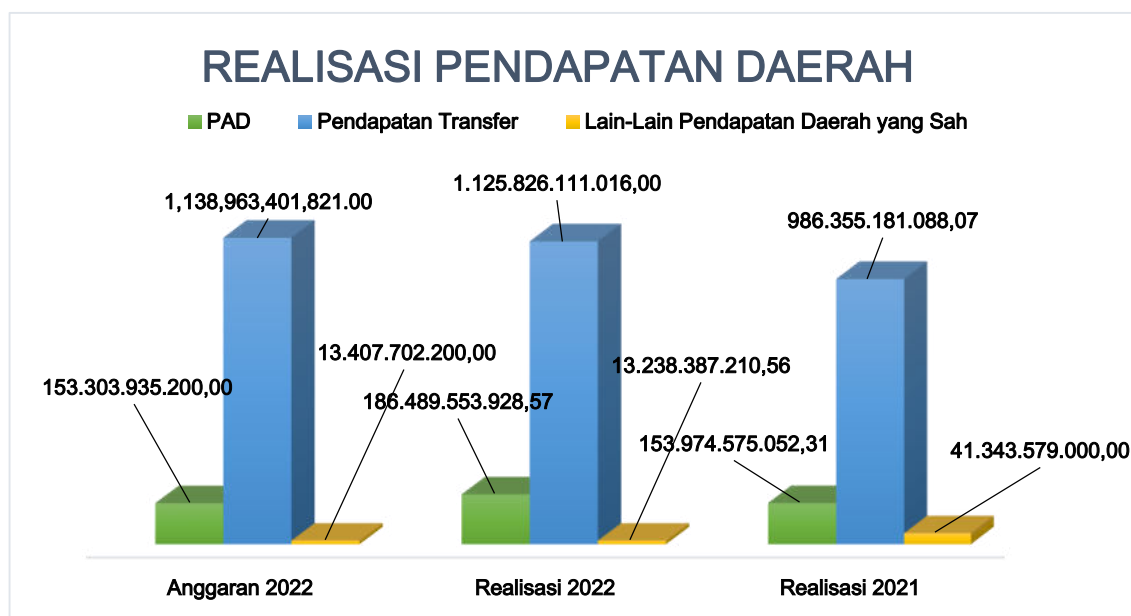
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka selama satu periode pelaporan yaitu tahun anggaran 2022.

### 4. PENDAPATAN

Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.305.675.039.221,00 dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.325.554.052.155,13 atau 101,52%. Jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.181.673.335.140,38 terjadi kenaikan sebesar 12,18%, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pendapatan Asli Daerah	153.303.935.200,00	186.489.553.928,57	121,65	153.974.575.052,31	21,12
Pendapatan Transfer	1.138.963.401.821,00	1.125.826.111.016,00	98,85	986.355.181.088,07	14,14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.407.702.200,00	13.238.387.210,56	98,74	41.343.579.000,00	(67,98)
<b>Total</b>	<b>1.305.675.039.221,00</b>	<b>1.325.554.052.155,13</b>	<b>101,52</b>	<b>1.181.673.335.140,38</b>	<b>12,18</b>



**Gambar V.1 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 dan 2021**

Melihat grafik di atas, maka dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagian besar bersumber dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 84,93%.

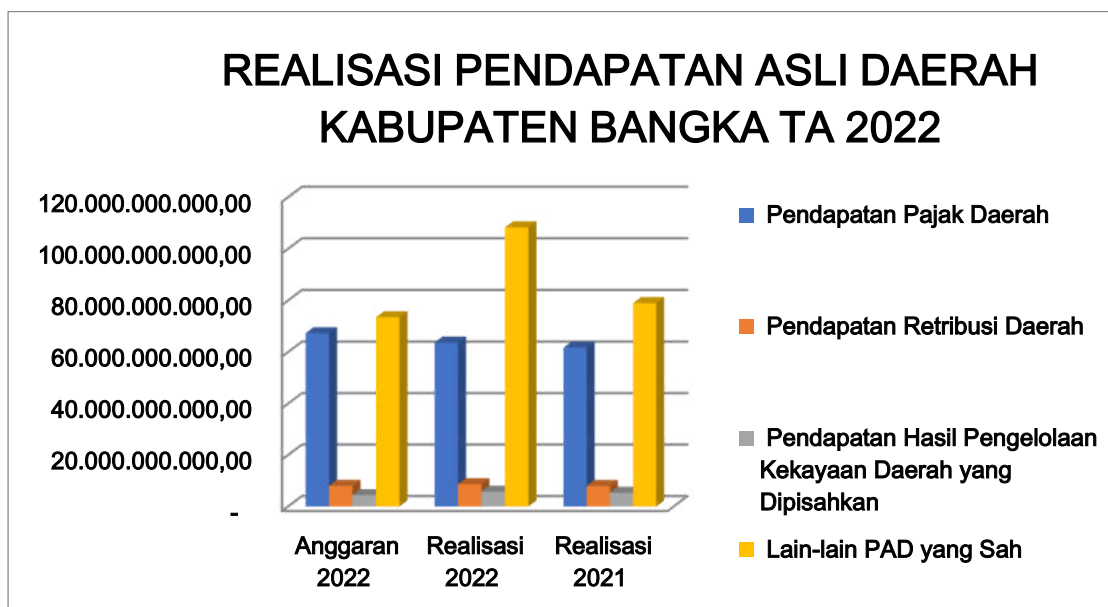
#### 4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp153.303.935.200,00 dengan realisasi Rp186.489.553.928,57 atau 121,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp153.974.575.052,31, maka terjadi kenaikan sebesar 21,12%.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pendapatan Pajak Daerah	67.324.310.750,00	63.695.737.792,48	94,61	61.738.507.052,82	3,17
Pendapatan Retribusi Daerah	8.034.806.500,00	8.678.759.954,00	108,01	7.948.589.926,00	9,19
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.500.000,00	5.789.289.832,02	130,76	5.297.823.624,10	9,28
Lain-lain PAD yang Sah	73.517.317.950,00	108.325.766.350,07	147,35	78.989.654.449,39	37,14
<b>Total</b>	<b>153.303.935.200,00</b>	<b>186.489.553.928,57</b>	<b>121,65</b>	<b>153.974.575.052,31</b>	<b>21,12</b>

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar V.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022**

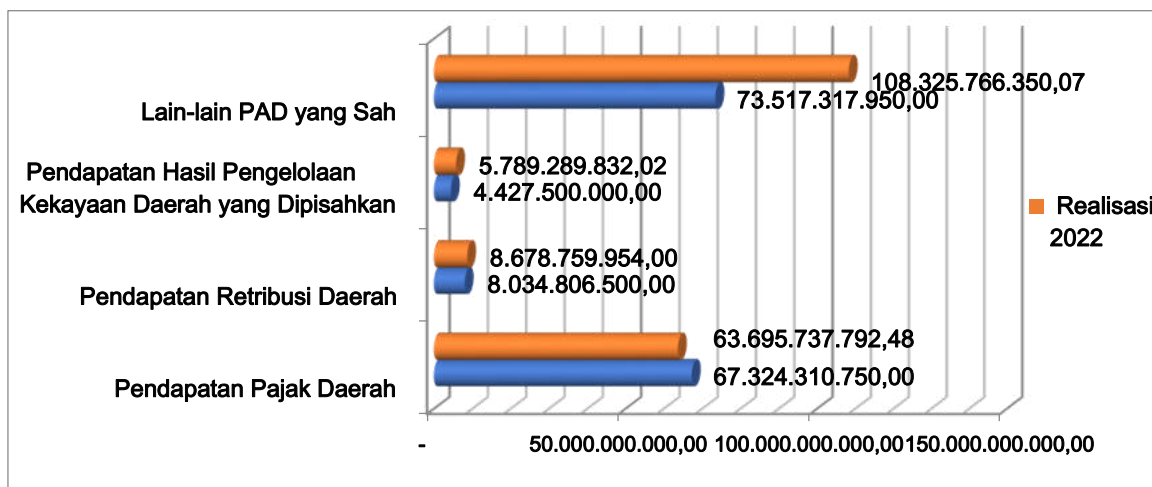


Berdasarkan grafik di atas, Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen terbesar pendukung Pendapatan Asli Daerah. Namun realisasi tersebut bersumber dari pendapatan BLUD senilai Rp98.752.800.495,00 sehingga Kabupaten Bangka tidak dapat menggunakan pendanaan tersebut untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikarenakan peruntukan penggunaan dana tersebut terbatas hanya untuk BLUD saja.



Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar V.3 Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022**



#### 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp67.324.310.750,00 dengan realisasi sebesar Rp63.695.737.792,48 atau 94,61% dan tahun 2021 anggaran sebesar Rp59.149.310.750,00 dengan realisasi sebesar Rp61.738.507.052,82 atau 104,38%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.957.230.739,66 dibanding tahun 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

##### 4.1.1.06. Pajak Hotel

Dengan anggaran sebesar Rp1.875.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.204.526.837,00 atau 64,24%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	1.838.000.000,00	1.157.914.837,00	63,00	595.170.221,65
4.1.1.06.03	Pajak Losmen	19.000.000,00	41.112.000,00	216,38	35.620.000,00
4.1.1.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	6.000.000,00	5.500.000,00	91,67	6.702.000,00
4.1.1.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.875.000.000,00</b>	<b>1.204.526.837,00</b>	<b>64,24</b>	<b>637.492.221,65</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp637.492.221,65 terjadi kenaikan sebesar Rp567.034.615,35 dikarenakan pandemi *covid 19* berskala internasional yang melanda dunia telah berkurang serta banyaknya masyarakat yang sudah menerima vaksin, sehingga pendapatan untuk sektor pariwisata mulai membaik. Selain itu adanya pemasangan *tapping box* untuk wajib pajak hotel sebanyak 11 unit.

Dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.06.01 Pajak Hotel

Anggaran sebesar Rp1.838.000.000,00 dengan realisasi Rp1.157.914.837,00 atau 63,00%.

4.1.1.06.01.0001 Pajak Hotel

Anggaran sebesar Rp1.838.000.000,00 dengan realisasi Rp1.157.914.837,00 atau 63,00%.

4.1.1.06.03 Pajak Losmen

Anggaran sebesar Rp19.000.000,00 dengan realisasi Rp41.112.000,00 atau 216,38%.

4.1.1.06.03.0001 Pajak Losmen

Anggaran sebesar Rp19.000.000,00 dengan realisasi Rp41.112.000,00 atau 216,38%.

4.1.1.06.04 Pajak Gubuk Pariwisata

Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dengan realisasi Rp5.500.000,00 atau 91,67%.

4.1.1.06.04.0001 Pajak Gubuk Pariwisata

Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dengan realisasi Rp5.500.000,00 atau 91,67%.

4.1.1.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.1.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.1.07 Pajak Restoran

Dengan anggaran Rp3.700.000.000,00 dan realisasi sebesar

Rp4.713.705.302,00 atau 127,40%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.400.000.000,00	1.993.250.562,00	142,38	963.507.249,00
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	671.701.116,00	67,17	1.678.345.857,00
4.1.1.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	300.000.000,00	282.539.590,00	94,18	0,00
4.1.1.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000,00	272.843.038,00	136,42	0,00
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	800.000.000,00	1.493.370.996,00	186,67	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.700.000.000,00</b>	<b>4.713.705.302,00</b>	<b>127,40</b>	<b>2.641.853.106,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.641.853.106,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.071.852.196,00 disebabkan karena pandemi *covid-19* berskala internasional yang melanda dunia telah berkurang dan rata-rata masyarakat sudah menerima vaksin, sehingga pendapatan untuk sektor pariwisata mulai naik. Selain itu banyaknya kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN membayar pajak makan minum kegiatan, serta adanya pemasangan *tapping box* untuk wajib pajak restoran sebanyak 44 unit.

Adapun rincian pajak restoran sebagai berikut:

4.1.1.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi Rp1.993.250.562,00 atau 142,38%.

4.1.1.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi Rp1.993.250.562,00 atau 142,38%.

4.1.1.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp671.701.116,00 atau 67,17%.

4.1.1.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp671.701.116,00 atau 67,17%.

4.1.1.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi Rp282.539.590,00 atau 94,18%.

4.1.1.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi Rp282.539.590,00 atau 94,18%.

4.1.1.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp272.843.038,00 atau 136,42%.

4.1.1.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp272.843.038,00 atau 136,42%.

4.1.1.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dengan realisasi Rp1.493.370.996,00 atau 186,67%.

4.1.1.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dengan realisasi Rp1.493.370.996,00 atau 186,67%.

4.1.1.08. Pajak Hiburan

Anggaran sebesar Rp248.810.750,00 dengan realisasi sebesar Rp69.964.900,00 atau 28,12%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.08.01	Pajak Tontonan Film	25.789.750,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00
4.1.1.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	146.340.000,00	36.558.000,00	24,98	13.685.200,00
4.1.1.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	20.630.000,00	19.666.900,00	95,33	21.770.800,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa & Pusat Kebugaran (Fitness Center)	36.051.000,00	11.240.000,00	31,18	4.760.000,00
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	2.500.000,00	0,00	1.915.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>248.810.750,00</b>	<b>69.964.900,00</b>	<b>28,12</b>	<b>47.101.000,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp47.101.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp22.863.900,00 yang disebabkan meningkatnya kesadaran wajib pajak hiburan dalam membayar pajak. Dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.08.01 Pajak Tontonan Film

Anggaran sebesar Rp25.789.750,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.1.08.01.0001 Pajak Tontonan Film

Anggaran sebesar Rp25.789.750,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.1.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

Anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.1.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

Anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.1.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp146.340.000,00 dengan realisasi Rp36.558.000,00 atau 24,98%.

4.1.1.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Anggaran sebesar Rp146.340.000,00 dengan realisasi Rp36.558.000,00 atau 24,98%.

4.1.1.08.07	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
	Anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.1.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
	Anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
	Anggaran sebesar Rp20.630.000,00 dengan realisasi Rp19.666.900,00 atau 95,33%.
4.1.1.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
	Anggaran sebesar Rp20.630.000,00 dengan realisasi Rp19.666.900,00 atau 95,33%.
4.1.1.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
	Anggaran sebesar Rp36.051.000,00 dengan realisasi Rp11.240.000,00 atau 31,18%.
4.1.1.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
	Anggaran sebesar Rp36.051.000,00 dengan realisasi Rp11.240.000,00 atau 31,18%.
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga
	Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp2.500.000,00 atau 0,00%.
4.1.1.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga
	Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp2.500.000,00 atau 0,00%.

Pajak pertandingan olahraga tidak dianggarkan penerimaannya pada tahun 2022 dikarenakan penerimaan pajak pertandingan olahraga bersifat insidental, namun ternyata terdapat realisasi penerimaan pada tahun 2022 dari satu wajib pajak baru untuk jenis pajak ini yaitu ASKAB PSSI Bangka.

#### 4.1.1.09. Pajak Reklame

Anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.135.335.425,00 atau 81,10%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.250.000.000,00	1.027.913.645,00	82,23	1.006.902.203,00
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00	107.421.780,00	71,61	308.004.925,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.135.335.425,00</b>	<b>81,10</b>	<b>1.314.907.128,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.314.907.128,00 terjadi penurunan sebesar Rp179.571.703,00. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan wajib pajak yang mau memperpanjang masa pemasangan reklame dan minimnya objek baru yang melakukan promosi iklan untuk produk-produk baru mereka.

Dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan realisasi Rp1.027.913.645,00 atau 82,23%.

4.1.1.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan realisasi Rp1.027.913.645,00 atau 82,23%.

4.1.1.09.02 Pajak Reklame Kain

Anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dengan

realisasi Rp107.421.780,00 atau 71,61%.

4.1.1.09.02.0001 Pajak Reklame Kain

Anggaran sebesar  
Rp150.000.000,00 dengan  
realisasi Rp107.421.780,00  
atau 71,61%.

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan

Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar  
Rp31.384.246.858,00 atau 104,61%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	36.937.723.225,00
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.000.000.000,00	31.384.246.858,00	104,61	294.678.327,60
	<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>31.384.246.858,00</b>	<b>104,61</b>	<b>37.232.401.552,60</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar  
Rp37.232.401.552,60 terjadi penurunan yaitu sebesar  
Rp5.848.154.694,60. Hal ini disebabkan karena potensi PPJ  
sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan berkisar rata-rata  
Rp2.500.000.000,00/bulan.

Dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan  
realisasi Rp31.384.246.858,00 atau 104,61%.

4.1.1.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan  
Sumber Lain

Anggaran sebesar  
Rp30.000.000.000,00  
dengan realisasi  
Rp31.384.246.858,00 atau  
104,61%.

Sebagai informasi tambahan bahwa realisasi pajak  
penerangan jalan dihasilkan sendiri pada tahun 2022 tidak  
dianggarkan lagi dan tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan  
putusan MK No.80/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor  
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
terhadap UUD NKRI Tahun 1945 mulai tanggal 13 Desember  
2021 menyatakan Pajak Penerangan Jalan tidak dapat dikenakan  
lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri.

4.1.1.11. Pajak Parkir

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar



Rp50.670.600,00 atau 101,34%, dengan rincian:

4.1.1.11.01 Pajak Parkir

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp50.670.600,00 atau 101,34%.

4.1.1.11.01.0001 Pajak Parkir

Anggaran sebesar  
Rp50.000.000,00 dengan  
realisasi Rp50.670.600,00  
atau 101,34%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp38.130.900,00 terjadi kenaikan sebesar yaitu Rp12.539.700,00. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak parkir dalam membayar pajak.

4.1.1.12. Pajak Air Tanah

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp234.741.147,00 atau 117,37%, dengan rincian:

4.1.1.12.01. Pajak Air Tanah

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp234.741.147,00 atau 117,37%.

4.1.1.12.01.0001 Pajak Air Tanah

Anggaran sebesar  
Rp200.000.000,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp234.741.147,00 atau  
117,37%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp224.057.532,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.683.615,00. Hal ini disebabkan karena tingginya kesadaran masing-masing wajib pajak air tanah dalam membayar pajak daerah dan adanya wajib pajak baru hasil pendataan oleh bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah dan UPT BPPKAD Kabupaten Bangka.

4.1.1.13. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.433.000,00 atau 88,11%, dengan rincian:

4.1.1.13.01. Pajak Sarang Burung Walet

Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.433.000,00 atau 88,11%.

4.1.1.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet

Anggaran sebesar Rp  
Rp30.000.000,00 dan realisasi

sebesar Rp26.433.000,00 atau 88,11%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp25.470.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp963.000,00. Hal ini disebabkan adanya beberapa objek pajak sarang burung walet yang mengalami peningkatan permintaan sarang burung walet.

#### 4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dengan anggaran sebesar Rp7.320.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.936.515.639,48 atau 94,75%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.1.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.820.500.000,00	534.127.370,10	29,34	1.501.912.147,00
4.1.1.14.15	Pajak Kaolin	700.000.000,00	325.794.000,00	46,54	500.724.000,00
4.1.1.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	770.000.000,00	518.752.022,50	67,37	385.097.521,00
4.1.1.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	1.000.000.000,00	2.973.329.892,00	297,33	281.235.000,00
4.1.1.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	500.000.000,00	439.767.856,00	87,95	535.969.916,00
4.1.1.14.30	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	26.106.156,80	87,02	21.784.604,80
4.1.1.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00	2.118.638.342,08	84,75	1.592.036.241,77
	<b>Jumlah</b>	<b>7.320.500.000,00</b>	<b>6.936.515.639,48</b>	<b>94,75</b>	<b>4.818.759.430,57</b>

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.818.759.430,57 terjadi kenaikan Rp2.117.756.208,91. Hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak baru yaitu PT Cinta Mapur Indonesia.

Dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.1.1.14.12 Pajak Granit/Andesit

Anggaran sebesar Rp1.820.500.000,00 dengan realisasi Rp534.127.370,10 atau 29,34%.

##### 4.1.1.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit

Anggaran sebesar Rp1.820.500.000,00 dengan realisasi Rp534.127.370,10 atau 29,34%.

##### 4.1.1.14.15 Pajak Kaolin

Anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi Rp325.794.000,00 atau 46,54%.

##### 4.1.1.14.15.0001 Pajak Kaolin

Anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi Rp325.794.000,00

atau 46,54%.

- 4.1.1.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil  
Anggaran sebesar Rp770.000.000,00 dengan realisasi Rp518.752.022,50 atau 67,37%.
- 4.1.1.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil  
Anggaran sebesar Rp770.000.000,00 dengan realisasi Rp518.752.022,50 atau 67,37%.
- 4.1.1.14.24 Pajak Pasir Kuarsa  
Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp2.973.329.892,00 atau 297,33%.
- 4.1.1.14.24.0001 Pajak Pasir Kuarsa  
Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp2.973.329.892,00 atau 297,33%.
- 4.1.1.14.28 Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)  
Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp439.767.856,00 atau 87,95%.
- 4.1.1.14.28.0001 Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)  
Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp439.767.856,00 atau 87,95%.
- 4.1.1.14.30 Pajak Tanah Liat  
Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi Rp26.106.156,80 atau 87,02%.
- 4.1.1.14.30.0001 Pajak Tanah Liat  
Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi Rp26.106.156,80 atau 87,02%.
- 4.1.1.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya  
Anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi Rp2.118.638.342,08 atau 84,75%.

- 4.1.1.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
- Anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi Rp2.118.638.342,08 atau 84,75%.
- 4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi Rp8.425.512.420,00 atau 84,26% dengan rincian:
- 4.1.1.15.01 PBB-P2
- Anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi Rp8.425.512.420,00 atau 84,26%.
- 4.1.1.15.01.0001 PBB-P2
- Anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi Rp8.425.512.420,00 atau 84,26%.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.622.543.407,00 terjadi kenaikan sebesar Rp802.969.013,00 yang disebabkan karena adanya kenaikan NJOP untuk wilayah Kecamatan Sungailiat, tambak udang, perkebunan dan SPBU serta adanya tambahan objek pajak baru hasil pendataan oleh bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah dan UPT BPPKAD Kabupaten Bangka.
- 4.1.1.16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Dengan anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.514.085.664,00 atau 76,11%, dengan rincian:
- 4.1.1.16.01. BPHTB-Pemindahan Hak
- Anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi Rp5.184.891.640,00 atau 69,13%.
- 4.1.1.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak
- Anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi Rp5.184.891.640,00 atau 69,13%.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.400.478.612,00 terjadi penurunan untuk BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp215.586.972,00 dikarenakan menurunnya transaksi jual beli.

#### 4.1.1.16.02. BPHTB-Pemberian Hak Baru

Anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi Rp4.329.194.024,00 atau 86,58%.

##### 4.1.1.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru

Anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi Rp4.329.194.024,00 atau 86,58%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp Rp1.735.312.163,00 terjadi kenaikan untuk BPHTB- Pemberian Hak Baru sebesar Rp2.593.881.861,00 dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi.

### 4.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp8.034.806.500,00 dengan realisasi Rp8.678.759.954,00 atau 108,01%. Jika dibandingkan penerimaan retribusi tahun 2021 yaitu Rp7.948.589.926,00 terjadi kenaikan sebesar Rp730.170.028,00.

#### 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp1.863.380.000,00 dengan realisasi Rp2.375.371.736,00 atau 127,48%, dibandingkan dengan penerimaan retribusi tahun 2021 yaitu Rp1.848.474.699,00 terjadi kenaikan sebesar Rp526.897.037,00.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000,00	706.445.000,00	117,74	583.615.000,00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	666.500.000,00	133,30	526.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	207.630.000,00	69,21	188.015.000,00
4.1.2.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	90.900.000,00
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.780.000,00	4.862.000,00	30,81	0,00
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	162.900.000,00	135,75	144.470.000,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	599.434.736,00	199,81	315.474.699,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.863.380.000,00</b>	<b>2.375.371.736,00</b>	<b>127,48</b>	<b>1.848.474.699,00</b>

#### 4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi Rp706.445.000,00 atau 117,74%, dengan rincian:

##### 4.1.2.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi Rp706.445.000,00 atau 117,74%,

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp583.615.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp122.830.000,00, hal ini dikarenakan adanya penambahan potensi dan objek retribusi baru sejak berkurangnya dampak dari virus *corona*, yaitu: ruko, restoran, warung/warkop, pembuangan langsung ke TPA.

#### 4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp666.500.000,00 atau 133,30%, dengan rincian:

##### 4.1.2.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp666.500.000,00 atau 133,30%,.

Realisasi penerimaan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2021 yaitu Rp526.000.000,00. Terjadinya kenaikan sebesar Rp140.500.000,00 yang disebabkan oleh penerapan sistem lelang atas parkir di tepi jalan umum, sehingga nilai realisasi yang di dapat minimal sesuai dengan target yang dianggarkan.

#### 4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.630.000,00 atau 69,21% dengan rincian:

##### 4.1.2.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.630.000,00 atau 69,21%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp188.015.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp19.615.000,00, kenaikan terjadi oleh karena terlaksananya secara rutin kegiatan audit dan inspeksi kendaraan.

4.1.2.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
	Anggaran sebesar Rp27.600.000,00 dengan realisasi Rp27.600.000,00 atau 100,00%, dengan rincian:
4.1.2.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
	Anggaran sebesar Rp27.600.000,00 dengan realisasi Rp27.600.000,00 atau 100,00%.
	Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp90.900.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp63.300.000,00, hal ini dikarenakan adanya PMK Nomor: 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pasal 2 ayat 1 bahwa jenis PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan penerbitan KKPR yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi penerimaan dari:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan penerbitan KKPR untuk Kegiatan Berusaha</li> <li>• Pelayanan penerbitan KKPR untuk kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional.</li> </ul>
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Anggaran sebesar Rp15.780.000,00 dengan realisasi Rp4.862.000,00 atau 30,81%, dengan rincian:
4.1.2.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Anggaran sebesar Rp15.780.000,00 dengan realisasi Rp4.862.000,00 atau 30,81%,.
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah objek retribusi yang baru dipungut pada tahun 2022. Retribusi ini dianggarkan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai implementasi atas Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus)
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
	Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp162.900.000,00 atau 135,75%, dengan rincian:

4.1.2.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp162.900.000,00 atau 135,75%,

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp144.470.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.430.000,00 kenaikan penerimaan oleh karena adanya penambahan alat-alat baru dan penambahan jumlah perusahaan yang melakukan tera ulang.

4.1.2.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.434.736,00 atau 199,81% dengan rincian:

4.1.2.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.434.736,00 atau 199,81%.

Realisasi penerimaan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2021 sebesar Rp315.474.699,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp283.960.037,00, karena adanya tambahan dari ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2021.

#### 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp5.296.326.500,00 dengan realisasi Rp5.144.358.544,00 atau 97,13%, dibandingkan dengan penerimaan retribusi tahun 2021 yaitu Rp5.507.581.677,00 terjadi penurunan sebesar Rp363.223.133,00.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	516.350.000,00	553.247.044,00	107,15	584.313.162,00
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.557.766.000,00	2.583.857.000,00	101,02	2.663.301.015,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	5.000.000,00	2.922.000,00	58,44	5.156.000,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.715.810.500,00	1.715.816.500,00	100,00	1.607.900.500,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	33.014.000,00	66,03	38.670.000,00
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat	366.400.000,00	222.627.000,00	60,76	521.240.000,00



Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Rekreasi & Olahraga				
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	85.000.000,00	32.875.000,00	38,68	87.001.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.296.326.500,00</b>	<b>5.144.358.544,00</b>	<b>97,13</b>	<b>5.507.581.677,00</b>

#### 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Anggaran sebesar Rp516.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp553.247.044,00 atau 107,15% dengan rincian:

##### 4.1.2.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Anggaran sebesar Rp2.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.250.000,00 atau 154,55%. Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp4.000.000,00, jika dibandingkan terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp250.000,00. Hal ini disebabkan banyaknya kios yang terisi, jumlah pengunjung yang meningkat oleh karena berakhirnya aturan PPKM pandemi covid 19. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

##### 4.1.2.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah

Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.921.544,00 atau 69,92%. Retribusi Penyewaan Tanah dilaksanakan oleh OPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp82.101.162,00 terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp12.179.618,00 yang disebabkan adanya mitra pemanfaatan yang sudah tidak beroperasi dan mengalami permasalahan finansial dalam perusahaan.

##### 4.1.2.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium

Anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.225.000,00 atau 138,15%. Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp187.400.000,00. Jika dibandingkan

terdapat kenaikan sebesar Rp19.825.000,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 banyaknya kegiatan proyek di Dinas PUPR dan Pelayanan Pembuatan DMF (*Desain Mix Formula*) dari Kabupaten Lain dan Kegiatan di Luar Dinas PUPR. Retribusi Pemakaian Laboratorium dilaksanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### 4.1.2.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat

Anggaran sebesar Rp263.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp271.850.500,00 atau 103,13%. Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp310.812.000,00. Jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp38.961.500,00 secara keseluruhan. Namun dikarenakan Retribusi Pemakaian Alat dilaksanakan oleh beberapa OPD, terjadi kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda antar OPD, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp102.190.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp71.250.000,00. Jika dibandingkan terjadi kenaikan sebesar Rp30.940.000,00, yang disebabkan tidak ada lagi pemberlakuan PPKM di Kabupaten Bangka.
- b. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp48.600.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp63.600.000,00. Jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp15.000.000,00, hal ini dikarenakan salah satu penyewa kios/ruko tidak memperpanjang kontrak sewa.
- c. Dinas Kesehatan sebesar Rp90.510.500,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar

Rp117.676.500,00. Jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp27.166.000,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan pemeriksaan air dan makanan.

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.550.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp58.285.500,00. Jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp27.735.500,00 hal ini dikarenakan tidak adanya pinjaman Alat Berat dari Luar Kabupaten Bangka.

#### 4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Anggaran sebesar Rp2.557.766.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.583.857.000,00 atau 101,02% dengan rincian:

##### 4.1.2.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan

Anggaran sebesar Rp1.407.766.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.513.868.000,00 atau 107,54%. Retribusi tersebut diselenggarakan oleh dua OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.483.768.000,00 serta OPD Sekretariat Daerah sebesar Rp30.100.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 pada OPD Sekretariat Daerah sebesar Rp23.600.000,00 telah terjadi kenaikan sebesar Rp6.500.000,00 hal ini dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun 2021 oleh masyarakat.

Sedangkan pada OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp1.547.646.000,00 maka telah terjadi penurunan sebesar Rp63.878.000,00 hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan fasilitas pasar sehingga

pembayaran retribusi menurun dari Rp8.000,00 menjadi Rp5.000,00.

4.1.2.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan

Anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.069.989.000,00 atau 93,04%. Retribusi tersebut diselenggarakan oleh OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp1.092.055.015,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp22.066.015,00 hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi melemah akibat pandemi yang mengakibatkan banyak pedagang tidak berjualan sehingga menurunkan penerimaan.

4.1.2.02.04 Retribusi Terminal

Anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.922.000,00 atau 58,44% dengan rincian:

4.1.2.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.922.000,00 atau 58,44%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp5.156.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.234.000,00, hal ini berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung Nomor:551/210/DISHUB tanggal 25 Juli 2022 Perihal Penghapusan Retribusi Terminal. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 88 ayat 3 yang menjelaskan tentang Jenis pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi dasar peraturan tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan “Tidak Berlaku”. Maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka menghentikan segala bentuk pungutan

Retribusi Terminal per tanggal 26 Juli 2022.

4.1.2.02.05

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Anggaran sebesar Rp1.715.810.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.715.816.500,00 atau 100,00% dengan rincian:

4.1.2.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Anggaran sebesar Rp1.715.810.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.715.816.500,00 atau 100,00%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp1.607.900.500,00 terjadi kenaikan sebesar Rp107.916.000,00, yang disebabkan adanya penambahan infrastruktur baru, seperti lahan parkir yang sudah representatif.

4.1.2.02.07

Retribusi Rumah Potong Hewan

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp33.014.000,00 atau 66,03%. dengan rincian:

4.1.2.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp33.014.000,00 atau 66,03%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp38.670.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.656.000,00, hal ini dikarenakan pada tahun 2022:

- a. Adanya penyakit ASF (*African Swine Fever*) Flu Babi Afrika yang sangat menular sehingga banyak ternak babi yang mati hingga mencapai 100% sehingga menyebabkan keterbatasan pada populasi babi.
- b. Adanya penyakit kuku dan mulut (PMK) yang menyerang sapi sehingga menyebabkan keterbatasan populasi sapi.

4.1.2.02.09

Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga

Anggaran sebesar Rp366.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp222.627.000,00 atau 60,76% dengan rincian:

4.1.2.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Anggaran sebesar Rp366.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp222.627.000,00 atau 60,76%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp521.240.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp298.613.000,00, dikarenakan pada tahun 2021 realisasi retribusi terdapat pada 2 OPD yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan pada tahun 2022 hanya direalisasi oleh OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga saja. Dimana berdasarkan data realisasi pada tahun 2021 realisasi retribusi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp213.740.000,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp222.627.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp8.887.000,00 atau 4,16% yang diakibatkan minat olahraga masyarakat cukup tinggi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

#### 4.1.2.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.875.000,00 atau 38,68% dengan rincian:

##### 4.1.2.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.875.000,00 atau 38,68%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp87.001.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp54.126.000,00, oleh karena menurunnya minat konsumen terhadap benih ikan.

#### 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp875.100.000,00 dengan realisasi Rp1.159.029.674,00 atau 132,45% dibandingkan dengan penerimaan retribusi tahun 2021 yaitu Rp592.533.550,00 terjadi kenaikan sebesar Rp566.496.124,00 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	493.083.550,00
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	30.000.000,00	26.500.008,00	88,33	53.700.000,00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	75.000,00	5,00	600.000,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00
4.1.2.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	93.600.000,00	112.296.000,00	119,97	34.590.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	(IMTA)				
4.1.2.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000,00	1.020.158.666,00	136,02	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>875.100.000,00</b>	<b>1.159.029.674,00</b>	<b>132,45</b>	<b>592.533.550,00</b>

#### 4.1.2.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.500.008,00 atau 88,33% dengan rincian:

##### 4.1.2.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.500.008,00 atau 88,33%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp53.700.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp27.199.992,00, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat Wajib Retribusi yang tutup/izin usaha tidak diperpanjang (Dragon 99/ *Green Karaoke*) dan adanya permohonan keringanan pembayaran disebabkan hasil penjualan menurun dari (Dabelyu, ST 12, Black Jack) dan adanya Wajib Retribusi yang tidak mau melakukan pembayaran disebabkan banyaknya Mihil ilegal beredar.

#### 4.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.000,00 atau 5,00% dengan rincian:

##### 4.1.2.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.000,00 atau 5,00%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp600.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp525.000,00, hal ini dikarenakan:

Penghapusan Retribusi Izin Trayek berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- Permenhub Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi.

4.1.2.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Anggaran sebesar Rp93.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.296.000,00 atau 119,97% dengan rincian:

4.1.2.03.06.0001 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Anggaran sebesar Rp93.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.296.000,00 atau 119,97%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp34.590.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp77.706.000,00, karena jumlah target yang melakukan perpanjangan IMTA melampaui dari yang ditargetkan sebanyak 5 orang namun yang melakukan perpanjangan sebanyak 6 orang.

4.1.2.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.020.158.666,00 atau 136,02% dengan rincian:

4.1.2.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.020.158.666,00 atau 136,02%.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan objek retribusi daerah yang baru dipungut pada tahun 2022 pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penerimaan yang melampaui anggaran disebabkan oleh jumlah pemohon atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang melampaui estimasi.

**4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp4.427.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.789.289.832,02 atau 130,76% dengan rincian sebagai berikut:

**4.1.3.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

Anggaran sebesar Rp4.427.500.000,00 dengan realisasi Rp5.789.289.832,02 atau 130,76% dengan rincian:

4.1.3 02.01. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)



Anggaran sebesar Rp4.427.500.000,00 dengan realisasi Rp5.789.289.832,02 atau 130,76%, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.3.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Anggaran sebesar Rp4.427.500.000,00 dengan realisasi Rp5.789.289.832,02 atau 130,76%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp5.297.823.624,10 terjadi kenaikan sebesar Rp491.466.207,92, dengan rincian sebagai berikut:

- Bank Sumsel Babel pada tahun 2022 sebesar Rp5.789.289.832,02 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5.297.823.624,10 terjadi kenaikan sebesar Rp491.466.207,92 atau 9,28%.

#### 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp73.517.317.950,00 dengan realisasi Rp108.325.766.350,07 atau 147,35% yang terdiri dari:

##### 4.1.4.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.020.969.999,00 atau 12.762,12%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.4.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.307.355.500,00
4.1.4.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	4.000.000,00	1.020.969.999,00	25.524,25	32.095.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.020.969.999,00</b>	<b>12.762,12</b>	<b>1.339.450.500,00</b>

4.1.4.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.4.01.03.0001 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Anggaran sebesar  
Rp4.000.000,00 dan realisasi  
sebesar Rp0,00 atau 0,00%.  
Pada tahun 2021 realisasi  
penerimaan juga sebesar  
Rp0,00.

#### 4.1.4.01.06. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dan realisasi  
sebesar Rp1.020.969.999,00 atau 25.524,25%.

##### 4.1.4.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-

##### Aset Lain-Lain

Anggaran sebesar  
Rp4.000.000,00 dan realisasi  
sebesar Rp1.020.969.999,00  
atau 25.524,25%. Jika  
dibandingkan dengan realisasi  
tahun 2021 sebesar  
Rp32.095.000,00 terdapat  
kenaikan pendapatan sebesar  
Rp988.874.999,00 yang  
disebabkan banyaknya usulan  
penjualan kendaraan dinas  
operasional yang diajukan oleh  
OPD selaku Pengguna Barang  
serta pelaksanaan lelang yang  
dinilai berhasil karena  
mengalami banyak peningkatan  
dari nilai limit.

#### 4.1.4.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan  
sebesar Rp3.040.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.692.477.524,00  
atau 88,57% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.4.03.01	Hasil Sewa BMD	3.000.000.000,00	2.535.174.800,00	84,51	1.304.627.063,33
4.1.4.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	10.000.000,00	67.844.000,00	678,44	53.000.000,00
4.1.4.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	30.000.000,00	89.458.724,00	298,20	80.640.331,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.040.000.000,00</b>	<b>2.692.477.524,00</b>	<b>88,57</b>	<b>1.438.267.394,33</b>

##### 4.1.4.03.01 Hasil Sewa BMD

Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan  
realisasi sebesar Rp2.535.174.800,00 atau  
84,51%, dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.1.4.03.01.0001 Hasil Sewa BMD

Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.535.174.800,00 atau 84,51%. Tahun 2021 realisasi sebesar Rp1.304.627.063,33 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.230.547.736,67. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun realisasi tahun 2022 tidak mencapai target dikarenakan terdapat mitra sewa yang kontraknya berakhir tahun 2022 dan tidak melakukan perpanjangan, sehingga potensi pendapatan sewa (target pendapatan) tidak dapat melampaui anggaran yang ditetapkan.

#### 4.1.4.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.844.000,00 atau 678,44%.

##### 4.1.4.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.844.000,00 atau 678,44%. Tahun 2021 realisasi sebesar Rp53.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.844.000,00 hal ini dikarenakan mitra pemanfaatan dapat merealisasikan tunggakan-tunggakannya.

#### 4.1.4.03.03 Hasil dari Bangun Guna Serah

Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.458.724,00 atau 298,20%.

##### 4.1.4.03.03.0001 Hasil dari Bangun Guna Serah

Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.458.724,00 atau

298,20%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi sebesar Rp80.640.331,00 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp8.818.393,00 hal ini disebabkan karena mitra BGS dapat melaksanakan operasionalnya dengan baik sehingga pendapatan kontribusi BGS dapat ditingkatkan.

#### 4.1.4.05. Jasa Giro

Dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp778.370.400,67 atau 155,67%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp640.331.641,90. Kenaikan yang terjadi sebesar Rp138.038.758,77. Rincian realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	698.520.274,67	174,63	514.816.604,90
4.1.4.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	79.850.126,00	79,85	125.515.037,00
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>778.370.400,67</b>	<b>155,67</b>	<b>640.331.641,90</b>

##### 4.1.4.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah

Anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp698.520.274,67 atau 174,63%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.1.4.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah

Anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp698.520.274,67 atau 174,63%,

##### 4.1.4.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara

Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.850.126,00 atau 79,85%.

##### 4.1.4.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara

Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.850.126,00 atau 79,85%.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan jasa giro pada tahun 2021 sebesar Rp640.331.641,90 telah terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp138.038.758,77, kenaikan penerimaan disebabkan oleh rata-rata saldo harian Kas Daerah tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021.

#### **4.1.4.07. Pendapatan Bunga**

Dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.070.273.823,00 atau 153,51% dengan rincian:

##### **4.1.4.07.01. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**

Anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.070.273.823,00 atau 153,51%.

##### **4.1.4.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**

Anggaran sebesar  
Rp2.000.000.000,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp3.070.273.823,00 atau  
153,51%.

Dengan membandingkan realisasi tahun 2021 yaitu Rp5.059.074.937,00 terjadi penurunan terhadap pendapatan bunga deposito sebesar Rp1.988.801.114,00 yang disebabkan penurunan persentase bunga deposito. Pada tahun 2021 persentase bunga deposito sebesar 4,12% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 3,17%.

#### **4.1.4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Dengan anggaran sebesar Rp989.629.300,00 dan realisasi sebesar Rp231.696.666,11 atau 23,41%, dengan rincian sebagai berikut:

##### **4.1.4.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Anggaran sebesar Rp989.629.300,00 dan realisasi sebesar Rp231.696.666,11 atau 23,41%.

##### **4.1.4.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Anggaran sebesar  
Rp989.629.300,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp231.696.666,11 atau  
23,41%.

Dengan membandingkan realisasi tahun 2021 yaitu Rp378.033.821,08 terjadi penurunan terhadap pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan sebesar Rp146.337.154,97. Hal ini disebabkan karena kontraktor/pihak ketiga dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ tepat waktu. Berikut merupakan rincian kontrak dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:

Tanggal Setor Denda	Rincian Kontrak (OPD)	Nilai Kontrak (Rp)	Besaran Denda (Rp)
20 Jan 2022	CV. Putra Insan Mandiri Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/646.15/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021, Nomor PHO: 620/14.1/PHO/APBD.P/BM/2022: Pembangunan Saluran Jalan Bahagia	197.607.000,00	3.556.926,00
20 Jan 2022	CV. Putra Insan Mandiri Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/665.1.2/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021, Nomor PHO: 620/15/PHO/APBD.P/BM/2022: Pembangunan Saluran Jalan Perkuburan Bedeng Ake	196.767.000,00	2.125.083,00
27 Jan 2022	CV. Putra Insan Mandiri Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/665.1.3/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021, Nomor PHO: 620/41.1/PHO/APBD.P/BM/2022: Pembangunan Saluran Jalan Gg. Bbi Dusun Tutut	197.970.000,00	4.454.325,00
27 Jan 2022	CV. Putra Insan Mandiri Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/664.1.3/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021, Nomor PHO: 620/664.1.3/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021: Pembangunan Saluran Jalan Perkuburan Sinar Baru	196.994.000,00	5.673.427,00
31 Jan 2022	CV.Citra Jaya Mandiri (Dinas Kesehatan), Nomor Kontrak:37/SPPK/DAK/PKM.KNG/2021 tanggal: 12 Juli 2021: Pengembangan Puskesmas Kenanga (DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar TA 2021)	8.813.956.000,00	32.251.066,00
04 Feb 2022	CV Jaya Akbar(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/673.1.2/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021, Nomor PHO: 620/60/PHO/APBD.P/BM/2022: Pembangunan Saluran Jalan Rantau Rt.04 Sinar Jaya Jelutung	196.651.000,00	5.486.562,00
07 Feb 2022	CV Krensa Utama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 640/900.1/SPK-ADD/APBD/CK/2021, Nomor PHO: 640/28.1.1/PHO/APBD/CK/2022: Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kayu Besi Di Kecamatan Puding Besar: Setoran Pertama	192.116.000,00	3.458.100,00
07 Feb 2022	CV Krensa Utama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/665.1.1/SPK-ADD/APBD.P/BM/2021, Nomor PHO: 620/31/PHO/APBD.P/BM/2022: Pembangunan Jalan Gaya Baru Sungailiat	196.700.000,00	3.363.570,00
07 Feb 2022	CV Arthatama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/668.1.3/SPK-ADD/APBD/BM/2021, Nomor PHO: 620/29.1/PHO/APBD/BM/2022: Pembangunan Jalan Desa Jurung (Setoran Pertama)	192.274.000,00	3.114.846,00
10 Mar 2022	CV Arthatama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/668.1.3/SPK-ADD/APBD/BM/2021, Nomor PHO: 620/29.1/PHO/APBD/BM/2022: Pembangunan Jalan Desa Jurung (Setoran Kedua)	-	32.000,00

Tanggal Setor Denda	Rincian Kontrak (OPD)	Nilai Kontrak (Rp)	Besaran Denda (Rp)
13 Apr 2022	CV Krensa Utama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 640/900.1/SPK-ADD/APBD/CK/2021, Nomor PHO: 640/28.1.1/PHO/APBD/CK/2022: Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kayu Besi Di Kecamatan Puding Besar: Setoran Kedua)	-	34.930,18
17 Okt 2022	CV Permata Bunda Sakti (Dinas Kesehatan) Nomor Kontrak:027/001/APBD/SPK/ALBER/RSUD-DB/2022 tanggal: 25 Juni 2022: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	167.998.000,00	3.759.637,00
14 Nov 2022	CV Angin Baru (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 640/319.1.1/SPK/APBD/CK/2022, No.PHO: 640/591.1.3/PHO/APBD/CK/2022: Pembangunan Saluran Permukiman Jalan Naga Kel. Kuday Kec. Sungailiat	184.675.000,00	554.025,00
01 Des 2022	CV Bima Jaya Mandiri (Dinas Kesehatan) Nomor Kontrak:440/024/SP/PKM.BLY/DAK/2022 tanggal: 17 Juni 2022: Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Mampu Poned Belinyu	1.534.209.000,00	5.528.680,00
02 Des 2022	CV Setia Karya Abadi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/293/SPPK/DAK/II/2022, No.PHO: 620/608.2/PHO/DAK/II/2022: Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Air Duren Kemuja (DAK)	7.322.700.000,00	13.194.054,04
12 Des 2022	CV Umah Group (Dinas Kesehatan), Nomor Pesanan:35944160/SP.JL/APBD/PPBJ/RSUD.D B/VI/2022 tanggal:03 Juni 2022:Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Baju Petugas Ruangan	26.091.600,00	1.086.937,00
13 Des 2022	PT Erakomp Infonusa Jakarta (Dinas Kesehatan), Nomor Kontrak: 83/Add.SP/DINKES/DAK FISIK/SI/2022 tanggal 24 Oktober 2022: Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya dan Belanja Modal Personal Computer (DAK FISIK TA 2022)	42.120.000,00	842.400,00
14 Des 2022	PT Kimia Farma Trading dan Distribution (Dinas Kesehatan), Nomor Kontrak: 77/SPK/DINKES/DAK/OBAT/2022 : Pengadaan Obat, Vaksin, Belanja Obat-Obatan-Obat	184.242.600,00	462.006,00
20 Des 2022	CV Pagevi Bersaudara (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/341.9/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/699.1/PHO/APBD/II/2022: Peningkatan Jalan Pon Pasir Desa Penagan	1.937.979.000,00	17.459.270,27
20 Des 2022	CV Hamtar Usaha (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/331.9/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/646.1/PHO/APBD/II/2022: Peningkatan Jalan Gedong Kec. Riau Silip	963.910.800,00	8.683.881,08
26 Des 2022	CV Bangun Cipta Rejeki (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 610/08/SPPK/DAK/IV/2022, No.PHO: 610/743.1.3/PHO/DAK/IV/2022: Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Petaling Kecamatan Mendo Barat (DAK)	2.354.533.000,00	10.606.005,00
29 Des 2022	CV Pilar Utama Karya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/327/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/711.2/PHO/APBD/II/2022: Pendestrian Jalan Ahmad Yani Jalur 2	3.971.333.000,00	21.467.000,00
29 Des 2022	CV Pagevi Bersaudara (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/341.8/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/680.1/PHO/APBD/II/2022: Pemeliharaan Berkala Jalan Air Duren-Tua Tunu (Setoran Pertama)	1.339.272.000,00	17.879.281,20

Tanggal Setor Denda	Rincian Kontrak (OPD)	Nilai Kontrak (Rp)	Besaran Denda (Rp)
29 Des 2022	CV Serumpun Sebalai Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/331.8/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/710.1/PHO/APBD/II/2022: Peningkatan Jalan Labu Air Pandan-Kota Kapur (Setoran Pertama)	2.225.410.000,00	5.941.844,70
29 Des 2022	CV Serumpun Sebalai Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/333.8/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/708.1/PHO/APBD/II/2022: Peningkatan Jalan Tiang Tarah Banyuasin (Setoran Pertama)	2.024.311.000,00	5.404.910,37
29 Des 2022	CV. Pasir Padi Bangka Lestari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/429.1/SPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/705.2/PHO/APBD/II/2022: Pembangunan Jalan Desa Air Buluh Mendo Barat (Setoran Pertama)	179.170.300,00	7.175.771,00
29 Des 2022	CV Arthatama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/376.1/SPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/628/PHO/APBD/II/2022: Pembangunan Jalan Desa Puding Besar (Setoran Pertama)	179.198.000,00	6.379.448,80
29 Des 2022	CV Arthatama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/344.1/SPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/609.2/PHO/APBD/II/2022: Pembangunan Jalan Desa Sempan Kec. Pemali (Setoran Pertama)	179.164.000,00	6.378.238,40
30 Des 2022	CV Arthatama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/376.1/SPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/628/PHO/APBD/II/2022: Pembangunan Jalan Desa Puding Besar (Setoran Kedua)	-	78.137,00
30 Des 2022	CV Pagevi Bersaudara (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/341.8/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/680.1/PHO/APBD/II/2022: Pemeliharaan Berkala Jalan Air Duren-Tua Tunu (Setoran Kedua)	-	218.989,07
	CV Master Abadi Perkasa(Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah), Nomor Kontrak:071/SPK-PPK/09.09/BPPKAD-I/XI/2022 tanggal 16 November 2022: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Belanja Modal Sekat Ruang Bangunan Gedung Kantor/Partisi Ruangan	193.316.000,00	193.316,00
	CV Arthatama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/344.1/SPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/609.2/PHO/APBD/II/2022: Pembangunan Jalan Desa Sempan Kec. Pemali (Setoran Pertama)	179.164.000,00	78.122,00
	CV. Bumi Elang Perkasa (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/296.6/SPPK/DAK/II/2022, No.PHO: 620/673.4/PHO/DAK/II/2022: Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Sungailiat-Bakam (Dak	6.092.275.000,00	32.931.216,00
	CV Angin Baru (Dinas Kesehatan) No. Kontrak:007/SPK-RSUD.BLY/2022 tanggal 09 November 2022: Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	199.589.000,00	1.078.859,00
	CV Serumpun Sebalai Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/331.8/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/710.1/PHO/APBD/II/2022: Peningkatan Jalan Labu Air Pandan-Kota Kapur	-	609.712,00



Tanggal Setor Denda	Rincian Kontrak (OPD)	Nilai Kontrak (Rp)	Besaran Denda (Rp)
	(Setoran Kedua)		
	CV Serumpun Sebalai Sejahtera (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/333.8/SPPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/708.1/PHO/APBD/II/2022: Peningkatan Jalan Tiang Tarah Banyuasin (Setoran Kedua)	-	66.200,00
	CV. Pasir Padi Bangka Lestari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Nomor Kontrak: 620/429.1/SPK/APBD/II/2022, No.PHO: 620/705.2/PHO/APBD/II/2022: Pembangunan Jalan Desa Air Buluh Mendo Barat (Setoran Kedua)	-	87.890,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.861.696.300,00</b>	<b>231.696.666,11</b>

#### 4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Dengan anggaran sebesar Rp321.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp243.343.659,64 atau 75,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.4.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	500.000,00	436.022,00	87,20	7.416.008,43
4.1.4.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.000.000,00	297.777,00	7,44	32.168.725,76
4.1.4.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100.000,00	500.000,00	500,00	228.916,00
4.1.4.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.500.000,00	11.460.095,22	254,67	36.782.159,02
4.1.4.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	500.000,00	0,00	0,00	307.403,40
4.1.4.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000,00	0,00	0,00	160.140,00
4.1.4.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	603.984,42	120,80	644.228,70
4.1.4.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	0,00	0,00	11.460,00
4.1.4.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.000.000,00	1.352.306,00	12,29	41.918.378,44
4.1.4.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	300.000.000,00	228.693.475,00	76,23	316.757.283,00
	<b>Jumlah</b>	<b>321.700.000,00</b>	<b>243.343.659,64</b>	<b>75,64</b>	<b>436.394.702,75</b>

##### 4.1.4.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran sebesar Rp500.000,00 dan realisasi sebesar Rp436.022,00 atau 87,20%.

##### 4.1.4.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran sebesar Rp350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp431.022,00 atau 123,15%.

4.1.4.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	Anggaran sebesar Rp50.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.06.0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	Anggaran sebesar Rp50.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.000,00 atau 10,00%.
4.1.4.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Anggaran sebesar Rp50.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	Anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.777,00 atau 7,44%.
4.1.4.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	Anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.959,00 atau 4,55%.
4.1.4.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp203.068,00 atau 40,61%.
4.1.4.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	Anggaran sebesar

		Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.750,00 atau 0,75%.
4.1.4.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Anggaran sebesar Rp100.000,00 dan realisasi sebesar Rp500.000,00 atau 500,00%.
4.1.4.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Anggaran sebesar Rp40.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000,00 atau 1.250,00%.
4.1.4.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	Anggaran sebesar Rp20.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Anggaran sebesar Rp20.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )	Anggaran sebesar Rp20.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	Anggaran sebesar Rp4.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.460.095,22 atau 254,67%.

4.1.4.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.106.636,22 atau 277,67%.
4.1.4.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp353.459,00 atau 70,69%.
4.1.4.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Anggaran sebesar Rp100.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Anggaran sebesar Rp100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dan realisasi sebesar Rp603.984,42 atau 120,80%.
4.1.4.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp603.984,42 atau 120,80%.

4.1.4.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Anggaran sebesar Rp11.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.352.306,00 atau 12,29%.
4.1.4.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
	Anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.280,00 atau 0,25%.
4.1.4.12.14.0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
4.1.4.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.100,00 atau 11,82%.
4.1.4.12.14.0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp917.726,00 atau 183,55%.
4.1.4.12.14.0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )
	Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp355.200,00 atau 71,04%.

- 4.1.4.12.14.0030 Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
- Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
- 4.1.4.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
- Anggaran sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
- 4.1.4.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp228.693.475,00 atau 76,23%.
- 4.1.4.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2
- Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp228.693.475,00 atau 76,23%.

#### **4.1.4.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Dengan anggaran sebesar Rp17.846.650,00 dan realisasi sebesar Rp19.955.791,00 atau 111,82%, dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1.4.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
- Anggaran sebesar Rp11.711.400,00 dan realisasi sebesar Rp3.645.267,00 atau 31,13%.
- 4.1.4.13.01.0002 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
- Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.000,00 atau 1,24%.
- 4.1.4.13.01.0006 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Anggaran sebesar Rp1.711.400,00 dan realisasi sebesar Rp3.157.000,00 atau

- 184,47%.
- 4.1.4.13.01.00013 Pendapatan Denda Retribusi  
Pengawasan dan Pengendalian  
Menara Telekomunikasi  
Anggaran sebesar Rp0,00 dan  
realisasi sebesar Rp364.267,00  
atau 0,00%.
- 4.1.4.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha  
Anggaran sebesar Rp5.285.250,00 dan realisasi  
sebesar Rp15.460.524,00 atau 292,52%.
- 4.1.4.13.02.0001 Pendapatan Denda Retribusi  
Pemakaian Kekayaan Daerah  
Anggaran sebesar Rp0,00 dan  
realisasi sebesar  
Rp6.989.244,00 atau 0,00%.
- 4.1.4.13.02.0002 Pendapatan Denda Retribusi  
Pasar Grosir dan/atau  
Pertokoan  
Anggaran sebesar  
Rp5.285.250,00 dan realisasi  
sebesar Rp8.471.280,00 atau  
160,28%.
- 4.1.4.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu  
Anggaran sebesar Rp850.000,00 dan realisasi  
sebesar Rp850.000,00 atau 100,00%.
- 4.1.4.13.03.0003 Pendapatan Denda Retribusi  
Izin Trayek untuk  
Menyediakan Pelayanan  
Angkutan Umum  
Anggaran sebesar  
Rp850.000,00 dan realisasi  
sebesar Rp850.000,00 atau  
100,00%.

#### **4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian**

Dengan anggaran sebesar Rp108.691.800,00 dan realisasi sebesar Rp1.515.877.991,65 atau 1.394,66%, dengan rincian berikut:

- 4.1.4.15.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21  
Anggaran sebesar Rp15.002.300,00 dan realisasi

sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.4.15.01.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Anggaran sebesar Rp15.002.300,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.4.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Anggaran sebesar Rp73.949.000,00 dan realisasi sebesar Rp103.932.558,00 atau 140,55%.

4.1.4.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Anggaran sebesar Rp73.949.000,00 dan realisasi sebesar Rp103.932.558,00 atau 140,55%.

4.1.4.15.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

Anggaran sebesar Rp19.740.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.411.945.433,65 atau 7.152,53%.

4.1.4.15.05.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK

Anggaran sebesar Rp19.740.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.411.945.433,65 atau 7.152,53%. Akun Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mencatat transaksi pendapatan yang rekeningnya tidak terakomodir berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian belanja atas Temuan BPK	1.381.500.302,37
2.	Pengembalian belanja atas Temuan Inspektorat	4.525.001,00
3.	Pengembalian belanja tahun sebelumnya	25.920.130,28
	<b>Total</b>	<b>1.411.945.433,65</b>



#### 4.1.4.16. Pendapatan BLUD

Dengan anggaran sebesar Rp66.531.450.200,00 dan realisasi sebesar Rp98.752.800.495,00 atau 148,43%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD

Dianggarkan sebesar Rp66.531.450.200,00 dengan realisasi sebesar Rp98.752.800.495,00 atau 148,43%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.1.4.16.01.0001 Pendapatan BLUD

Dianggarkan sebesar Rp66.531.450.200,00 dengan realisasi sebesar Rp98.752.800.495,00 atau 148,43%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Puskesmas/Rumah Sakit	Realisasi Pendapatan (Rp)
1.	Puskesmas Kenanga	905.557.673,00
2.	Puskesmas Belinyu	1.646.559.564,00
3.	Puskesmas Gunung Muda	408.533.494,00
4.	Puskesmas Sungailiat	1.521.460.168,00
5.	Puskesmas Baturusa	729.817.195,00
6.	Puskesmas Pemali	892.688.681,00
7.	Puskesmas Bakam	961.178.275,00
8.	Puskesmas Riau Silip	1.168.562.872,00
9.	Puskesmas Puding Besar	825.432.535,00
10.	Puskesmas Petaling	1.214.791.178,00
11.	Puskesmas Sinar Baru	479.198.526,00
12.	Puskesmas Penagan	483.030.225,00
13.	RSUD DR. Eko Maulana Ali	2.117.319.333,00
14.	RSUD Depati Bahrin	84.889.816.393,00
15.	RSUD Sjafrie Rachman	508.854.383,00
<b>Total</b>		<b>98.752.800.495,00</b>

## 4.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.138.963.401.821,00 dengan realisasi Rp1.125.826.111.016,00 atau 98,85% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.008.254.465.600,00	1.040.734.366.256,00	103,22	927.893.277.077,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.708.936.221,00	85.091.744.760,00	65,10	58.461.904.011,07
	<b>Jumlah</b>	<b>1.138.963.401.821,00</b>	<b>1.125.826.111.016,00</b>	<b>98,85</b>	<b>986.355.181.088,07</b>

### 4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.008.254.465.600,00 dengan realisasi Rp1.040.734.366.256,00 atau 103,22% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.2.1.01 Dana Perimbangan

Dengan anggaran sebesar Rp937.879.383.600,00 dan realisasi

sebesar Rp970.359.284.256,00 atau 103,46%. Rincian dana bagi hasil sebagai berikut:

#### 4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran sebesar Rp206.056.234.000,00 dengan realisasi Rp261.440.131.473,00 atau 126,88%.

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.2.1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	55.467.844.000,00	49.374.372.424,00	89,01	50.786.837.707,00
4.2.1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.497.288.000,00	6.963.192.758,00	107,17	7.386.280.800,00
4.2.1.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	342.815.000,00	750.654.318,00	218,97	470.527.200,00
4.2.1.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	535,00
4.2.1.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	624.513.000,00	1.102.700.018,00	176,57	677.741.844,00
4.2.1.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	624.513.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.266.233.000,00	4.601.945.639,00	107,87	3.006.135.900,00
4.2.1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	136.238.155.000,00	196.652.393.316,00	144,34	80.973.655.414,00
4.2.1.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	36.562.000,00	36.562.000,00	100,00	47.046.130,00
4.2.1.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>206.056.234.000,00</b>	<b>261.440.131.473,00</b>	<b>126,88</b>	<b>144.705.844.680,00</b>

#### 4.2.1.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran sebesar Rp488.311.618.000,00 dengan realisasi Rp488.311.585.830,00 atau 99,99%, dengan rincian sebagai berikut :

##### 4.2.1.01.02.0001 DAU

Anggaran sebesar Rp488.311.618.000,00 dengan realisasi Rp488.311.585.830,00 atau 99,99%.

#### 4.2.1.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran sebesar Rp116.263.655.000,00 dengan realisasi Rp110.782.375.074,00 atau 95,29%. Rincian realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.2.1.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	689.984.000,00	686.713.733,00	99,53	276.615.172,00
4.2.1.01.03.0002	DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.298.670.000,00	3.278.263.049,00	99,38	3.171.389.578,00
4.2.1.01.03.0003	DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.462.301.000,00	2.328.997.079,00	94,59	6.971.968.388,00
4.2.1.01.03.0011	DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	295.476.000,00	282.888.192,00	95,74	2.239.850.000,00
4.2.1.01.03.0013	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	20.028.784.238,00
4.2.1.01.03.0014	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	27.786.700.065,00
4.2.1.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.425.740.000,00	1.865.521.143,00	76,91	2.456.171.296,00
4.2.1.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	6.483.632.000,00	6.424.231.905,00	99,08	0,00
4.2.1.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	110.278.000,00	87.271.000,00	79,14	0,00
4.2.1.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.640.921.000,00	1.491.212.000,00	90,88	0,00
4.2.1.01.03.0025	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.019.554.000,00	958.615.700,00	94,02	1.542.534.000,00
4.2.1.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.258.321.000,00	1.258.321.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01.03.0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	0,00	0,00	0,00	771.750.000,00
4.2.1.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	13.793.892.000,00	13.456.761.974,00	97,56	0,00
4.2.1.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.801.613.000,00	2.323.883.700,00	82,95	2.408.887.000,00
4.2.1.01.03.0032	DAK Fisik-Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.600.000.000,00	1.458.102.600,00	91,13	467.934.000,00
4.2.1.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.858.500.000,00	3.131.891.000,00	64,46	0,00
4.2.1.01.03.0034	DAK Fisik-Jalan-	29.243.121.000,00	28.887.146.750,00	98,78	9.536.239.868,00

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Reguler-Jalan				
4.2.1.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	17.494.342.000,00	17.246.597.300,00	98,58	0,00
4.2.1.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.066.767.000,00	8.843.280.727,00	97,54	0,00
4.2.1.01.03.0039	DAK Fisik-Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	12.329.143.312,00
4.2.1.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	600.000.000,00	599.100.000,00	99,85	0,00
4.2.1.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.333.329.000,00
4.2.1.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.670.213.000,00	2.487.386.000,00	93,15	5.268.108.690,00
4.2.1.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.153.303.000,00	2.097.482.080,00	97,41	6.695.034.500,00
4.2.1.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	12.297.027.000,00	11.588.708.142,00	94,24	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>116.263.655.000,00</b>	<b>110.782.375.074,00</b>	<b>95,29</b>	<b>104.284.439.107,00</b>

#### 4.2.1.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

##### (DAK) Non Fisik

Anggaran sebesar Rp127.247.876.600,00 dengan realisasi Rp109.825.191.879,00 atau 86,31%. Rincian realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.2.1.01.04.0001	DAK Non Fisik- BOS Reguler	49.814.048.600,00	39.512.987.468,00	79,32	0,00
4.2.1.01.04.0004	DAK Non Fisik- TPG PNSD	50.942.362.000,00	47.134.028.330,00	92,52	54.708.910.000,00
4.2.1.01.04.0005	DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD	1.419.000.000,00	1.191.437.000,00	83,96	969.238.000,00
4.2.1.01.04.0007	DAK Non Fisik- BOP PAUD	3.578.400.000,00	3.501.527.000,00	97,85	4.726.800.000,00
4.2.1.01.04.0008	DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan	636.800.000,00	636.800.000,00	100,00	1.324.000.000,00
4.2.1.01.04.0011	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	1.921.515.000,00	10.399.531.186,00	541,22	11.212.366.648,00
4.2.1.01.04.0012	DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.495.157.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	276.969.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.04.0015	DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	2.402.237.770,00
4.2.1.01.04.0016	DAK Non Fisik- PK2UKM	2.596.548.000,00	2.575.978.300,00	99,21	693.526.700,00
4.2.1.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.112.927.972,00
4.2.1.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	874.164.000,00	730.624.500,00	83,58	798.894.200,00
4.2.1.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	421.832.000,00	340.911.760,00	80,82	0,00
4.2.1.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.155.605.000,00	3.092.766.335,00	98,01	0,00
4.2.1.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00	0,00

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Perempuan dan Anak				
4.2.1.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	106.800.000,00	106.800.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>127.247.876.600,00</b>	<b>109.825.191.879,00</b>	<b>86,31</b>	<b>77.948.901.290,00</b>

Pada tahun anggaran 2022, Pendapatan BOS APBN, dianggarkan pada kelompok Pendapatan Transfer- Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 Pendapatan BOS APBN, dianggarkan pada kelompok Pendapatan Hibah-Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Adapun rincian penerimaan Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler Triwulan I	12.130.350.000,00
2.	Pendapatan Pengembalian Belanja atas Temuan Inspektorat TA 2021	7.725.000,00
3.	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler Triwulan II	6.837.826.829,00
4.	Pendapatan Pengembalian Belanja atas Temuan BPK TA 2021	401.923.600,00
5.	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler Triwulan III	8.004.812.039,00
6.	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler Triwulan IV	12.130.350.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.512.987.468,00</b>

Adapun atas hasil temuan pengembalian belanja BOS APBN yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK RI, telah dilakukan pengembalian ke Kas BOS APBN masing-masing sekolah dan atas pengembalian belanja tersebut menambah SILPA BOS APBN TA 2022.

#### 4.2.1.02 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran sebesar Rp14.987.147.000,00 dengan realisasi Rp14.987.147.000,00 atau 100,00% dengan rincian:

##### 4.2.1.02.01 DID

Anggaran sebesar Rp14.987.147.000,00 dengan realisasi Rp14.987.147.000,00 atau 100,00%.

#### 4.2.1.02.01.0001 DID

Anggaran sebesar Rp14.987.147.000,00 dengan realisasi Rp14.987.147.000,00 atau 100,00% merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

#### 4.2.1.05 Dana Desa

Anggaran sebesar Rp55.387.935.000,00 dengan realisasi Rp55.387.935.000,00 atau 100,00% dengan rincian:

##### 4.2.1.05.01 Dana Desa

Anggaran sebesar Rp55.387.935.000,00 dengan realisasi Rp55.387.935.000,00 atau 100,00%.

##### 4.2.1.05.01.0001 Dana Desa

Anggaran sebesar Rp55.387.935.000,00 dengan realisasi Rp55.387.935.000,00 atau 100,00% merupakan dana desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka (*Lampiran Tambahan VI*).

#### 4.2.4 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar Daerah dianggarkan sebesar Rp130.708.936.221,00 dengan realisasi Rp85.091.744.760 00 atau 65,10%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp58.461.904.011,07 terjadi kenaikan sebesar Rp26.629.840.748,93. Hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan pajak bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Rincian realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

##### 4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran sebesar Rp123.591.969.555,00 dengan realisasi Rp78.522.778.094,00 atau 63,53%. Dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.2.4.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB-BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta bagi hasil pajak rokok. Pada

tahun 2022 penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar Rp Rp123.591.969.555,00 dengan realisasi Rp78.522.778.094,00 atau 63,53% yang merupakan pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2022 dan kurang bayar pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2021.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	65.737.665.055,00	14.929.656.758,00	22,71	12.766.913.540,71
4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.806.682.500,00	12.408.438.823,00	258,15	4.806.682.583,78
4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.166.448.000,00	34.607.560.666,00	93,12	21.416.028.978,68
4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.151.230.600,00	1.132.895.999,00	98,41	1.116.437.214,90
4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.729.943.400,00	15.444.225.848,00	104,85	13.842.041.693,00
	<b>Jumlah</b>	<b>123.591.969.555,00</b>	<b>78.522.778.094,00</b>	<b>63,53</b>	<b>53.948.104.011,07</b>

#### 4.2.2.02

#### Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp7.116.966.666,00 dengan realisasi Rp6.568.966.666,00 atau 92,30%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.513.800.000,00 terjadi kenaikan yang sebesar Rp2.055.166.666,00. Hal ini sesuai dengan kemampuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

##### 4.2.2.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

Anggaran sebesar Rp7.116.966.666,00 dengan realisasi Rp6.568.966.666,00 atau 92,30%, dengan rincian:

##### 4.2.2.02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari

Pemerintah Daerah Provinsi

Anggaran sebesar Rp7.116.966.666,00 dengan realisasi Rp6.568.966.666,00 atau 92,30%.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
DABA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.098.966.666,00
DABA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	390.000.000,00
DABA Sekretariat Daerah	1.080.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.568.966.666,00</b>

### 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp13.407.702.200,00 dengan realisasi Rp13.238.387.210,56 atau 98,74% dengan rincian sebagai berikut :

#### 4.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran sebesar Rp13.212.306.000,00 dengan realisasi Rp13.042.991.000,00 atau 98,72% dengan rincian:

##### 4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Anggaran sebesar Rp13.212.306.000,00 dengan realisasi Rp13.042.991.000,00 atau 98,72%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Anggaran sebesar Rp13.212.306.000,00 dengan realisasi Rp13.042.991.000,00 atau 98,72%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.3.1.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Anggaran sebesar Rp13.212.306.000,00 dengan realisasi Rp13.042.991.000,00 atau 98,72%, merupakan pendapatan hibah pada OPD Dinas Kesehatan pada sub unit RSUD Depati Bahrin berupa uang yang digunakan untuk pembelian alat kesehatan yang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan RSUD Depahti Bahrin tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya dalam bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional kepada RSUD Depati Bahrin.

#### 4.3.3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran sebesar Rp195.396.200,00 dengan realisasi Rp195.396.210,56 atau 100,00%, dengan rincian:



#### 4.3.3.01 Lain-Lain Pendapatan

Anggaran sebesar Rp195.396.200,00 dengan realisasi Rp195.396.210,56 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.3.3.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah

Anggaran sebesar Rp195.396.200,00 dengan realisasi Rp195.396.210,56 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

4.3.3.01.02.0005 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  
Anggaran sebesar Rp195.396.200,00 dengan realisasi Rp195.396.210,56 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Setoran atas sisa Dana Hibah Tahun 2021 DPDKNPI Kab Bangka	930.060,00
2.	Setoran Pengembalian Sisa/Saldo BOS APBD SMP Maria Goretti Tahun Anggaran 2021	166,83
3.	Setoran Pengembalian Saldo BOS APBD II Tahun Anggaran 2021 ke Kas Daerah	0,66
4.	Setoran Pengembalian Sisa Dana BOS APBD Tahun 2021	49.005,07
5.	Setoran Saldo Kas Koni Tahun 2021	154.881.878,00
6.	Pengembalian Sisa Penggunaan Dana Hibah	29.810.500,00
7.	Setoran Pengembalian Sisa Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 Kwartir Cab Bangka	9.724.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>195.396.210,56</b>

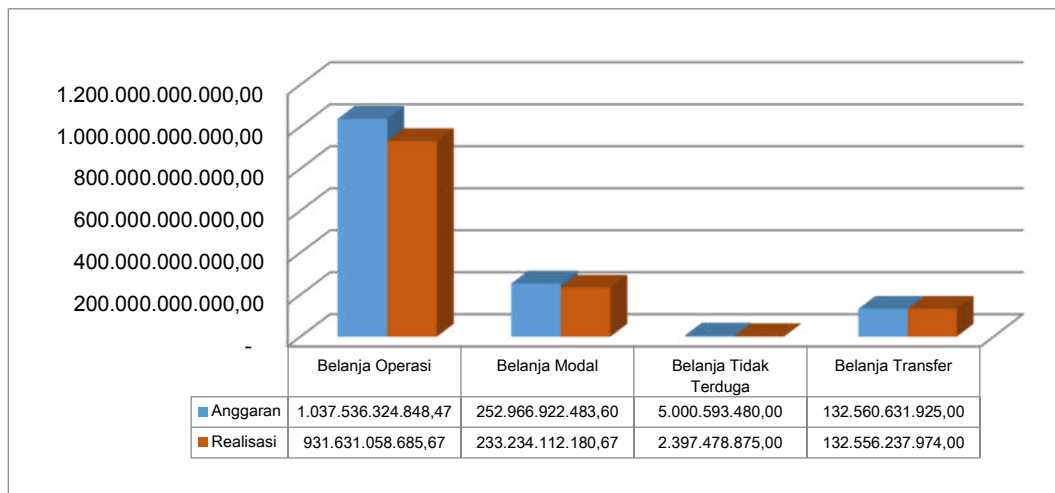
## 5. BELANJA DAERAH

Belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.428.064.472.737,07 dengan realisasi sebesar Rp1.299.818.887.715,34 atau 91,02%. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp1.172.454.542.649,56, mengalami kenaikan sebesar Rp127.364.345.065,78 atau 10,86%.

**Tabel V.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.037.536.324.848,47	931.631.058.685,67	89,79	850.814.426.981,30
2.	Belanja Modal	252.966.922.483,60	233.234.112.180,67	92,20	185.983.416.546,26
3.	Belanja Tidak Terduga	5.000.593.480,00	2.397.478.875,00	47,94	7.118.700.952,00
4.	Belanja Transfer	132.560.631.925,00	132.556.237.974,00	99,99	128.537.998.170,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.428.064.472.737,07</b>	<b>1.299.818.887.715,34</b>	<b>91,02</b>	<b>1.172.454.542.649,56</b>

**Gambar V.2 Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022**



## 5.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi untuk tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.037.536.324.848,47 dengan realisasi sebesar Rp931.631.058.685,67 atau 89,79% sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp850.814.426.981,30, dengan rincian:

### 5.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp501.382.213.669,68 dengan realisasi Rp437.149.234.967,00 atau 87,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp439.937.485.498,60 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.788.250.531,60. Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	310.941.552.917,68	261.102.050.941,00	83,97	259.294.133.648,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	104.223.979.362,00	95.854.177.273,00	91,97	87.881.875.779,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.091.591.593,00	54.035.015.513,00	91,44	59.266.954.431,00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.716.659.940,00	22.977.509.582,00	96,88	21.227.952.126,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	802.555.902,00	703.810.088,00	87,70	658.201.029,60
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	814.815.700,00	814.810.000,00	99,99	744.500.000,00
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	1.791.058.255,00	1.661.861.570,00	92,79	10.863.868.485,00
	<b>Jumlah</b>	<b>501.382.213.669,68</b>	<b>437.149.234.967,00</b>	<b>87,19</b>	<b>439.937.485.498,60</b>

#### 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran sebesar Rp310.941.552.917,68 dengan realisasi sebesar Rp261.102.050.941,00 atau 83,97%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	213.052.030.801,00	191.089.081.280,00	89,69	195.454.499.444,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.951.082.000,00	17.543.693.485,00	76,44	17.940.751.766,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan	8.648.500.000,00	7.195.240.612,00	83,20	7.314.050.020,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Jabatan ASN				
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.128.602.000,00	11.307.736.800,00	66,02	11.218.601.285,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.435.200.000,00	2.781.103.100,00	62,71	2.977.667.437,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.928.203.600,00	11.446.837.685,00	76,68	10.218.389.580,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.844.800.000,00	1.173.570.683,00	41,25	1.382.788.152,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	135.024.986,68	2.858.544,00	2,12	2.762.951,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.914.347.030,00	16.992.401.943,00	77,54	11.182.431.174,00
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.378.527.500,00	392.381.624,00	28,46	400.546.794,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.506.210.000,00	1.177.145.185,00	46,97	1.201.645.045,00
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.019.025.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>310.941.552.917,68</b>	<b>261.102.050.941,00</b>	<b>83,97</b>	<b>259.294.133.648,00</b>

#### 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

Anggaran sebesar Rp213.052.030.801,00 dengan realisasi Rp191.089.081.280,00 atau 89,69%.

##### 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS

Anggaran sebesar Rp207.034.197.001,00 dengan realisasi Rp188.024.832.980,00 atau 90,82%.

##### 5.1.1.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK

Anggaran sebesar Rp6.017.833.800,00 dengan realisasi Rp3.064.248.300,00 atau 50,92%.

#### 5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Anggaran sebesar Rp22.951.082.000,00 dengan realisasi Rp17.543.693.485,00 atau 76,44%.

##### 5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Anggaran sebesar Rp21.491.293.292,00 dengan realisasi sebesar Rp17.305.492.307,00 atau 80,52%.

##### 5.1.1.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK

		Anggaran sebesar Rp1.459.788.708,00 dengan realisasi sebesar Rp238.201.178,00 atau 16,32%.
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	
		Anggaran sebesar Rp8.648.500.000,00 dengan realisasi Rp7.195.240.612,00 atau 83,20%.
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	
		Anggaran sebesar Rp8.648.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.195.240.612,00 atau 83,20%.
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	
		Anggaran sebesar Rp17.128.602.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.307.736.800,00 atau 66,02%.
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	
		Anggaran sebesar Rp16.140.782.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.947.865.800,00 atau 67,83%.
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	
		Anggaran sebesar Rp987.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp359.871.000,00 atau 36,43%.
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	
		Anggaran sebesar Rp4.435.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.781.103.100,00 atau 62,71%.
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	
		Anggaran sebesar

		Rp4.435.200.000,00	dengan
		realisasi	sebesar
		Rp2.781.103.100,00	atau
		62,71%.	
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
	Anggaran sebesar	Rp14.928.203.600,00	dan
	realisasi sebesar	Rp11.446.837.685,00	atau
		76,68%.	
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		
	Anggaran	sebesar	
	Rp14.242.943.120,00	dengan	
	realisasi	sebesar	
	Rp11.255.794.195,00	atau	
		79,03%.	
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		
	Anggaran	sebesar	
	Rp685.260.480,00	dengan	
	realisasi	sebesar	
	Rp191.043.490,00	atau	
		27,88%.	
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
	Anggaran sebesar	Rp2.844.800.000,00	dan
	realisasi sebesar	Rp1.173.570.683,00	atau
		41,25%.	
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	Anggaran	sebesar	
	Rp2.844.800.000,00	dengan	
	realisasi	sebesar	
	Rp1.173.570.683,00	atau	
		41,25%.	
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
	Anggaran sebesar	Rp135.024.986,68	dan realisasi
	sebesar	Rp2.858.544,00	atau 2,12%.
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		
	Anggaran	sebesar	
	Rp134.369.238,68	dengan	
	realisasi	sebesar	
	Rp2.825.302,00	atau	2,10%.
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji		

PPPK

Anggaran sebesar  
Rp655.748,00 dengan realisasi  
sebesar Rp33.242,00 atau  
5,07%.

5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Anggaran sebesar Rp21.914.347.030,00 dan  
realisasi sebesar Rp16.992.401.943,00 atau  
77,54%.

5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan  
Kesehatan PNS

Anggaran sebesar  
Rp21.322.436.482,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp16.807.954.877,00 atau  
78,83%.

5.1.1.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan  
Kesehatan PPPK

Anggaran sebesar  
Rp591.910.548,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp184.447.066,00 atau  
31,16%.

5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Anggaran sebesar Rp1.378.527.500,00 dan  
realisasi sebesar Rp392.381.624,00 atau 28,46%.

5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan  
Kecelakaan Kerja PNS

Anggaran sebesar  
Rp1.345.245.972,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp385.875.280,00 atau  
28,68%.

5.1.1.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan  
Kecelakaan Kerja PPPK

Anggaran sebesar  
Rp33.281.528,00 dengan  
realisasi sebesar  
Rp6.506.344,00 atau 19,55%.

5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN  
 Anggaran sebesar Rp2.506.210.000,00 dan  
 realisasi sebesar Rp1.177.145.185,00 atau  
 46,97%.

5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan  
 Kematian PNS  
 Anggaran sebesar  
 Rp2.373.937.986,00 dengan  
 realisasi sebesar  
 Rp1.157.627.024,00 atau  
 48,76%.

5.1.1.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan  
 Kematian PPPK  
 Anggaran sebesar  
 Rp132.272.014,00 dengan  
 realisasi sebesar  
 Rp19.518.161,00 atau 14,76%.

5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan  
 Perumahan Rakyat ASN  
 Anggaran sebesar Rp1.019.025.000,00 dan  
 realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.1.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan  
 Peserta Tabungan Perumahan  
 Rakyat PNS  
 Anggaran sebesar  
 Rp1.019.025.000,00 dengan  
 realisasi sebesar Rp0,00 atau  
 0,00%.

#### 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Anggaran sebesar Rp104.223.979.362,00 dengan realisasi  
 Rp95.854.177.273,00 atau 91,97%. dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.734.075.600,00	8.421.098.750,00	86,51	1.436.325.000,00
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.650.000.000,00	1.189.750.000,00	72,11	942.400.000,00
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	120.000.000,00	119.080.000,00	99,23	126.425.000,00
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.850.000.000,00	7.594.900.000,00	96,75	7.571.685.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	84.869.903.762,00	78.529.348.523,00	92,53	77.805.040.779,00
	<b>Jumlah</b>	<b>104.223.979.362,00</b>	<b>95.854.177.273,00</b>	<b>91,97</b>	<b>87.881.875.779,00</b>

5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Anggaran sebesar Rp9.734.075.600,00 dan realisasi sebesar Rp8.421.098.750,00 atau 86,51%.
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Anggaran sebesar Rp9.734.075.600,00 dengan realisasi sebesar Rp8.421.098.750,00 atau 86,51%.
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	Anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.189.750.000,00 atau 72,11%.
5.1.1.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	Anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.189.750.000,00 atau 72,11%.
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.080.000,00 atau 99,23%.
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp119.080.000,00 atau 99,23%.
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Anggaran sebesar Rp7.850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.594.900.000,00 atau 96,75%.
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	



		Anggaran sebesar Rp7.850.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.594.900.000,00 atau 96,75%.
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
		Anggaran sebesar Rp84.869.903.762,00 dan realisasi sebesar Rp78.529.348.523,00 atau 92,53%.
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	
		Anggaran sebesar Rp83.973.703.762,00 dengan realisasi sebesar Rp78.042.607.503,00 atau 92,94%.
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	
		Anggaran sebesar Rp896.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp486.741.020,00 atau 54,31%.
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
		Anggaran sebesar Rp59.091.591.593,00 dengan realisasi sebesar Rp54.035.015.513,00, atau 91,44% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
		Anggaran sebesar Rp2.405.570.750,00 dengan realisasi Rp2.116.719.750,00 atau 87,99% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Hotel	
		Anggaran sebesar Rp63.650.000,00 dengan realisasi Rp7.837.500,00 atau 12,31%.
5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Restoran	
		Anggaran sebesar Rp135.660.000,00 dengan realisasi Rp135.660.000,00 atau 100,00%.

- 5.1.1.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Hiburan  
Anggaran sebesar Rp9.454.800,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
- 5.1.1.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Reklame.  
Anggaran sebesar Rp49.780.000,00 dengan realisasi Rp36.480.000,00 atau 73,28%.
- 5.1.1.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Penerangan Jalan  
Anggaran sebesar Rp1.231.321.600,00 dengan realisasi Rp1.231.321.600,00 atau 100,00%.
- 5.1.1.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Parkir  
Anggaran sebesar Rp1.900.000,00 dengan realisasi Rp1.425.000,00 atau 75,00%.
- 5.1.1.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Air Tanah  
Anggaran sebesar Rp7.600.000,00 dengan realisasi Rp7.600.000,00 atau 100,00%.
- 5.1.1.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Sarang Burung Walet  
Anggaran sebesar Rp1.140.000,00 dengan realisasi Rp855.000,00 atau 75,00%.
- 5.1.1.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Anggaran sebesar Rp251.951.400,00 dengan realisasi Rp208.634.250,00 atau 82,81%.
- 5.1.1.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas

	Pemungutan-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
	Anggaran sebesar Rp205.556.550,00 dengan realisasi Rp158.100.000,00 atau 76,91%.
5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
	Anggaran sebesar Rp447.556.400,00 dengan realisasi Rp328.806.400,00 atau 73,47%.
5.1.1.03.02	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
	Anggaran sebesar Rp323.335.873,00 dengan realisasi Rp287.949.813,00 atau 89,06% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
	Anggaran sebesar Rp14.000.000,00 dengan realisasi Rp14.000.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
	Anggaran sebesar Rp21.000.000,00 dengan realisasi Rp21.000.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
	Anggaran sebesar Rp48.300.000,00 dengan realisasi Rp36.225.000,00 atau 75,00%.
5.1.1.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
	Anggaran sebesar Rp10.500.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.1.03.02.0008	<p>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta</p> <p>Anggaran sebesar Rp1.159.200,00 dengan realisasi Rp1.159.200,00 atau 100,00%.</p>
5.1.1.03.02.0009	<p>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Anggaran sebesar Rp662.760,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.</p>
5.1.1.03.02.0011	<p>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Anggaran sebesar Rp5.040.000,00 dengan realisasi Rp5.040.000,00 atau 100,00%.</p>
5.1.1.03.02.0013	<p>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>Anggaran sebesar Rp12.600.000,00 dengan realisasi Rp12.600.000,00 atau 100,00%.</p>
5.1.1.03.02.0014	<p>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Anggaran sebesar Rp20.037.500,00 dengan realisasi Rp14.810.000,00 atau 73,91%.</p>
5.1.1.03.02.0015	<p>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <p>Anggaran sebesar Rp58.118.172,00 dengan realisasi Rp58.118.172,00 atau 100,00%.</p>

5.1.1.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Anggaran sebesar Rp210.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	Anggaran sebesar Rp72.064.041,00 dengan realisasi Rp72.064.041,00 atau 100,00%.
5.1.1.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Anggaran sebesar Rp1.780.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Anggaran sebesar Rp17.540.000,00 dengan realisasi Rp17.540.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Anggaran sebesar Rp3.570.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran sebesar Rp31.500.000,00 dengan realisasi Rp31.500.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Anggaran sebesar Rp1.260.000,00 dengan

		realisasi Rp945.000,00 atau 75,00%.
5.1.1.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Anggaran sebesar Rp63.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Anggaran sebesar Rp3.931.200,00 dengan realisasi Rp2.948.400,00 atau 75,00%.
5.1.1.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
	Anggaran sebesar Rp53.930.154.970,00 dengan realisasi Rp49.601.135.950,00 atau 91,97% dengan rincian sebagai berikut:	
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	Anggaran sebesar Rp53.930.154.970,00 dengan realisasi Rp49.601.135.950,00 atau 91,97%.
5.1.1.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
	Anggaran sebesar Rp1.419.000.000,00 dengan realisasi Rp1.177.600.000,00 atau 82,99% dengan rincian sebagai berikut:	
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	Anggaran sebesar Rp1.419.000.000,00 dengan realisasi Rp1.177.600.000,00 atau 82,99%.
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	
	Anggaran sebesar Rp893.530.000,00 dengan realisasi Rp761.610.000,00 atau 85,24% dengan rincian sebagai berikut:	
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	

Anggaran sebesar  
Rp781.030.000,00 dengan  
realisasi Rp649.110.000,00  
atau 83,11%.

5.1.1.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat  
Unit Kerja Pengadaan Barang  
dan Jasa (UKPBJ)

Anggaran sebesar  
Rp112.500.000,00 dengan  
realisasi Rp112.500.000,00  
atau 100,00%.

5.1.1.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dengan  
realisasi Rp90.000.000,00 atau 75,00% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.1.1.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan  
BMD yang Menghasilkan  
Pendapatan

Anggaran sebesar  
Rp120.000.000,00 dengan  
realisasi Rp90.000.000,00 atau  
75,00%.

5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Anggaran sebesar Rp23.716.659.940,00 dengan realisasi  
Rp22.977.509.582,00 atau 96,88%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	922.890.500,00	782.040.000,00	84,74	775.740.000,00
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	104.316.500,00	95,28	101.790.500,00
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.000.000,00	117.525.000,00	93,27	116.250.000,00
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	100,00	66.874.500,00
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00	1.124.823.000,00
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	112.908.600,00	103.171.500,00	91,38	94.634.775,00
5.1.1.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	221.067.000,00	17.539.200,00	7,93	24.984.226,00
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	100,00	4.399.500.000,00
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.071.000.000,00	97,14	1.081.500.000,00
5.1.1.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	97.500.000,00	85.683.990,00	87,88	84.995.393,00
5.1.1.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	128.240,00	19.200,00	14,97	19.150,00
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.990.290.000,00	6.870.024.192,00	98,28	6.507.090.582,00
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.404.000.000,00	8.215.200.000,00	97,75	6.849.750.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.716.659.940,00</b>	<b>22.977.509.582,00</b>	<b>96,88</b>	<b>21.227.952.126,00</b>

5.1.1.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD

Anggaran sebesar Rp922.890.500,00 dengan realisasi Rp782.040.000,00 atau 84,74% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD

Anggaran sebesar Rp922.890.500,00 dengan realisasi Rp782.040.000,00 atau 84,74%.

5.1.1.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Anggaran sebesar Rp109.485.600,00 dengan realisasi Rp104.316.500,00 atau 95,28% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Anggaran sebesar Rp109.485.600,00 dengan realisasi Rp104.316.500,00 atau 95,28%.

5.1.1.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD

Anggaran sebesar Rp126.000.000,00 dengan realisasi Rp117.525.000,00 atau 93,27% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD

Anggaran sebesar Rp126.000.000,00 dengan realisasi Rp117.525.000,00 atau 93,27%.

5.1.1.04.04 Belanja Uang Paket DPRD

Anggaran sebesar Rp67.032.000,00 dengan realisasi Rp67.032.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD

Anggaran sebesar Rp67.032.000,00 dengan



realisasi Rp67.032.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Anggaran sebesar Rp1.133.958.000,00 dengan realisasi Rp1.133.958.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Anggaran sebesar Rp1.133.958.000,00 dengan realisasi Rp1.133.958.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Anggaran sebesar Rp112.908.600,00 dengan realisasi Rp103.171.500,00 atau 91,38% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Anggaran sebesar Rp112.908.600,00 dengan realisasi Rp103.171.500,00 atau 91,38%.

5.1.1.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Anggaran sebesar Rp221.067.000,00 dengan realisasi Rp17.539.200,00 atau 7,93% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Anggaran sebesar Rp221.067.000,00 dengan realisasi Rp17.539.200,00 atau 7,93%.

5.1.1.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Anggaran sebesar Rp4.410.000.000,00 dengan realisasi Rp4.410.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan

dan Anggota DPRD

Anggaran sebesar  
Rp4.410.000.000,00 dengan  
realisasi Rp4.410.000.000,00  
atau 100,00%.

5.1.1.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD

Anggaran sebesar Rp1.102.500.000,00 dengan  
realisasi Rp1.071.000.000,00 atau 97,14% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses  
DPRD

Anggaran sebesar  
Rp1.102.500.000,00 dengan  
realisasi Rp1.071.000.000,00  
atau 97,14%.

5.1.1.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan  
Anggota DPRD

Anggaran sebesar Rp97.500.000,00 dengan  
realisasi Rp85.683.990,00 atau 87,88% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh  
kepada Pimpinan dan Anggota  
DPRD

Anggaran sebesar  
Rp97.500.000,00 dengan  
realisasi Rp85.683.990,00 atau  
87,88%.

5.1.1.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD

Anggaran sebesar Rp128.240,00 dengan realisasi  
Rp19.200,00 atau 14,97% dengan rincian sebagai  
berikut:

5.1.1.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji  
DPRD

Anggaran sebesar  
Rp128.240,00 dengan realisasi  
Rp19.200,00 atau 14,97%.

5.1.1.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan  
Anggota DPRD

Anggaran sebesar Rp6.990.290.000,00 dengan  
realisasi Rp6.870.024.192,00 atau 98,28% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	Anggaran sebesar Rp82.000.000,00 dengan realisasi Rp69.189.120,00 atau 84,38%.
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	Anggaran sebesar Rp7.290.000,00 dengan realisasi Rp1.608.768,00 atau 22,07%.
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	Anggaran sebesar Rp33.000.000,00 dengan realisasi Rp4.826.304,00 atau 14,63%.
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	Anggaran sebesar Rp6.868.000.000,00 dengan realisasi Rp6.794.400.000,00 atau 98,93%.
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Anggaran sebesar Rp8.404.000.000,00 dengan realisasi Rp8.215.200.000,00 atau 97,75% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Anggaran sebesar Rp8.404.000.000,00 dengan realisasi Rp8.215.200.000,00 atau 97,75%.
5.1.1.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Anggaran sebesar Rp18.900.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	

Anggaran sebesar  
Rp18.900.000,00 dengan  
realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

#### 5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp802.555.902,00 dengan realisasi  
Rp703.810.088,00 atau 87,70%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	6.636.000,00	86,81	6.636.000,00
5.1.1.02.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.400.000,00	5.214.240,00	62,07	5.648.760,00
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.157.000,00	3.759.756,00	26,56	3.780.456,00
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000,00	1.680,00	3,36	1.760,00
5.1.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.500.000,00	5.469.120,00	56,09	5.469.120,00
5.1.1.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	638.000,00	112.320,00	17,61	112.320,00
5.1.1.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	788.000,00	336.960,00	42,76	336.960,00
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	538.594.450,00	472.341.000,00	87,70	432.553.000,00
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	65.904.452,00	57.059.012,00	86,58	50.782.653,60
<b>Jumlah</b>		<b>802.555.902,00</b>	<b>703.810.088,00</b>	<b>87,70</b>	<b>658.201.029,60</b>

##### 5.1.1.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp54.600.000,00 dengan  
realisasi Rp54.600.000,00 atau 100,00% dengan  
rincian sebagai berikut:

##### 5.1.1.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp  
Rp54.600.000,00 dengan  
realisasi Rp54.600.000,00  
atau 100,00%.

##### 5.1.1.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp7.644.000,00 dengan realisasi  
Rp6.636.000,00 atau 86,81% dengan rincian  
sebagai berikut:

##### 5.1.1.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Anggaran sebesar  
Rp7.644.000,00 dengan  
realisasi Rp6.636.000,00 atau  
86,81%.

5.1.1.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp98.280.000,00 dengan  
realisasi Rp98.280.000,00 atau 100,00% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.1.1.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan  
KDH/WKDH

Anggaran sebesar  
Rp98.280.000,00 dengan  
realisasi Rp98.280.000,00  
atau 100,00%.

5.1.1.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp8.400.000,00 dengan realisasi  
Rp5.214.240,00 atau 62,07% dengan rincian  
sebagai berikut:

5.1.1.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras  
KDH/WKDH

Anggaran sebesar  
Rp8.400.000,00 dengan  
realisasi Rp5.214.240,00 atau  
62,07%.

5.1.1.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  
KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp14.157.000,00 dengan  
realisasi Rp3.759.756,00 atau 26,56% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.1.1.05.05.0001 Belanja Tunjangan  
PPh/Tunjangan Khusus  
KDH/WKDH

Anggaran sebesar  
Rp14.157.000,00 dengan  
realisasi Rp3.759.756,00 atau  
26,56%.

5.1.1.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp50.000,00 dengan realisasi  
Rp1.680,00 atau 3,36% dengan rincian sebagai  
berikut:

5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp50.000,00 dengan realisasi Rp1.680,00 atau 3,36%.
5.1.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp13.500.000,00 dengan realisasi Rp5.469.120,00 atau 40,51% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp13.500.000,00 dengan realisasi Rp5.469.120,00 atau 40,51%
5.1.1.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp638.000,00 dengan realisasi Rp112.320,00 atau 17,61% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp638.000,00 dengan realisasi Rp112.320,00 atau 17,61%.
5.1.1.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp788.000,00 dengan realisasi Rp336.960,00 atau 42,76% dengan rincian sebagai berikut:
5.1.1.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Anggaran sebesar Rp788.000,00 dengan realisasi Rp336.960,00 atau 42,76%.
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Anggaran sebesar Rp538.594.450,00 dengan realisasi Rp472.341.000,00 atau 87,70% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
	Anggaran sebesar Rp13.400.000,00 dengan realisasi Rp1.650.000,00 atau 12,31%.
5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
	Anggaran sebesar Rp28.560.000,00 dengan realisasi Rp28.560.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
	Anggaran sebesar Rp1.990.450,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
	Anggaran sebesar Rp10.480.000,00 dengan realisasi Rp7.680.000,00 atau 73,28%.
5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
	Anggaran sebesar Rp259.225.600,00 dengan realisasi Rp259.225.600,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
	Anggaran sebesar Rp400.000,00 dengan realisasi Rp300.000,00 atau 75,00%.

5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Anggaran sebesar Rp1.600.000,00 dengan realisasi Rp1.600.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Anggaran sebesar Rp240.000,00 dengan realisasi Rp180.000,00 atau 75,00%.
5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Anggaran sebesar Rp53.042.400,00 dengan realisasi Rp43.923.000,00 atau 82,81%.
5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Anggaran sebesar Rp75.433.600,00 dengan realisasi Rp60.000.000,00 atau 79,54%.
5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Anggaran sebesar Rp94.222.400,00 dengan realisasi Rp69.222.400,00 atau 73,47%.
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	



Anggaran sebesar Rp65.904.452,00 dengan realisasi Rp57.059.012,00 atau 86,58% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dengan realisasi Rp4.800.000,00 atau 80,00%.
5.1.1.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dengan realisasi Rp4.000.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	Anggaran sebesar Rp9.200.000,00 dengan realisasi Rp6.900.000,00 atau 75,00%.
5.1.1.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.05.11.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	

	Anggaran sebesar Rp220.800,00 dengan realisasi Rp220.800,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  Anggaran sebesar Rp126.240,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang  Anggaran sebesar Rp960.000,00 dengan realisasi Rp960.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi  Anggaran sebesar Rp2.400.000,00 dengan realisasi Rp2.400.000,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah  Anggaran sebesar Rp3.800.000,00 dengan realisasi Rp2.800.000,00 atau 73,68%.
5.1.1.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

	Anggaran sebesar Rp11.070.128,00 dengan realisasi Rp11.070.128,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal  Anggaran sebesar Rp40.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir  Anggaran sebesar Rp13.726.484,00 dengan realisasi Rp13.726.484,00 atau 100,00%.
5.1.1.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan  Anggaran sebesar Rp720.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
5.1.1.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga  Anggaran sebesar Rp3.960.000,00 dengan realisasi Rp3.440.000,00 atau 86,87%.
5.1.1.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah  Anggaran sebesar Rp680.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

- 5.1.1.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
- Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dengan realisasi Rp6.000.000,00 atau 100,00%.
- 5.1.1.05.11.0026 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Anggaran sebesar Rp240.000,00 dengan realisasi Rp180.000,00 atau 75,00%.
- 5.1.1.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
- Anggaran sebesar Rp12.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
- 5.1.1.05.11.0030 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
- Anggaran sebesar Rp748.800,00 dengan realisasi Rp561.600,00 atau 75,00%.
- 5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- Anggaran sebesar Rp814.815.700,00 dengan realisasi Rp814.810.000,00 atau 99,99%, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.1.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Anggaran sebesar Rp201.600.000,00 dengan realisasi Rp201.600.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.06.01.0001 Belanja Dana Operasional

Pimpinan DPRD

Anggaran sebesar  
Rp201.600.000,00 dengan  
realisasi Rp201.600.000,00 atau  
100,00%.

5.1.1.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp613.215.700,00 dengan realisasi Rp613.210.000,00 atau 99,99%.

5.1.1.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

Anggaran sebesar  
Rp613.215.700,00 dengan  
realisasi Rp613.210.000,00 atau  
99,99%.

5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD

Anggaran sebesar Rp1.791.058.255,00 dengan realisasi Rp1.661.861.570,00 atau 92,79%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.99.99 Belanja Pegawai BLUD

Anggaran sebesar Rp1.791.058.255,00 dengan realisasi Rp1.661.861.570,00 atau 92,79%.

5.1.1.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD

Anggaran sebesar Rp  
Rp1.791.058.255,00 dengan  
realisasi Rp1.661.861.570,00  
atau 92,79%.

**5.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp489.111.167.664,79 dengan realisasi Rp450.063.522.895,51 atau 92,02%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp380.516.554.086,70, terjadi kenaikan sebesar Rp69.546.968.808,81 atau 18,28%. Rincian belanja barang dan jasa tahun 2022 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.633.259.808,00	51.896.019.923,36	90,05	50.207.214.151,68
5.1.2.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.804.600,00	3.750.200,00	98,57	5.749.500,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	163.628.479.846,00	154.958.597.180,00	94,70	156.105.937.325,00
5.1.2.02.02	Belanja Jaminan/Asuransi	25.522.652.262,00	23.449.597.869,00	91,88	16.400.762.718,06
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.676.199.450,00	1.394.846.415,28	83,21	794.643.590,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.394.230.000,00	2.973.274.003,72	87,60	1.798.212.000,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	314.400.000,00	307.314.000,00	97,75	332.180.000,00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.388.420.332,00	2.217.443.176,48	92,84	1.929.297.361,50
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.520.000,00	34.609.800,00	97,44	140.641.160,00
5.1.2.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	684.700.000,00	661.357.000,00	96,59	105.000.000,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.176.932.485,00	1.071.921.598,00	49,24	700.310.764,00
5.1.2.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	422.050.300,00	363.070.500,00	86,03	0,00
5.1.2.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	99.547.500,00	99,55	59.607.000,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.814.650.500,00	10.535.462.815,00	89,17	8.764.628.246,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.376.870.886,00	8.617.879.185,00	83,05	2.266.545.605,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.765.000.000,00	7.633.369.736,35	98,30	11.935.783.583,86
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.905.607.505,32	62.053.043.905,00	91,38	36.469.901.223,75
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.641.380.600,00	5.347.883.976,00	94,80	4.326.743.560,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.480.183.570,00	5.117.516.750,00	68,41	3.624.063.374,00
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.428.770.753,47	30.061.149.395,32	78,23	31.007.782.577,85
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	81.660.054.767,00	81.255.867.967,00	99,51	53.541.550.346,00
	<b>Jumlah</b>	<b>489.111.167.664,79</b>	<b>450.063.522.895,51</b>	<b>92,02</b>	<b>380.516.554.086,70</b>

#### 5.1.2.01 Belanja Barang

Anggaran sebesar Rp57.637.064.408,00 dengan realisasi Rp51.899.770.123,36 atau 90,05% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

Anggaran sebesar Rp57.633.259.808,00 dengan realisasi Rp51.896.019.923,36 atau 90,05% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	167.910.650,00	165.776.750,00	98,73	40.665.900,00
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.939.731.265,00	1.796.014.373,00	92,59	903.941.553,90
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.138.745.285,00	863.001.550,00	75,79	409.681.519,00
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.261.500,00	8.002.500,00	96,86	1.525.000,00
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	199.500.000,00	197.600.000,00	99,05	1.525.000,00
5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.270.500,00	2.820.000,00	30,42	3.850.000,00
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	92.627.800,00	51.356.300,00	55,44	103.651.300,00
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	139.800.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.103.500,00
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	5.992.500,00
5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	23.787.000,00
5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	42.603.200,00
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	22.594.900,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.659.713.649,00	5.836.891.898,36	87,64	3.591.833.687,32
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.475.758.250,00	1.336.498.395,00	90,56	982.056.323,50
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.230.900,00	37.691.000,00	98,59	1.597.804.948,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	159.910.000,00	144.780.000,00	90,54	123.164.000,00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.803.640.000,00	2.499.053.577,00	89,14	1.708.327.434,18
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.209.905.535,00	1.112.491.076,00	91,95	988.503.856,32
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	607.730.700,00	563.832.715,00	92,78	619.874.495,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	151.289.140,00	104.768.090,00	69,25	46.443.700,00
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	31.960.000,00	31.860.000,00	99,69	44.350.000,00
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	314.743.510,00	284.346.980,00	90,34	299.046.000,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.570.890.662,00	2.836.634.071,00	79,44	6.415.569.379,80
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.616.108.507,00	1.307.726.996,00	80,92	2.441.959.441,51
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	185.046.430,00	184.387.230,00	99,64	529.044.475,20
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.595.621.035,00	5.388.204.000,00	96,29	6.662.324.737,83
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.387.949.180,00	1.326.082.150,00	95,54	3.866.598.691,42
5.1.2.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	98.179.999,40
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.714.686.500,00	1.602.713.410,00	93,47	2.233.925.724,00
5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	287.936.800,00	278.194.200,00	96,62	101.300.000,00
5.1.2.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.546.762,30
5.1.2.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.500.000,00	2.763.000,00	61,40	0,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.293.726.100,00	7.197.926.368,00	86,79	7.196.165.155,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.918.236.520,00	8.538.690.841,00	95,74	4.420.079.100,00
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	416.547.890,00
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.716.553.350,00	2.274.470.862,00	83,73	124.992.500,00
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.814.210.000,00	3.584.735.700,00	93,98	2.640.522.828,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	40.000.000,00	39.850.000,00	99,63	49.395.000,00
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	10.736.000,00
5.1.2.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.150.000,00	11.910.000,00	39,50	139.165.000,00
5.1.2.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.700.000,00	64.728.000,00	94,22	34.650.000,00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	390.629.140,00	352.513.475,00	90,24	82.555.400,00
5.1.2.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	101.000.000,00	91.250.000,00	90,35	81.510.000,00
5.1.2.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	123.060.000,00	121.770.476,00	98,95	155.471.500,00
5.1.2.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	10.232.500,00
5.1.2.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	262.044.000,00	245.434.850,00	93,66	130.370.000,00
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.355.000,00	4.906.200,00	91,62	5.885.000,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	275.425.000,00	266.905.500,00	96,91	229.159.250,00
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.151.502.900,00	1.075.037.390,00	93,36	277.227.000,00
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	63.000.000,00	54.450.000,00	86,43	51.975.000,00
5.1.2.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	69.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.633.259.808,00</b>	<b>51.896.019.923,36</b>	<b>90,05</b>	<b>50.207.214.151,68</b>

5.1.2.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai  
 Dianggarkan sebesar Rp3.804.600,00 dengan realisasi Rp3.750.200,00 atau 98,57% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.872.600,00	1.836.200,00	98,06	745.500,00
5.1.2.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.932.000,00	1.914.000,00	99,07	5.004.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.804.600,00</b>	<b>3.750.200,00</b>	<b>98,57</b>	<b>5.749.500,00</b>

5.1.2.02. Belanja Jasa  
 Dianggarkan sebesar Rp200.301.584.675,00 dengan realisasi Rp187.442.031.542,48 atau 93,58% dengan rincian:

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor  
 Dianggarkan sebesar Rp163.628.479.846,00 dengan realisasi Rp154.958.597.180,00 atau 94,70% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.678.350.000,00	1.876.375.000,00	70,06	1.401.000.000,00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.397.740.000,00	4.097.120.000,00	93,16	3.123.616.250,00
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	162.000.000,00	126.000.000,00	77,78	54.000.000,00
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	498.537.400,00	498.470.000,00	99,99	410.000.000,00
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	19.200.000,00	6.800.000,00	35,42	27.400.000,00
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	91.060.000,00	76.640.000,00	84,16	51.510.000,00



Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	22.170.000,00	22.170.000,00	100,00	18.270.000,00
5.1.2.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	386.200.000,00	236.900.000,00	61,34	523.700.000,00
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	441.600.000,00	425.300.000,00	96,31	300.500.000,00
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	20.549.800.000,00	19.897.500.000,00	96,83	18.299.650.000,00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.193.055.476,00	28.817.253.383,00	92,38	17.963.299.638,00
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	241.679.570,00	194.463.150,00	80,46	270.976.350,00
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	124.200.000,00	124.200.000,00	100,00	135.000.000,00
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.322.000.000,00	8.319.437.500,00	99,97	8.570.687.500,00
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.472.700.000,00	1.471.700.000,00	99,93	1.110.000.000,00
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	961.150.000,00	961.150.000,00	100,00	941.100.000,00
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	633.250.000,00	625.750.000,00	98,82	443.350.000,00
5.1.2.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	6.750.000,00	5.062.500,00	75,00	6.750.000,00
5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	948.150.000,00	910.350.000,00	96,01	888.700.000,00
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	75.400.000,00	75.400.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.311.100.000,00	30.905.693.839,00	98,71	31.320.920.799,00
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.394.950.000,00	9.360.237.500,00	99,63	8.741.687.499,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.450.155.602,00	10.061.871.688,00	96,28	9.048.195.000,00
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	634.900.000,00	593.900.000,00	93,54	538.250.000,00
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.528.050.000,00	10.484.975.000,00	99,59	11.276.175.000,00
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.040.300.000,00	2.035.562.500,00	99,77	2.176.687.500,00
5.1.2.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	912.600.000,00	909.412.499,00	99,65	924.075.000,00
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.119.100.000,00	3.107.000.000,00	99,61	3.207.500.000,00
5.1.2.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	15.227.500,00	13.114.234,00	86,12	23.577.500,00
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	313.500.000,00	283.100.000,00	90,30	115.350.000,00
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	62.593.750,00	37.094.527,00	59,26	143.617.897,00
5.1.2.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	110.000.000,00	0,00	0,00	88.540.000,00
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	41.500.000,00	41.428.930,00	99,83	259.903.000,00
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	236.463.680,00	208.740.200,00	88,28	352.125.150,00
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	880.355.800,00	769.219.900,00	87,38	379.640.000,00
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	840.980.161,00	606.623.282,00	72,13	598.724.633,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.729.667.520,00	1.166.133.308,00	67,42	1.192.612.822,00
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.118.374.478,00	8.068.131.310,00	88,48	7.826.886.883,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	320.007.801,00	244.325.000,00	76,35	283.914.000,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.890.841.778,00	4.295.312.666,00	87,82	3.029.746.617,00
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	56.307.455,00	11.022.750,00	19,58	7.020.450,00
5.1.2.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	36.825.000,00	23.727.278,00	64,43	58.109.047,00
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	96.275.000,00	86.756.276,00	90,11	68.446.499,00
5.1.2.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	258.166.875,00	256.635.120,00	99,41	289.607.260,00
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	2.880.245.000,00	2.545.295.000,00	88,37	2.002.790.000,00
5.1.2.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	80.000.000,00	30.242.840,00	37,80	0,00
5.1.2.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	2.062.510.000,00
5.1.2.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	15.479.465.031,00
	<b>Jumlah</b>	<b>163.628.479.846,00</b>	<b>154.958.597.180,00</b>	<b>94,70</b>	<b>156.105.937.325,00</b>

#### 5.1.2.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Dianggarkan sebesar Rp25.522.652.262,00 dengan realisasi Rp23.449.597.869,00 atau 91,88% dengan rincian:

5.1.2.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Dianggarkan sebesar Rp1.143.657.600,00 dengan realisasi Rp1.113.775.552,00 atau 97,39%.

5.1.2.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3  
Anggaran sebesar Rp12.208.118.773,00 dengan realisasi Rp12.162.381.248,00 atau 99,63%.

5.1.2.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN  
Anggaran sebesar Rp6.896.036.889,00 dengan realisasi Rp4.997.625.773,00 atau 72,47%.

5.1.2.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan  
Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Anggaran sebesar  
Rp258.088.666,00 dengan  
realisasi Rp254.254.055,22  
atau 98,51%.

5.1.2.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan  
Kematian bagi Non ASN

Anggaran sebesar  
Rp5.016.750.334,00 dengan  
realisasi Rp4.921.561.240,78  
atau 98,10%.

5.1.2.02.03 Belanja Sewa Tanah

Anggaran sebesar Rp48.000.000,00 dengan  
realisasi Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian  
sebagai berikut:

5.1.2.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk  
Bangunan Gedung  
Perdagangan/Perusahaan

Anggaran sebesar  
Rp48.000.000,00 dengan  
realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Anggaran sebesar Rp1.676.199.450,00 dengan  
realisasi Rp1.394.846.415,28 atau 83,21% dengan  
rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	668.770.000,00	528.302.500,00	79,00	278.320.000,00
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	71.400.000,00	57.100.000,00	79,97	19.200.000,00
5.1.2.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	108.284.450,00	74.939.400,00	69,21	38.942.000,00
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.2.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	108.945.000,00	90.018.800,00	82,63	66.972.000,00
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	468.250.000,00	421.531.000,28	90,02	278.300.000,00
5.1.2.02.04.0160	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/UHF	1.000.000,00	963.015,00	96,30	0,00
5.1.2.02.04.0188	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan	0,00	0,00	0,00	709.590,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Penerima VHF				
5.1.2.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	235.150.000,00	207.591.700,00	88,28	52.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.676.199.450,00</b>	<b>1.394.846.415,28</b>	<b>83,21</b>	<b>794.643.590,00</b>

#### 5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Anggaran sebesar Rp3.394.230.000,00 dengan realisasi Rp2.973.274.003,72 atau 87,60% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	63.500.000,00	58.500.000,00	92,13	111.075.000,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.416.020.000,00	1.184.476.196,00	83,65	388.250.000,00
5.1.2.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	8.100.000,00
5.1.2.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	686.950.000,00	616.916.000,00	89,81	277.470.000,00
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	91.450.000,00
5.1.2.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	157.500.000,00	149.941.999,72	95,20	51.500.000,00
5.1.2.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	39.600.000,00	99,00	163.100.000,00
5.1.2.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
5.1.2.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	100.000.000,00	68.000.000,00	68,00	65.000.000,00
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	848.010.000,00	773.589.808,00	91,22	629.467.000,00
5.1.2.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.394.230.000,00</b>	<b>2.973.274.003,72</b>	<b>87,60</b>	<b>1.798.212.000,00</b>

#### 5.1.2.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Anggaran sebesar Rp314.400.000,00 dengan realisasi Rp307.314.000,00 atau 97,75% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.1.2.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik

Anggaran sebesar Rp229.500.000,00 dengan realisasi Rp229.500.000,00 atau 100,00%.

##### 5.1.2.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak

Kebudayaan Lainnya

Anggaran sebesar Rp24.900.000,00 dengan realisasi Rp18.489.000,00 atau 74,25%.

5.1.2.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman

Anggaran sebesar  
Rp60.000.000,00 dengan  
realisasi Rp59.325.000,00 atau  
98,88%.

5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Anggaran sebesar Rp2.388.420.332,00 dengan  
realisasi Rp2.217.443.176,48 atau 92,84% dengan  
rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	9.621.300,00	9.489.000,00	98,62	0,00
5.1.2.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	50.420.000,00	46.900.000,00	93,02	343.450.296,50
5.1.2.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	99.991.100,00
5.1.2.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	942.221.632,00	878.739.668,48	93,26	822.666.140,00
5.1.2.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	90.500.000,00
5.1.2.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	633.420.000,00	572.072.760,00	90,31	99.055.000,00
5.1.2.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	200.000.000,00	176.323.500,00	88,16	0,00
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	67.410.000,00	58.036.600,00	86,09	92.578.000,00
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	277.581.400,00	276.160.640,00	99,49	0,00
5.1.2.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	30.000.000,00	29.931.150,00	99,77	166.581.425,00
5.1.2.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	77.746.000,00	70.888.858,00	91,18	63.160.000,00
5.1.2.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000,00	98.901.000,00	98,90	151.315.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.388.420.332,00</b>	<b>2.217.443.176,48</b>	<b>92,84</b>	<b>1.929.297.361,50</b>

- 5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
- Anggaran sebesar Rp35.520.000,00 dengan realisasi Rp34.609.800,00 atau 97,44% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.2.02.09.0002 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
- Anggaran sebesar Rp35.520.000,00 dengan realisasi Rp34.609.800,00 atau 97,44%
- 5.1.2.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
- Anggaran sebesar Rp684.700.000,00 dengan realisasi Rp661.357.000,00 atau 96,59% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.2.02.11.0001 Belanja Tugas Belajar S1
- Anggaran sebesar Rp263.700.000,00 dengan realisasi Rp263.700.000,00 atau 100,00%.
- 5.1.2.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
- Anggaran sebesar Rp421.000.000,00 dengan realisasi Rp397.657.000,00 atau 94,46%.
- 5.1.2.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- Anggaran sebesar Rp2.176.932.485,00 dengan realisasi Rp1.071.921.598,00 atau 49,24% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.2.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
- Anggaran sebesar Rp2.089.472.485,00 dengan realisasi Rp1.001.821.598,00 atau 47,95%.
- 5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis
- Anggaran sebesar Rp87.460.000,00 dengan

realisasi Rp70.100.000,00 atau 80,15%.

5.1.2.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Anggaran sebesar Rp422.050.300,00 dengan realisasi Rp363.070.500,00 atau 86,03% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

Anggaran sebesar Rp6.700.000,00 dengan realisasi Rp825.000,00 atau 12,31%.

5.1.2.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran

Anggaran sebesar Rp14.280.000,00 dengan realisasi Rp14.280.000,00 atau 100,00%.

5.1.2.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

Anggaran sebesar Rp995.200,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

Anggaran sebesar Rp5.240.000,00 dengan realisasi Rp3.840.000,00 atau 73,28%.

5.1.2.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Anggaran sebesar Rp129.612.800,00 dengan realisasi Rp129.612.800,00 atau 100,00%.

- 5.1.2.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
- Anggaran sebesar Rp200.000,00 dengan realisasi Rp150.000,00 atau 75,00%.
- 5.1.2.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
- Anggaran sebesar Rp800.000,00 dengan realisasi Rp800.000,00 atau 100,00%.
- 5.1.2.02.13.0013 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
- Anggaran sebesar Rp120.000,00 dengan realisasi Rp90.000,00 atau 75,00%.
- 5.1.2.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Anggaran sebesar Rp26.521.200,00 dengan realisasi Rp21.961.500,00 atau 82,81%.
- 5.1.2.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Anggaran sebesar Rp190.469.900,00 dengan realisasi Rp156.900.000,00 atau 82,38%.
- 5.1.2.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna
- Anggaran sebesar Rp47.111.200,00 dengan realisasi Rp34.611.200,00 atau 73,47%.



5.1.2.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi Rp10.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi Rp10.000.000,00 atau 100,00%.

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan

Dianggarkan sebesar Rp30.056.521.386,00 dengan realisasi Rp26.886.259.236,35 atau 89,45% dengan rincian:

5.1.2.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah

Dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi Rp99.547.500,00 atau 99,55% dengan rincian:

5.1.2.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman

Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi Rp99.547.500,00 atau 99,55%.

5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Dianggarkan sebesar Rp11.814.650.500,00 dengan realisasi Rp10.535.462.815,00 atau 89,17% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	257.360.000,00	244.090.500,00	94,84	181.085.000,00
5.1.2.03.02.0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	2.000.000,00	1.900.000,00	95,00	5.000.000,00
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.726.010.000,00	5.426.233.534,00	94,76	4.638.973.821,00
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	2.031.410.000,00	1.833.953.942,00	90,28	1.492.352.321,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Bermotor Penumpang				
5.1.2.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.147.570.000,00	972.499.658,00	84,74	870.761.096,00
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	275.960.800,00	157.144.033,00	56,94	108.862.683,00
5.1.2.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	43.647.150,00	87,29	35.942.000,00
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	185.130.000,00	147.768.450,00	79,82	93.354.425,00
5.1.2.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	26.973.000,00	99,90	26.400.000,00
5.1.2.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	2.692.800,00
5.1.2.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	450.000,00	450.000,00	100,00	7.290.000,00
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	414.871.200,00	236.667.900,00	57,05	652.550.300,00
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	318.320.000,00	275.815.148,00	86,65	114.673.600,00
5.1.2.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	33.540.000,00
5.1.2.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	90.000.000,00	88.880.770,00	98,76	99.946.000,00
5.1.2.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	51.755.000,00
5.1.2.03.02.0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	24.532.200,00
5.1.2.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	14.000.000,00	13.678.530,00	97,70	39.076.250,00
5.1.2.03.02.0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	102.220.000,00	69.277.500,00	67,77	0,00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00
5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya				
5.1.2.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>	59.993.500,00	41.903.000,00	69,85	6.750.000,00
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>	0,00	0,00	0,00	19.890.000,00
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	810.230.000,00	708.238.450,00	87,41	171.220.750,00
5.1.2.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	248.125.000,00	246.341.250,00	99,28	78.665.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.814.650.500,00</b>	<b>10.535.462.815,00</b>	<b>89,17</b>	<b>8.764.628.246,00</b>

#### 5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dianggarkan sebesar Rp10.376.870.886,00  
dengan realisasi Rp8.617.879.185,00 atau 83,05%  
dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	6.784.186.266,00	5.044.816.385,00	74,36	1.127.973.929,00
5.1.2.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	425.000.000,00	421.177.000,00	99,10	74.576.000,00
5.1.2.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	189.040.000,00	188.205.000,00	99,56	0,00
5.1.2.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.833.894.620,00	1.824.689.000,00	99,50	0,00
5.1.2.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00	199.011.000,00	99,51	0,00
5.1.2.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	82.577.000,00
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	169.750.000,00	168.688.000,00	99,37	0,00
5.1.2.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	550.000.000,00	547.107.800,00	99,47	737.454.000,00
5.1.2.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	99.643.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Asrama	225.000.000,00	224.185.000,00	99,64	0,00
5.1.2.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	44.877.676,00
5.1.2.03.03.0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	0,00	0,00	0,00	99.444.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.376.870.886,00</b>	<b>8.617.879.185,00</b>	<b>83,05</b>	<b>2.266.545.605,00</b>

#### 5.1.2.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Dianggarkan sebesar Rp7.765.000.000,00 dengan realisasi Rp7.633.369.736,35 atau 98,30% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	3.341.000.000,00	3.259.412.039,35	97,56	3.094.007.527,80
5.1.2.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	5.135.532.000,00
5.1.2.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	200.000.000,00	198.316.000,00	99,16	526.101.167,06
5.1.2.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.700.000.000,00	1.691.935.000,00	99,53	830.109.000,00
5.1.2.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.000.000.000,00	991.666.897,00	99,17	248.270.000,00
5.1.2.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.449.500.000,00	1.445.111.800,00	99,70	2.093.832.889,00
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	64.500.000,00	39.895.000,00	61,85	7.931.000,00
5.1.2.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000,00	7.033.000,00	70,33	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.765.000.000,00</b>	<b>7.633.369.736,35</b>	<b>98,30</b>	<b>11.935.783.583,86</b>

#### 5.1.2.04. Belanja Perjalanan Dinas

Dianggarkan sebesar Rp67.905.607.505,32 dengan realisasi Rp62.053.043.905,00 atau 91,38% dengan rincian:

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Anggaran sebesar Rp67.905.607.505,32 dengan realisasi Rp62.053.043.905,00 atau 91,38% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.457.329.798,32	52.537.119.095,00	94,73	28.408.160.744,75
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	35.995.147,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.448.277.707,00	9.515.924.810,00	76,44	7.821.478.500,00
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	204.266.832,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.905.607.505,32</b>	<b>62.053.043.905,00</b>	<b>91,38</b>	<b>36.469.901.223,75</b>

5.1.2.05. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Dianggarkan sebesar Rp13.121.564.170,00 dengan realisasi Rp10.465.400.726,00 atau 79,76% dengan rincian:

5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran sebesar Rp5.641.380.600,00 dengan realisasi Rp5.347.883.976,00 atau 94,80% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	154.100.600,00	154.000.400,00	99,93	39.778.560,00
5.1.2.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.895.280.000,00	1.808.393.576,00	95,42	1.120.265.000,00
5.1.2.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.772.100.000,00	1.575.890.000,00	88,93	1.163.400.000,00
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	19.900.000,00	9.600.000,00	48,24	18.300.000,00
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	1.985.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.641.380.600,00</b>	<b>5.347.883.976,00</b>	<b>94,80</b>	<b>4.326.743.560,00</b>

Di bawah ini merupakan daftar OPD yang melaksanakan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022:

No.	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.886.700.000,00	1.667.161.000,00	88,36	219.539.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
4.	Dinas Sosial	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	0,00
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.700.000,00	11.400.000,00	52,53	10.300.000,00
6.	Dinas Pangan dan Pertanian	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00

No.	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	137.900.000,00	137.050.000,00	99,38	850.000,00
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.050.600,00	19.950.400,00	99,50	100.200,00
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	322.970.000,00	315.004.796,00	97,53	7.965.204,00
11.	Sekretariat Daerah	1.302.800.000,00	1.252.504.500,00	96,14	50.295.500,00
12.	Kecamatan Sungailiat	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	0,00
13.	Kecamatan Belinyu	20.975.000,00	20.013.280,00	95,41	961.720,00
14.	Kecamatan Riau Silip	19.035.000,00	18.000.000,00	94,56	1.035.000,00
15.	Kecamatan Mendo Barat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
16.	Kecamatan Bakam	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
17.	Kecamatan Pemali	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
18.	Kecamatan Merawang	22.000.000,00	21.950.000,00	99,77	50.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.641.380.600,00</b>	<b>5.347.883.976,00</b>	<b>94,80</b>	<b>293.496.624,00</b>

5.1.2.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran sebesar Rp7.480.183.570,00 dengan realisasi Rp5.117.516.750,00 atau 68,41%,

Pada tahun 2022 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dilaksanakan oleh OPD:

No	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	789.915.000,00	595.787.400,00	75,42	194.127.600,00
2.	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.331.914.800,00	127.213.080,00	9,55	1.204.701.720,00
5.	Dinas Sosial	58.800.000,00	44.100.000,00	75,00	14.700.000,00
6.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	885.494.600,00	612.637.750,00	69,19	272.856.850,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	116.504.400,00	97,09	3.495.600,00
9.	Dinas Perhubungan	243.000.000,00	149.436.100,00	61,50	93.563.900,00
10.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.180.000.000,00	1.092.431.670,00	92,58	87.568.330,00
11.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.000.000,00	8.000.000,00	88,89	1.000.000,00
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	882.109.170,00	784.524.000,00	88,94	97.585.170,00
14.	Sekretariat Daerah	507.600.000,00	432.400.000,00	85,19	75.200.000,00
15.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	877.250.000,00	738.513.750,00	84,19	138.736.250,00
16.	Sekretariat DPRD	428.500.000,00	317.168.600,00	74,02	111.331.400,00
17.	Kecamatan Sungailiat	14.850.000,00	2.100.000,00	14,14	12.750.000,00
18.	Kecamatan Belinyu	18.750.000,00	8.250.000,00	44,00	10.500.000,00
19.	Kecamatan Puding Besar	18.500.000,00	18.450.000,00	99,73	50.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.480.183.570,00</b>	<b>5.117.516.750,00</b>	<b>68,41</b>	<b>2.362.666.820,00</b>

5.1.2.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Anggaran sebesar  
Rp7.424.683.570,00 dengan  
realisasi Rp5.071.916.750,00  
atau 68,31%.

5.1.2.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan  
kepada Masyarakat

Anggaran sebesar  
Rp55.500.000,00 dengan  
realisasi Rp45.600.000,00  
atau 82,16%.

#### 5.1.2.88. Belanja Barang dan Jasa BOS

Dianggarkan sebesar Rp38.428.770.753,47,00 dengan realisasi  
Rp30.061.149.395,32 atau 78,23% dengan rincian:

5.1.2.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS

Anggaran sebesar Rp38.428.770.753,47,00  
dengan realisasi Rp30.061.149.395,32 atau  
78,23% dengan rincian:

5.1.2.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS

Anggaran sebesar  
Rp38.428.770.753,47,00  
dengan realisasi  
Rp30.061.149.395,32 atau  
78,23%.

#### 5.1.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Dianggarkan sebesar Rp81.660.054.767,00 dengan realisasi  
Rp81.255.867.967,00 atau 99,51% dengan rincian:

5.1.2.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Anggaran sebesar Rp81.660.054.767,00 dengan  
realisasi Rp81.255.867.967,00 atau 99,51%  
dengan rincian:

5.1.2.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa  
BLUD

Anggaran sebesar  
Rp81.660.054.767,00 dengan  
realisasi  
Rp81.255.867.967,00 atau  
99,51%.

### 5.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi

Rp260.388.170,00 atau 52,08% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.4.03 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp260.388.170,00 atau 52,08% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.4.03.01 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp260.388.170,00 atau 52,08% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.4.03.01.0001 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp260.388.170,00 atau 52,08%, merupakan belanja subsidi pada OPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa penyaluran subsidi bunga kredit kepada pelaku usaha perorangan (Subsidi KUR) di Kab. Bangka tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Keterangan
			Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	
1.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Subsidi KUR)	500.000.000,00	10/02/2022	19.682.940,00	350 debitor
			18/02/2022	20.095.350,00	365 debitor
			14/03/2022	21.837.740,00	405 debitor
			14/04/2022	23.522.120,00	466 debitor
			19/05/2022	24.761.830,00	466 debitor
			16/06/2022	23.733.600,00	496 debitor
			11/07/2022	23.030.730,00	496 debitor
			15/08/2022	22.238.460,00	508 debitor
			13/09/2022	21.098.850,00	513 debitor
			13/10/2022	19.837.200,00	526 debitor
			09/11/2022	19.481.490,00	532 debitor
			14/12/2022	21.067.860,00	558 debitor
		<b>500.000.000,00</b>		<b>260.388.170,00</b>	

5.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp40.604.193.514,00 dengan realisasi Rp38.446.789.953,16 atau 94,69% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Anggaran sebesar Rp39.653.038.081,00 dengan realisasi Rp37.495.634.520,16 atau 94,56%, dengan rincian:



5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran sebesar Rp3.542.753.200,00 dengan realisasi Rp3.461.954.792,00 atau 97,72%.

5.1.5.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran sebesar Rp3.542.753.200,00 dengan realisasi Rp3.461.954.792,00 atau 97,72%. yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pangan dan Pertanian.

5.1.5.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Anggaran sebesar Rp22.780.284.881,00 dengan realisasi Rp21.461.098.100,16 atau 94,21%.

5.1.5.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Anggaran sebesar Rp22.430.284.881,00 dengan realisasi Rp21.113.445.922,00 atau 94,13%. Tahun 2022 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dilaksanakan oleh OPD:

No.	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	19.406.559.881,00	18.097.237.645,00	93,25	1.309.322.236,00
2.	Dinas Kesehatan	2.673.725.000,00	2.670.603.375,00	99,88	3.121.625,00

No.	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
3.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	195.604.902,00	97,80	4.395.098,00
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.430.284.881,00</b>	<b>21.113.445.922,00</b>	<b>94,13</b>	<b>1.316.838.959,00</b>

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp21.113.445.922,00 termasuk nilai realisasi Belanja Hibah yang bersumber dari Pendapatan Transfer DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun 2022 pada OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang disalurkan kepada PAUD Negeri dan Swasta serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Negeri dan Swasta sebesar Rp4.134.769.979,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
<b>1.</b>	<b>BOP-PAUD</b>	<b>3.497.969.979,00</b>
	PAUD Negeri	471.042.979,00
	PAUD Swasta	3.026.927.000,00
<b>2.</b>	<b>BOP Kesetaraan</b>	<b>636.800.000,00</b>
	PKBM Swasta	527.400.000,00
	PKBM Negeri	109.400.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.134.769.979,00</b>

5.1.5.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi Rp347.652.178,16 atau 99,33%. Tahun 2022 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

5.1.5.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp13.330.000.000,00 dengan realisasi Rp12.572.581.628,00 atau 94,32 %.

5.1.5.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp13.330.000.000,00 dengan realisasi Rp12.572.581.628,00 atau 94,32 %, yang dilaksanakan oleh OPD Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial.

#### 5.1.5.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Anggaran sebesar Rp951.155.433,00 dengan realisasi Rp951.155.433,00 atau 100,00%, dengan rincian:

5.1.5.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Anggaran sebesar Rp951.155.433,00 dengan realisasi Rp951.155.433,00 atau 100,00%.

5.1.5.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Anggaran sebesar Rp951.155.433,00 dengan realisasi Rp951.155.433,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 5.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp5.938.750.000,00 dengan realisasi Rp5.711.122.700,00 atau 96,17%, dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.1.6.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi Rp900.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.6.01.01. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi Rp900.000.000,00 atau 100,00%,

- 5.1.6.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
- Anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi Rp900.000.000,00 atau 100,00% yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan berupa Belanja Bantuan Sosial untuk Pembangunan Baru (PB) atas Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat/Individu Prasejahtera untuk 60 penerima masing-masing Rp15.000.000,00.
- 5.1.6.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- Anggaran sebesar Rp4.778.750.000,00 dengan realisasi Rp4.555.999.200,00 atau 95,34% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.6.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
- Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi Rp72.500.000,00 atau 72,50%.
- 5.1.6.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
- Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi Rp72.500.000,00 atau 72,50% yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial merupakan belanja bantuan sosial tali asih veteran pejuang perintis kemerdekaan RI yang disalurkan dalam peringatan HUT RI ke-72 dan Hari Pahlawan.
- 5.1.6.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
- Anggaran sebesar Rp4.678.750.000,00 dengan realisasi Rp4.483.499.200,00 atau 95,83%.

5.1.6.02.02.0001	<p>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga</p> <p>Anggaran sebesar Rp4.678.750.000,00 dengan realisasi Rp4.483.499.200,00 atau 95,83% yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial merupakan belanja atas kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.</p>
5.1.6.03	<p>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>Anggaran sebesar Rp260.000.000,00 dengan realisasi Rp255.123.500,00 atau 98,12% dengan rincian sebagai berikut:</p>
5.1.6.03.02	<p>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>Anggaran sebesar Rp260.000.000,00 dengan realisasi Rp255.123.500,00 atau 98,12%.</p>
5.1.6.03.02.0001	<p>Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>Anggaran sebesar Rp260.000.000,00 dengan realisasi Rp255.123.500,00 atau 98,12% yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial berupa belanja atas pemberian barang <i>Speaker Wireless Trolley</i> sebesar Rp173.594.000,00 dan genset sebesar Rp81.529.500,00.</p>

## 5.2 BELANJA MODAL

Anggaran Belanja Modal untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp252.966.922.483,60 dengan realisasi Rp233.234.112.180,67 atau 92,20%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp185.983.416.546,26 terjadi kenaikan sebesar Rp47.250.695.634,41 atau 25,41%. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten Bangka pada tahun 2022.

Anggaran DAK tahun 2022 sebesar Rp243.511.531.600,00 dengan realisasi sebesar Rp220.607.566.953,00 sedangkan tahun 2021 anggaran DAK Rp188.448.097.000,00 dengan realisasi sebesar Rp182.233.340.397,00 yang mana untuk anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp55.063.434.600,00 atau 29,22% dan realisasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp38.374.226.556,00 atau 21,06%. Adapun rincian belanja modal tahun 2022 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.830.036.253,60	62.965.864.127,83	81,95	58.588.387.763,97
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.776.512.669,00	48.648.039.422,84	97,73	44.994.136.609,43
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	126.001.993.311,00	121.264.201.430,00	96,24	79.334.703.452,86
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	358.380.250,00	356.007.200,00	99,34	3.066.188.720,00
	<b>Jumlah</b>	<b>252.966.922.483,60</b>	<b>233.234.112.180,67</b>	<b>92,20</b>	<b>185.983.416.546,26</b>

### 5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran sebesar Rp76.830.036.253,60 dengan realisasi Rp62.965.864.127,83 atau 81,95% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	710.000.000,00	704.083.328,00	99,17	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	110.251.900,00	100.624.500,00	91,27	45.546.000,00
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Darat	4.224.895.000,00	3.984.068.000,00	94,30	6.174.071.700,00
5.2.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.436.800,00	16.583.000,00	95,10	3.720.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.269.500,00	1.258.000,00	99,09	0,00
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	60.581.200,00	30.074.580,00	49,64	88.084.000,00
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.488.015.530,00	1.480.115.840,00	99,47	7.327.600,00
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.796.439.836,00	1.603.376.092,00	89,25	19.518.955.738,08
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.121.776.551,00	4.468.460.046,00	87,24	2.478.943.481,00
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	447.033.200,00	342.637.150,00	76,65	62.918.100,00
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	242.566.100,00	225.924.000,00	93,14	53.350.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	65.695.730,00	41.539.300,00	63,23	58.470.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	59.626.500,00	59.380.000,00	99,59	121.740.000,00
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat	1.460.258.347,00	1.369.768.449,00	93,80	17.414.978.735,76

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Kedokteran				
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	205.840.000,00	204.997.600,00	99,59	566.925.048,00
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.512.079.350,00	1.963.368.830,00	78,16	7.851.800,00
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.162.851.200,00	3.149.062.000,00	99,56	2.645.627.000,00
5.2.2.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	271.115.500,00
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.956.029.998,00	2.888.148.342,00	97,70	1.692.836.350,00
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.084.003.170,00	1.030.721.108,00	95,08	451.325.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Modal Sumur	151.757.000,00	151.310.000,00	99,71	453.225.700,00
5.2.2.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.950.000.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	8.370.000,00	8.360.000,00	99,88	6.600.000,00
5.2.2.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	41.157.600,00	39.793.500,00	96,69	0,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.282.629.125,00	13.134.427.962,00	98,88	3.322.326.011,13
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	192.250.000,00
5.2.2.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.830.685.316,60	10.439.137.718,83	81,36	0,00
5.2.2.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.788.787.300,00	15.528.644.782,00	62,64	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>76.830.036.253,60</b>	<b>62.965.864.127,83</b>	<b>81,95</b>	<b>58.588.387.763,97</b>

#### 5.2.2.01 Belanja Modal Alat Besar

Anggaran sebesar Rp820.251.900,00 dengan realisasi Rp804.707.828,00 atau 98,10%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

Anggaran sebesar Rp710.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp704.083.328,00 atau 99,17%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.01.01.0010 Belanja Modal Alat Pengangkat

Anggaran sebesar  
Rp10.000.000,00 dengan

realisasi Rp9.879.000,00 atau 98,79%.

#### 5.2.2.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses

Anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi Rp694.204.328,00 atau 99,17%.

#### 5.2.2.01.03 Belanja Modal Alat Bantu

Anggaran sebesar Rp110.251.900,00 dengan realisasi Rp100.624.500,00 atau 91,27% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.01.03.0004	Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>	100.000.000,00	91.908.000,00	91,91	0,00
5.2.2.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.251.900,00	8.716.500,00	85,02	27.706.000,00
5.2.2.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00
5.2.2.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>110.251.900,00</b>	<b>100.624.500,00</b>	<b>91,27</b>	<b>45.546.000,00</b>

#### 5.2.2.02 Belanja Modal Alat Angkutan

Anggaran sebesar Rp4.242.331.800,00 dengan realisasi Rp4.000.651.000,00 atau 94,30%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Mendo Barat, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Anggaran sebesar Rp4.224.895.000,00 dengan realisasi Rp3.984.068.000,00 atau 94,30% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	298.320.000,00	271.200.000,00	90,91	0,00
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.080.000.000,00	1.954.500.000,00	93,97	0,00
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.000.000,00	160.000.000,00	91,43	0,00
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	390.000.000,00	323.708.000,00	83,00	402.280.000,00
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.281.575.000,00	1.274.660.000,00	99,46	5.771.791.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.224.895.000,00</b>	<b>3.984.068.000,00</b>	<b>94,30</b>	<b>6.174.071.700,00</b>



5.2.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Anggaran sebesar Rp17.436.800,00 dengan realisasi Rp16.583.000,00 atau 95,10% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang

Anggaran sebesar  
Rp17.436.800,00 dengan  
realisasi Rp16.583.000,00 atau  
95,10%.

5.2.2.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Anggaran sebesar Rp61.850.700,00 dengan realisasi Rp31.332.580,00 atau 50,66%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Riau Silip, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

Anggaran sebesar Rp1.269.500,00 dengan realisasi Rp1.258.000,00 atau 99,09% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (*Standard Tools*)

Anggaran sebesar  
Rp819.500,00 dengan  
realisasi Rp808.000,00  
atau 98,60%

5.2.2.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja

Anggaran sebesar  
Rp75.000,00 dengan  
realisasi Rp75.000,00  
atau 100,00%.

5.2.2.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi

Anggaran sebesar  
Rp375.000,00 dengan  
realisasi Rp375.000,00  
atau 100,00%

#### 5.2.2.03.03 Belanja Modal Alat Ukur

Anggaran sebesar Rp60.581.200,00 dengan realisasi Rp30.074.580,00 atau 49,64% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	42.952.600,00	12.450.000,00	28,99	800.000,00
5.2.2.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	82.284.000,00
5.2.2.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	17.628.600,00	17.624.580,00	99,98	0,00
5.2.2.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.581.200,00</b>	<b>30.074.580,00</b>	<b>49,64</b>	<b>88.084.000,00</b>

#### 5.2.2.04 Belanja Modal Alat Pertanian

Anggaran sebesar Rp1.488.015.530,00 dengan realisasi Rp1.480.115.840,00 atau 99,47%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan

Anggaran sebesar Rp1.488.015.530,00 dengan realisasi Rp1.480.115.840,00 atau 99,47% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.858.600,00	3.727.440,00	54,35	1.122.000,00
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.132.300,00	5.494.100,00	67,56	6.205.600,00
5.2.2.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	24.190.000,00	23.199.000,00	95,90	0,00
5.2.2.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	218.845.230,00	218.781.000,00	99,97	0,00
5.2.2.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	1.229.989.400,00	1.228.914.300,00	99,91	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.488.015.530,00</b>	<b>1.480.115.840,00</b>	<b>99,47</b>	<b>7.327.600,00</b>

#### 5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Anggaran sebesar Rp7.365.249.587,00 dengan realisasi Rp6.414.473.288,00 atau 87,09%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.2.2.05.01 Belanja Modal Alat Kantor

Anggaran sebesar Rp1.796.439.836,00 dengan realisasi Rp1.603.376.092,00 atau 89,25%. Adapun rincian belanja modal alat kantor tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.177.000,00	7.496.000,00	81,68	10.562.500,00
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	887.762.665,00	748.750.000,00	84,34	1.025.227.796,00
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	899.500.171,00	847.130.092,00	94,18	18.483.165.442,08
	<b>Jumlah</b>	<b>1.796.439.836,00</b>	<b>1.603.376.092,00</b>	<b>89,25</b>	<b>19.518.955.738,08</b>

#### 5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Anggaran sebesar Rp5.121.776.551,00 dengan realisasi Rp4.468.460.046,00 atau 87,24% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.536.335.760,00	2.195.475.300,00	86,56	590.094.000,00
5.2.2.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	115.000,00	115.000,00	100,00	1.232.000,00
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	57.300.250,00	49.380.050,00	86,18	6.000.000,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.406.461.250,00	1.225.534.565,00	87,14	438.308.700,00
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	49.064.800,00	48.225.000,00	98,29	4.250.000,00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.064.648.391,00	942.505.281,00	88,53	1.184.955.781,00
5.2.2.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.851.100,00	7.224.850,00	92,02	254.103.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.121.776.551,00</b>	<b>4.468.460.046,00</b>	<b>87,24</b>	<b>2.478.943.481,00</b>

5.2.2.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Anggaran sebesar Rp447.033.200,00 dengan realisasi Rp342.637.150,00 atau 76,65%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	238.259.200,00	140.644.450,00	59,03	19.937.600,00
5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50	0,00
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	204.774.000,00	198.092.700,00	96,74	42.980.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>447.033.200,00</b>	<b>342.637.150,00</b>	<b>76,65</b>	<b>62.918.100,00</b>

5.2.2.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Anggaran sebesar Rp367.888.330,00 dengan realisasi Rp326.843.300,00 atau 88,84%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamongpraja, Bappeda, BPPKAD, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Sungailiat, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.06.01 Belanja Modal Alat Studio

Anggaran sebesar Rp242.566.100,00 dengan realisasi Rp225.924.000,00 atau 93,14% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.744.000,00	4.744.000,00	100,00	7.400.000,00
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	150.748.100,00	139.745.000,00	92,70	42.250.000,00
5.2.2.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00	0,00
5.2.2.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	22.574.000,00	16.935.000,00	75,02	0,00
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>242.566.100,00</b>	<b>225.924.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>53.350.000,00</b>

5.2.2.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi

Anggaran sebesar Rp65.695.730,00 dengan realisasi Rp41.539.300,00 atau 63,23% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone

Anggaran sebesar  
Rp65.695.730,00 dengan  
realisasi Rp41.539.300,00  
atau 63,23%.

5.2.2.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar

Anggaran sebesar Rp59.626.500,00 dengan  
realisasi Rp59.380.000,00 atau 99,59% dengan  
rincian sebagai berikut:

5.2.2.06.02.0010 Belanja Modal Peralatan  
Antena SHF/Parabola

Anggaran sebesar  
Rp5.996.000,00 dengan  
realisasi Rp5.890.000,00  
atau 98,23%.

5.2.2.06.03.0047 Belanja Modal Sumber  
Tenaga

Anggaran sebesar  
Rp53.630.500,00 dengan  
realisasi Rp53.490.000,00  
atau 99,74%.

5.2.2.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp1.666.098.347,00 dengan realisasi  
Rp1.574.766.049,00 atau 94,52%. Tahun 2022 realisasi  
belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh  
Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.07.03 Belanja Modal Alat Kedokteran

Anggaran sebesar Rp1.460.258.347,00 dengan  
realisasi Rp1.369.768.449,00 atau 93,80%  
dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	472.483.390,00	414.161.539,00	87,66	2.048.334.228,00
5.2.2.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	450.713.262,00
5.2.2.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	6.662.767.024,76
5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	370.646.602,00	368.095.100,00	99,31	1.616.295.461,00
5.2.2.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	6.687.000,00	4.969.200,00	74,31	410.733.572,00
5.2.2.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	1.055.546.992,00
5.2.2.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	274.797.280,00	274.797.280,00	100,00	2.288.758.936,00
5.2.2.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	35.875.500,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	77.411.330,00	77.411.330,00	100,00	0,00
5.2.2.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	146.621.000,00	141.368.000,00	96,42	833.775.241,00
5.2.2.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	111.611.745,00	88.966.000,00	79,71	163.870.016,00
5.2.2.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	0,00	0,00	0,00	150.054.124,00
5.2.2.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	142.361.898,00
5.2.2.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	93.236.000,00
5.2.2.07.01.0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	0,00	0,00	0,00	1.462.656.481,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.460.258.347,00</b>	<b>1.369.768.449,00</b>	<b>93,80</b>	<b>17.414.978.735,76</b>

#### 5.2.2.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Anggaran sebesar Rp205.840.000,00 dengan realisasi Rp204.997.600,00 atau 99,59% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

Anggaran sebesar Rp Rp205.840.000,00 dengan realisasi Rp204.997.600,00 atau 99,59%.

#### 5.2.2.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

Anggaran sebesar Rp5.674.930.550,00 dengan realisasi Rp5.112.430.830,00 atau 90,09%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Anggaran sebesar Rp2.512.079.350,00 dengan realisasi Rp1.963.368.830,00 atau 78,16% dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	411.353.000,00	378.818.580,00	92,09	0,00
5.2.2.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.887.277.000,00	1.374.040.825,00	72,81	0,00
5.2.2.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
5.2.2.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	151.800,00
5.2.2.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	211.301.850,00	210.178.500,00	99,47	0,00

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	2.147.500,00	330.925,00	15,41	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.512.079.350,00</b>	<b>1.963.368.830,00</b>	<b>78,16</b>	<b>7.851.800,00</b>

#### 5.2.2.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Anggaran sebesar Rp3.162.851.200,00 dengan realisasi Rp3.149.062.000,00 atau 99,56% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	205.240.000,00	192.076.000,00	93,59	209.560.000,00
5.2.2.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	156.910.000,00
5.2.2.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	5.611.200,00	5.490.000,00	97,84	0,00
5.2.2.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	3.461.000,00
5.2.2.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.952.000.000,00	2.951.496.000,00	99,98	2.275.696.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.162.851.200,00</b>	<b>3.149.062.000,00</b>	<b>99,56</b>	<b>2.645.627.000,00</b>

#### 5.2.2.10 Belanja Modal Komputer

Anggaran sebesar Rp4.040.033.168,00 dengan realisasi Rp3.918.869.450,00 atau 97,00%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, Sekretariat DPRD, Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Merawang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

Anggaran sebesar Rp2.956.029.998,00 dengan realisasi Rp2.888.148.342,00 atau 97,70% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	57.657.500,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal <i>Personal</i>	2.923.529.998,00	2.855.648.342,00	97,68	1.274.674.050,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	<i>Computer</i>				
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	360.504.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.956.029.998,00</b>	<b>2.888.148.342,00</b>	<b>97,70</b>	<b>1.692.836.350,00</b>

#### 5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer

Anggaran sebesar Rp1.084.003.170,00 dengan realisasi Rp1.030.721.108,00 atau 95,08% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i>	872.295.550,00	831.565.108,00	95,33	387.472.000,00
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	211.707.620,00	199.156.000,00	94,07	29.615.000,00
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.238.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.084.003.170,00</b>	<b>1.030.721.108,00</b>	<b>95,08</b>	<b>451.325.000,00</b>

#### 5.2.2.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Anggaran sebesar Rp151.757.000,00 dengan realisasi Rp151.310.000,00 atau 99,71%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.13.01 Belanja Modal Sumur

Anggaran sebesar Rp151.757.000,00 dengan realisasi Rp151.310.000,00 atau 99,71% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran

Anggaran sebesar Rp151.757.000,00 dengan realisasi Rp151.310.000,00 atau 99,71%.

#### 5.2.2.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Anggaran sebesar Rp8.370.000,00 dengan realisasi Rp8.360.000,00 atau 99,88%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pangan dan Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung

Anggaran sebesar Rp8.370.000,00 dengan realisasi Rp8.360.000,00 atau 99,88% dengan rincian sebagai berikut:



Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.2.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	8.370.000,00	8.360.000,00	99,88	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>99,88</b>	<b>6.600.000,00</b>

#### 5.2.2.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Anggaran sebesar Rp41.157.600,00 dengan realisasi Rp39.793.500,00 atau 96,69% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi

Anggaran sebesar Rp41.157.600,00 dengan realisasi Rp39.793.500,00 atau 96,69% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.17.01.0020 Belanja Modal *Solid Material Handling*

Anggaran sebesar Rp41.157.600,00 dengan realisasi Rp39.793.500,00 atau 96,69%.

#### 5.2.2.18 Belanja Modal Rambu-Rambu

Anggaran sebesar Rp13.282.629.125,00 dengan realisasi Rp13.134.427.962,00 atau 98,88% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Anggaran sebesar Rp13.282.629.125,00 dengan realisasi Rp13.134.427.962,00 atau 98,88% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.2.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	174.996.000,00	174.062.430,00	99,47	412.942.000,00
5.2.2.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	1.287.321.211,13
5.2.2.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	13.107.633.125,00	12.960.365.532,00	98,88	1.622.062.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.282.629.125,00</b>	<b>13.134.427.962,00</b>	<b>98,88</b>	<b>3.322.326.011,13</b>

#### 5.2.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Anggaran sebesar Rp12.830.685.316,60 dengan realisasi Rp10.439.137.718,83 atau 81,36% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.2.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Anggaran sebesar Rp12.830.685.316,60 dengan realisasi Rp10.439.137.718,83 atau 81,36%

dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Anggaran sebesar Rp12.830.685.316,60 dengan realisasi Rp10.439.137.718,83 atau 81,36%.

#### 5.2.2.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Anggaran sebesar Rp24.788.787.300,00 dengan realisasi Rp15.528.644.782,00 atau 62,64% dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.2.2.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Anggaran sebesar Rp24.788.787.300,00 dengan realisasi Rp15.528.644.782,00 atau 62,64% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Anggaran sebesar Rp24.788.787.300,00 dengan realisasi Rp15.528.644.782,00 atau 62,64%.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD pada tahun 2022 :

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	16.654.778.091,60	14.089.200.118,83	84,60	2.565.577.972,77
2.	Dinas Kesehatan	30.399.145.845,00	20.346.743.714,00	66,93	10.052.402.131,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.545.900,00	96.642.700,00	95,17	4.903.200,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	86.479.800,00	80.895.500,00	93,54	5.584.300,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	133.021.300,00	130.636.700,00	98,21	2.384.600,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.782.200,00	86.681.200,00	98,75	1.101.000,00
7.	Dinas Sosial	48.600.000,00	45.298.400,00	93,21	3.301.600,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	2.514.058.206,00	2.502.539.080,00	99,54	11.519.126,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	375.795.600,00	357.791.800,00	95,21	18.003.800,00
10.	Dinas Pangan dan Pertanian	1.130.528.000,00	717.264.200,00	63,45	413.263.800,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	1.234.922.550,00	1.190.925.345,00	96,44	43.997.205,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	384.286.145,00	377.763.700,00	98,30	6.522.445,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.411.600,00	46.840.000,00	96,75	1.571.600,00
14.	Dinas Perhubungan	13.412.261.125,00	13.256.396.397,00	98,84	155.864.728,00
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	347.044.320,00	337.971.750,00	97,39	9.072.570,00

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	225.215.100,00	220.423.805,00	97,87	4.791.295,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	498.959.100,00	454.141.627,00	91,02	44.817.473,00
18.	Dinas Perikanan	282.000,00	275.000,00	97,52	7.000,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	56.283.900,00	39.348.000,00	69,91	16.935.900,00
20.	Sekretariat Daerah	4.907.982.200,00	4.642.184.650,00	94,58	265.797.550,00
21.	Inspektorat Daerah	169.600.000,00	159.149.200,00	93,84	10.450.800,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	347.488.400,00	305.261.500,00	87,85	42.226.900,00
23.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.280.907.600,00	2.176.286.800,00	95,41	104.620.800,00
24.	Kecamatan Sungailiat	325.181.500,00	312.602.500,00	96,13	12.579.000,00
25.	Kecamatan Belinyu	369.025.600,00	355.567.800,00	96,35	13.457.800,00
26.	Kecamatan Riau Silip	108.130.891,00	97.743.241,00	90,39	10.387.650,00
27.	Kecamatan Mendo Barat	123.389.400,00	119.913.200,00	97,18	3.476.200,00
28.	Kecamatan Bakam	19.957.800,00	18.767.000,00	94,03	1.190.800,00
29.	Kecamatan Puding Besar	70.095.900,00	65.770.000,00	93,83	4.325.900,00
30.	Kecamatan Pemali	52.573.500,00	52.573.500,00	100,00	0,00
31.	Kecamatan Merawang	42.588.900,00	42.300.000,00	99,32	288.900,00
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.769.000,00	110.599.700,00	93,12	8.169.300,00
33.	Sekretariat DPRD	154.944.780,00	129.366.000,00	83,49	25.578.780,00
	<b>Jumlah</b>	<b>76.830.036.253,60</b>	<b>62.965.864.127,83</b>	<b>81,95</b>	<b>13.864.172.125,77</b>

### 5.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran sebesar Rp49.776.512.669,00 dengan realisasi Rp48.648.039.422,84 atau 97,73% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.366.492.669,00	43.469.689.925,41	97,98	40.206.887.726,92
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	829.250.000,00	825.290.197,43	99,52	3.669.929.882,51
5.2.3.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	200.000.000,00	199.319.800,00	99,66	0,00
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.495.270.000,00	2.486.112.500,00	99,63	1.117.319.000,00
5.2.3.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.885.500.000,00	1.667.627.000,00	88,44	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.776.512.669,00</b>	<b>48.648.039.422,84</b>	<b>97,73</b>	<b>44.994.136.609,43</b>

#### 5.2.3.01. Belanja Modal Bangunan Gedung

Anggaran sebesar Rp45.195.742.669,00 dengan realisasi Rp44.294.980.122,84 atau 98,01%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.3.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Anggaran sebesar Rp44.366.492.669,00 dengan realisasi Rp43.469.689.925,41 atau 97,98%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Sungailiat, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.576.820.050,00	5.556.785.326,00	99,64	18.520.871.464,00
5.2.3.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	432.750.000,00	429.395.225,00	99,22	198.567.502,00
5.2.3.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	40.000.000,00	39.863.000,00	99,66	0,00
5.2.3.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.818.000.000,00	4.796.169.000,00	99,55	2.097.093.000,00
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.714.032.000,00	6.670.938.000,00	99,36	8.985.447.350,00
5.2.3.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	198.512.000,00	99,26	447.637.000,00
5.2.3.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	99.560.000,00
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.198.228.619,00	8.137.850.974,41	99,26	9.068.955.340,92
5.2.3.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	800.000.000,00	247.272.000,00	30,91	0,00
5.2.3.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	450.750.000,00	448.448.500,00	99,49	0,00
5.2.3.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	400.000.000,00	394.116.800,00	98,53	199.309.000,00
5.2.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	38.368.763,00
5.2.3.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	399.250.000,00	398.111.800,00	99,71	77.779.000,00
5.2.3.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	9.458.892.000,00	9.329.769.700,00	98,63	0,00
5.2.3.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	94.751.000,00	94,75	0,00
5.2.3.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.153.500.000,00	4.129.362.600,00	99,42	121.437.307,00
5.2.3.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	2.424.270.000,00	2.399.018.000,00	98,96	153.200.000,00
5.2.3.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	199.326.000,00	99,66	198.662.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.366.492.669,00</b>	<b>43.469.689.925,41</b>	<b>97,98</b>	<b>40.206.887.726,92</b>

5.2.3.01.02. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Anggaran sebesar Rp829.250.000,00 dengan realisasi Rp825.290.197,43 atau 99,52% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.3.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	0,00	0,00	0,00	2.677.438.882,51
5.2.3.01.02.0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongannya	0,00	0,00	0,00	395.171.000,00
5.2.3.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	829.250.000,00	825.290.197,43	99,52	597.320.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>829.250.000,00</b>	<b>825.290.197,43</b>	<b>99,52</b>	<b>3.669.929.882,51</b>

5.2.3.02 Belanja Modal Monumen

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp199.319.800,00 atau 99,66% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.3.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp199.319.800,00 atau 99,66%.

5.2.3.02.01.0002 Belanja Modal Tugu

Anggaran sebesar  
Rp200.000.000,00 dengan  
realisasi Rp199.319.800,00  
atau 99,66%.

5.2.3.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Anggaran sebesar Rp2.495.270.000,00 dengan realisasi Rp2.486.112.500,00 atau 99,63% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.3.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Anggaran sebesar Rp2.495.270.000,00 dengan realisasi Rp2.486.112.500,00 atau 99,63%.

5.2.3.04.01.0004 Belanja Modal Pagar

Anggaran sebesar  
Rp2.495.270.000,00 dengan  
realisasi Rp2.486.112.500,00  
atau 99,63%.

5.2.3.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Anggaran sebesar Rp1.885.500.000,00 dengan realisasi Rp1.667.627.000,00 atau 88,44% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.3.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Anggaran sebesar Rp1.885.500.000,00 dengan realisasi Rp1.667.627.000,00 atau 88,44%.

5.2.3.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Anggaran sebesar  
Rp1.885.500.000,00 dengan  
realisasi Rp1.667.627.000,00  
atau 88,44%.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD pada tahun 2022 sebagai berikut:

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.027.478.619,00	8.963.141.171,84	99,29	64.337.447,16
2.	Dinas Kesehatan	21.191.384.050,00	20.869.506.551,00	98,48	321.877.499,00
3.	Dinas Sosial	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	500.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	11.758.892.000,00	11.072.208.200,00	94,16	686.683.800,00
5.	Dinas Pangan dan Pertanian	396.020.000,00	394.558.000,00	99,63	1.462.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.310.000,00	198.465.000,00	99,58	845.000,00
7.	Dinas Perhubungan	48.928.000,00	48.295.000,00	98,71	633.000,00
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.353.500.000,00	3.331.657.600,00	99,35	21.842.400,00
9.	Sekretariat Daerah	3.200.000.000,00	3.177.605.900,00	99,30	22.394.100,00
10.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	377.900.000,00	370.208.000,00	97,96	7.692.000,00
11.	Kecamatan Sungailiat	23.100.000,00	22.894.000,00	99,11	206.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.776.512.669,00</b>	<b>48.648.039.422,84</b>	<b>97,73</b>	<b>1.128.473.246,16</b>

#### 5.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran sebesar Rp126.001.993.311,00 dengan realisasi Rp121.264.201.430,00 atau 96,24% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	84.780.545.611,00	80.670.637.055,00	95,15	41.286.323.800,00
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.326.414.700,00	3.319.655.000,00	99,80	2.549.640.895,12
5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15.283.533.000,00	15.051.323.000,00	98,48	14.162.333.380,00
5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.179.500.000,00	4.163.523.600,00	99,62	3.996.390.945,65
5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.910.000.000,00	4.737.310.700,00	96,48	4.015.557.170,00
5.2.4.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
5.2.4.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	60.000.000,00	6.554.500,00	10,92	23.492.800,00
5.2.4.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
5.2.4.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.287.000.000,00	9.178.187.475,00	98,83	11.897.354.962,09
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.500.000.000,00	3.468.860.100,00	99,11	1.050.609.500,00
5.2.4.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	675.000.000,00	668.150.000,00	98,99	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>126.001.993.311,00</b>	<b>121.264.201.430,00</b>	<b>96,24</b>	<b>79.334.703.452,86</b>

##### 5.2.4.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Anggaran sebesar Rp88.106.960.311,00 dengan realisasi Rp83.990.292.055,00 atau 95,33%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### 5.2.4.01.01 Belanja Modal Jalan

Anggaran sebesar Rp84.780.545.611,00 dengan realisasi Rp80.670.637.055,00 atau 95,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.830.556.511,00	57.140.769.800,00	98,81	19.941.781.000,00
5.2.4.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	26.949.989.100,00	23.529.867.255,00	87,31	21.344.542.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.780.545.611,00</b>	<b>80.670.637.055,00</b>	<b>95,15</b>	<b>41.286.323.800,00</b>

#### 5.2.4.01.02 Belanja Modal Jembatan

Anggaran sebesar Rp3.326.414.700,00 dengan realisasi Rp3.319.655.000,00 atau 99,80%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	3.326.414.700,00	3.319.655.000,00	99,80	2.549.640.895,12
	<b>Jumlah</b>	<b>3.326.414.700,00</b>	<b>3.319.655.000,00</b>	<b>99,80</b>	<b>2.549.640.895,12</b>

#### 5.2.4.02 Belanja Modal Bangunan Air

Anggaran sebesar Rp19.463.033.000,00 dengan realisasi Rp19.214.846.600,00 atau 98,72%. Tahun 2022 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### 5.2.4.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Anggaran sebesar Rp15.283.533.000,00 dengan realisasi Rp15.051.323.000,00 atau 98,48%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	2.537.213.000,00	2.354.533.000,00	92,80	0,00
5.2.4.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	12.746.320.000,00	12.696.790.000,00	99,61	14.162.333.380,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.283.533.000,00</b>	<b>15.051.323.000,00</b>	<b>98,48</b>	<b>14.162.333.380,00</b>

##### 5.2.4.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Anggaran sebesar Rp4.179.500.000,00 dengan realisasi Rp4.163.523.600,00 atau 99,62%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	3.996.390.945,65
5.2.4.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	4.179.500.000,00	4.163.523.600,00	99,62	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.179.500.000,00</b>	<b>4.163.523.600,00</b>	<b>99,62</b>	<b>3.996.390.945,65</b>

#### 5.2.4.03 Belanja Modal Instalasi

Anggaran sebesar Rp4.970.000.000,00 dengan realisasi Rp4.743.865.200,00 atau 95,45%.

#### 5.2.4.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor

Anggaran sebesar Rp4.910.000.000,00 dengan realisasi Rp4.737.310.700,00 atau 96,48%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	4.410.000.000,00	4.396.054.900,00	99,68	4.015.557.170,00
5.2.4.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	500.000.000,00	341.255.800,00	68,25	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.910.000.000,00</b>	<b>4.737.310.700,00</b>	<b>96,48</b>	<b>4.015.557.170,00</b>

#### 5.2.4.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik

Anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi Rp6.554.500,00 atau 10,92%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	60.000.000,00	6.554.500,00	10,92	23.492.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>6.554.500,00</b>	<b>10,92</b>	<b>23.492.800,00</b>

#### 5.2.4.04 Belanja Modal Jaringan

Anggaran sebesar Rp12.787.000.000,00 dengan realisasi Rp12.647.047.575,00 atau 98,91%.

##### 5.2.4.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum

Anggaran sebesar Rp9.287.000.000,00 dengan realisasi Rp9.178.187.475,00 atau 98,83%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	9.287.000.000,00	9.178.187.475,00	98,83	11.897.354.962,09
	<b>Jumlah</b>	<b>9.287.000.000,00</b>	<b>9.178.187.475,00</b>	<b>98,83</b>	<b>11.897.354.962,09</b>

##### 5.2.4.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik

Anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan realisasi Rp3.468.860.100,00 atau 99,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.4.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	3.500.000.000,00	3.468.860.100,00	99,11	1.050.609.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.468.860.100,00</b>	<b>99,11</b>	<b>1.050.609.500,00</b>

#### 5.2.4.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Anggaran sebesar Rp675.000.000,00 dengan realisasi Rp668.150.000,00 atau 98,99% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.2.4.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Anggaran sebesar Rp675.000.000,00 dengan realisasi Rp668.150.000,00 atau 98,99%.



5.2.4.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Anggaran sebesar Rp675.000.000,00 dengan realisasi Rp668.150.000,00 atau 98,99%.

Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	3.675.000.000,00	3.642.050.000,00	99,10	32.950.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.266.993.311,00	116.779.381.030,00	96,30	4.487.612.281,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DINPERKPP)	60.000.000,00	6.554.500,00	10,92	53.445.500,00
4.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	341.255.800,00	68,25	158.744.200,00
5.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	500.000.000,00	494.960.100,00	98,99	5.039.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>126.001.993.311,00</b>	<b>121.264.201.430,00</b>	<b>96,24</b>	<b>4.737.791.881,00</b>

5.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran sebesar Rp358.380.250,00 dengan realisasi Rp356.007.200,00 atau 99,34% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	21.615.000,00	21.615.000,00	100,00	0,00
5.2.5.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	246.435.000,00
5.2.5.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	2.670.153.720,00
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	298.765.250,00	296.392.200,00	99,21	149.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>358.380.250,00</b>	<b>356.007.200,00</b>	<b>99,34</b>	<b>3.066.188.720,00</b>

5.2.5.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Anggaran sebesar Rp21.615.000,00 dengan realisasi Rp21.615.000,00 atau 100,00%.

5.2.5.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Anggaran sebesar Rp21.615.000,00 dengan realisasi Rp21.615.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.5.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	21.615.000,00	21.615.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.615.000,00</b>	<b>21.615.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.5.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Anggaran sebesar Rp38.000.000,00 dengan realisasi Rp38.000.000,00 atau 100,00%.

##### 5.2.5.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Anggaran sebesar Rp38.000.000,00 dengan realisasi Rp38.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.5.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	2.670.153.720,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.670.153.720,00</b>

#### 5.2.5.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Anggaran sebesar Rp298.765.250,00 dengan realisasi Rp296.392.200,00 atau 99,21%.

##### 5.2.5.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Anggaran sebesar Rp298.765.250,00 dengan realisasi Rp296.392.200,00 atau 99,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software	298.765.250,00	296.392.200,00	99,21	149.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>298.765.250,00</b>	<b>296.392.200,00</b>	<b>99,21</b>	<b>149.600.000,00</b>

Tahun 2022 realisasi belanja modal aset tetap lainnya berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD sebagai berikut:

No	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	70.000.000,00	68.820.000,00	98,31	1.180.000,00
2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	53.765.250,00	53.280.000,00	99,10	485.250,00
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.615.000,00	59.615.000,00	100,00	0,00
4.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	175.000.000,00	174.292.200,00	99,60	707.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>358.380.250,00</b>	<b>356.007.200,00</b>	<b>99,34</b>	<b>2.373.050,00</b>

### 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran sebesar Rp5.000.593.480,00 dengan realisasi Rp2.397.478.875,00 atau 47,94%, dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.1 Belanja Tidak Terduga

Anggaran sebesar Rp5.000.593.480,00 dengan realisasi Rp2.397.478.875,00 atau 47,94%, dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.1.01. Belanja Tidak Terduga

Dianggarkan sebesar Rp5.000.593.480,00 dengan realisasi Rp2.397.478.875,00 atau 47,94%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga

Anggaran sebesar Rp5.000.593.480,00 dengan realisasi Rp2.397.478.875,00 atau 47,94%.

##### 5.3.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga

Anggaran sebesar Rp5.000.593.480,00 dengan realisasi Rp2.397.478.875,00 atau 47,94%. Belanja tak terduga pada pemerintah Kabupaten Bangka berupa belanja pada BPPKAD Kab Bangka atas Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Dinas Sosial Kab.Bangka untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	346.713.971,00
2.	Belanja Tidak Terduga ( BTT ) kepada PT. TASPEN (PERSERO) Pangkalpinang atas Pengembalian Hutang Pihak Ketiga Tahun 2021 yaitu Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Istri an. Dahlan Fatro	250.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Babel untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Berupa Bantuan Pelunasan Tunggakan Biaya Rawat Inap Pasien ODGJ	5.539.600,00
4.	Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada PT. Banamba Putratama yaitu pengembalian hutang MBLB tahun 2021 (mengembalikan Penerimaan atas pendapatan pajak MBLB) Kab.Bangka	4.940.000,00
5.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada rekening Bank a.n Nazir yaitu pengembalian kelebihan setoran hutang KKSIR tahap III periode Desember tahun 2021	10.047.214,00
6.	Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Operasional Penerimaan Daerah) yaitu pengembalian penerimaan berupa Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2021	545.460,00
7.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Penanganan Pasien Covid-19 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Bangka atas Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada BPPKAD Kab.Bangka	189.667.570,00
8.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada Kecamatan-Kecamatan di Kab. Bangka yaitu Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa Pembayaran Santunan Kematian	939.000.000,00
9.	Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada BPBD untuk Operasional Posko Bersama Satgas Penanganan COVID-19 di Kab.Bangka Tahun 2022 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada BPPKAD Kab.Bangka	885.775.060,00
10.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Kepada Dinas Perikanan Kab.Bangka untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa Kecelakaan Laut	15.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.397.478.875,00</b>

#### 5.4 BELANJA TRANSFER

Anggaran Rp132.560.631.925,00 dengan realisasi Rp132.556.237.974,00 atau 99,997% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.1 BELANJA BAGI HASIL

Anggaran Rp7.535.911.725,00 dengan realisasi Rp7.535.911.725,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.1.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota dan Desa

Dianggarkan sebesar Rp6.732.431.075,00 dengan realisasi Rp6.732.431.075,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Anggaran sebesar Rp6.732.431.075,00 dengan realisasi Rp6.732.431.075,00 atau 100,00%.

5.4.1.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Anggaran sebesar Rp6.732.431.075,00 dengan realisasi Rp6.732.431.075,00 atau 100,00%. Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa ini disalurkan kepada 62 Desa di Kabupaten Bangka, dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Tahap I (30%)	2.019.729.323,00
2.	Tahap II (40%)	2.692.972.430,00
3.	Tahap III (30%)	2.019.729.322,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.732.431.075,00</b>

5.4.1.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Dianggarkan sebesar Rp803.480.650,00 dengan realisasi Rp803.480.650,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Anggaran sebesar Rp803.480.650,00 dengan realisasi Rp803.480.650,00 atau 100,00%.

5.4.1.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Anggaran sebesar Rp803.480.650,00 dengan realisasi Rp803.480.650,00 atau 100,00%.

Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa ini disalurkan kepada 62

Desa di Kabupaten Bangka,  
dengan rincian penyaluran  
sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Tahap I	233.112.495,00
2.	Tahap II	321.392.260,00
3.	Tahap III	248.975.895,00
	<b>Jumlah</b>	<b>803.480.650,00</b>

#### 5.4.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Anggaran Rp125.024.720.200,00 dengan realisasi Rp125.020.326.249,00 atau 99,99%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.2.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.2.02.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.2.02.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% merupakan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka Penanganan Masyarakat terdampak Bencana Alam tahun 2022.

##### 5.4.2.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Dianggarkan sebesar Rp124.824.720.200,00 dengan realisasi Rp124.820.326.249,00 atau 99,996% dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.2.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Anggaran sebesar Rp124.824.720.200,00 dengan realisasi Rp124.820.326.249,00 atau 99,996%.

5.4.2.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Anggaran sebesar Rp124.824.720.200,00 dengan realisasi Rp124.820.326.249,00 atau 99,99%. Dengan rincian sebagai berikut: (*Lampiran Tambahan X*)

- a. Penyaluran Penghasilan Tetap(Siltap) Kades dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebesar Rp30.997.006.049,00.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD untuk 62 desa sebesar Rp38.435.385.200,00.
- c. Belanja Dana Desa Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang bersumber dari APBN sebesar Rp55.387.935.000,00.

## 6. PEMBIAYAAN

### 6.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Rp125.389.433.516,07 dengan realisasi Rp128.201.931.505,43 atau 102,24% dengan rincian sebagai berikut:

#### 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran sebesar Rp125.339.422.816,07 dengan realisasi Rp125.339.422.816,43 atau 100,00%.

##### 6.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD

Dianggarkan sebesar Rp18.223.782.599,00 dengan realisasi Rp92.837.371.150,04 atau 509,43%.

##### 6.1.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

Anggaran sebesar Rp2.589.196.303,00 dengan realisasi Rp92.837.371.150,04 atau 3.585,57%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
6.1.1.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	(437.507.778,00)	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	266.853.106,00	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	(201.709.750,00)	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	264.907.128,00	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0010	Pelampauan	2.177.401.552,00	92.837.371.150,04	4.263,68

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan			
6.1.1.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	(11.869.100,00)	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	54.057.532,00	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	(30.000,00)	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(481.240.569,00)	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	422.543.407,00	0,00	0,00
6.1.1.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	535.790.775,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.589.196.303,00</b>	<b>92.837.371.150,04</b>	<b>3.585,57</b>

6.1.1.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah

Anggaran sebesar Rp199.908.226,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
6.1.1.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	269.524.699,00	0,00	0,00
6.1.1.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	482.949.977,00	0,00	0,00
6.1.1.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	(552.566.450,00)	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>199.908.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.1.1.01.03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran sebesar Rp870.323.624,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.01.03.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Anggaran sebesar Rp870.323.624,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran sebesar Rp14.564.354.446,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
6.1.1.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	895.450.500,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	798.267.394,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	140.331.641,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	1.059.074.937,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	378.033.821,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Pajak Daerah	210.344.702,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Retribusi Daerah	18.306.722,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Pengembalian	214.678.126,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.418.603.555,00	0,00	0,00
6.1.1.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	431.263.048,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.564.354.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.1.1.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

Dianggarkan sebesar Rp14.594.341.934,07 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran sebesar Rp33.765.887.722,07 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.



Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
6.1.1.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Banguna	32.320.480.252,00	0,00	0,00
6.1.1.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	1.445.407.470,07	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.765.887.722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.1.1.02.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah

Anggaran sebesar (Rp19.171.545.788,00) dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.02.02.0001 Pelampauan Penerimaan  
Pendapatan Transfer antar  
Daerah-Pendapatan Bagi Hasil  
Anggaran sebesar (Rp  
18.906.145.788,00) dengan  
realisasi sebesar Rp0,00 atau  
0,00%.

6.1.1.02.02.0002 Pelampauan Penerimaan  
Pendapatan Transfer antar  
Daerah-Bantuan Keuangan  
Anggaran sebesar  
(Rp265.400.000,00) dengan  
realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Dianggarkan sebesar (Rp251.610.000,00) dengan realisasi  
Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.03.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan  
Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai  
dengan Ketentuan

Anggaran sebesar (Rp251.610.000,00) dengan  
realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.03.03.0001 Pelampauan Penerimaan Lain-  
Lain Pendapatan Daerah yang  
Sah-Lain-Lain Pendapatan  
Sesuai dengan Ketentuan  
Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran sebesar  
(Rp251.610.000,00) dengan  
realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

#### 6.1.1.05 Penghematan Belanja

Dianggarkan sebesar Rp89.223.022.305,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

##### 6.1.1.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi

Anggaran sebesar Rp75.540.531.432,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00 %.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
6.1.1.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	32.334.598.159,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	11.982.796.971,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.483.490.950,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	1.038.293.848,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	163.615.524,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	103.200,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	5.871.733.390,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	9.351.582.150,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan	1.950.715.277,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas	4.908.858.424,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	895.810.766,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	84.139.880,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.432.905.180,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Individu	25.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Keluarga	16.587.313,00	0,00	0,00
6.1.1.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.400,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.540.531.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 6.1.1.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal

Anggaran sebesar Rp12.594.201.425,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
6.1.1.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	1.882.900,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	87.548.300,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.657.400,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	1.505.200,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.161.750.286,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.307.000,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.006.256.879,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	363.411.425,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	190.790.173,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	98.394.300,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	180.000,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	146.561.988,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	1.250.000,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.131.145.000,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	26.444.400,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.284.222.383,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	665.247.474,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	181.249.850,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	187.790.187,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.360.000,00	0,00	0,00
6.1.1.05.02.0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	30.246.280,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.594.201.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.1.1.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga  
Anggaran sebesar Rp1.088.289.448,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga  
Anggaran sebesar Rp1.088.289.448,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

6.1.1.08 Sisa Belanja Lainnya

Anggaran sebesar Rp3.549.885.978,00 dengan realisasi Rp32.502.051.666,39 atau 915,58%.

6.1.1.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD  
Anggaran sebesar Rp3.549.885.978,00 dengan realisasi Rp31.056.644.196,32 atau 874,86%.

6.1.1.05.03.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD  
Anggaran sebesar Rp3.549.885.978,00 dengan realisasi Rp31.056.644.196,32 atau 874,86%.

6.1.1.08.02 Sisa Dana BOS

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp1.445.407.470,07 atau 0,00%.

6.1.1.08.02.0001 Sisa Dana BOS  
Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp1.445.407.470,07 atau 0,00%.

**6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Anggaran sebesar Rp50.010.700,00 dengan realisasi sebesar Rp2.862.508.689,00 atau 5.723,79% dengan rincian sebagai berikut:

6.1.5.05 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

6.1.5.05.01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi  
Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

6.1.5.05.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 0,00%, merupakan pengembalian dari Koperasi UMKM dari BPRS Babel.

6.1.5.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat

Dianggarkan sebesar Rp50.010.700,00 dengan realisasi Rp2.857.408.689,00 atau 5.713,6%.

6.1.5.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat

Anggaran sebesar Rp50.010.700,00 dengan realisasi Rp2.857.408.689,00 atau 5.713,6%.

6.1.5.06.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat

Anggaran sebesar Rp50.010.700,00 dengan realisasi Rp2.857.408.689,00 atau 5.713,6%, yang merupakan pengembalian dari Kelompok Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) yang pengelolaannya bekerja sama dengan PT Sawindo Kencana. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan dari KKSR sebesar Rp1.477.481.867,00, maka terjadi kenaikan penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.409.926.822,00 dari KKSR, dikarenakan pada tahun 2022 angsuran tahap ke-2 mulai dibayarkan sebesar Rp150.331.642,00, angsuran tahap ke-3 sebesar Rp152.834.336,00, angsuran tahap ke 4 sebesar Rp1.228.926.488,00 dan angsuran tahap ke-5 sebesar Rp1.325.316.223,00, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Tgl Kasda	Realisasi 2022 (Rp)	Tgl Kasda	Realisasi 2021 (Rp)
1.	24 Maret 2022	7.843.334,00	31-Des-2021	666.047.333,00
2.	24 Maret 2022	18.298.742,00	31-Des-2021	636.766.382,00
3.	12 April 2022	23.868.660,00	31-Des-2021	174.668.152,00
4.	21 Juli 2022	17.278.962,00		
5.	11 Agustus 2022	9.070.902,00		
6.	15 September 2022	6.540.048,00		
7.	20 Oktober 2022	23.151.339,00		
8.	25 November 2022	23.103.729,00		
9.	15 Desember 2022	21.175.926,00		
10.	29 Desember 2022	1.325.316.223,00		
11.	29 Desember 2022	1.228.926.488,00		
12.	29 Desember 2022	152.834.336,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.857.408.689,00</b>		<b>1.477.481.867,00</b>

## 6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%.

### 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah

Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

#### 6.2.2.02 Penyertaan Modal Daerah

Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

##### 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%.

##### 6.2.2.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%. Merupakan penyertaan modal Kabupaten Bangka kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

### Pembiayaan Netto

Merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan	Rp128.201.931.505,43
Pengeluaran Pembiayaan	(Rp 3.000.000.000,00)
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp 125.201.931.505,43</b>

### Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp150.937.095.945,22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 yang terdiri dari:

▪ Kas Daerah di Bank	Rp108.494.127.189,90
▪ Kas di BLUD Dinkes (Bank)	Rp 42.035.983.822,32
▪ Kas di Bendahara Penerimaan BLUD DINKES:	Rp 34.300.550,00
▪ RSUD Eko Maulana Ali	Rp 8.676.550,00
▪ RSUD Syafrie Rachman	Rp 1.306.500,00
▪ RSUD Depati Bahrin	Rp20.992.000,00
▪ PKM Sinar Baru	Rp 143.000,00
▪ PKM Sungailiat	Rp 593.500,00
▪ PKM Riau Silip	Rp 795.000,00
▪ PKM Penagan	Rp 184.000,00
▪ PKM Pemali	Rp 852.000,00
▪ PKM Belinyu	Rp 255.000,00
▪ PKM Batu Rusa	Rp 503.000,00
▪ Kas di BOS APBN SDN & SMPN:	Rp 458.107.823,92
▪ Tunai	Rp 25.787.409,45
▪ Bank	Rp432.320.414,47

(Lampiran Tambahan I)

▪ Kas di BOP PAUD Negeri	Rp 3.557.021,00
▪ Kas dibatasi Penggunaannya	(Rp 88.980.461,92)
Kas dibatasi Penggunaannya merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening KASDA Kabupaten Bangka, namun sampai tahun 2022 berakhir, belum dapat diketahui tujuan atas setoran tersebut, dengan rincian sebagai berikut:	
a. Pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015 sebesar Rp16.250.000,00, namun sampai dengan tahun 2022, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya dengan rincian penerimaan sebagai berikut:	
1. Tanggal 08 April 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp7.500.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.	
2. Tanggal 08 April 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp5.000.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.	
3. Tanggal 25 Juni 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp3.700.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.	
4. Tanggal 27 Juni 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp50.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.	

- b. SKRDLB DPUPR sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata Tbk, yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas PUPR telah mengupayakan pertemuan pada tanggal 28 November 2019 dengan Provider Menara Telekomunikasi untuk membahas pengembalian lebih bayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut, tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada informasi lebih lanjut dari pihak PT XL Axiata Tbk mengenai pengembalian tersebut.



### Informasi Tambahan

a. Pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022, terdapat sisa DAK pada rekening kas umum daerah per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran DAK Fisik (DAK Reguler) yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DAK Fisik Reguler Pendidikan	6.576.862.053,00	6.576.862.053,00	100,00	0,00
2	DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana	22.415.559.890,00	22.408.555.890,00	99,97	7.004.000,00
3	DAK Fisik Jalan	28.887.146.750,00	28.861.417.500,00	99,91	25.729.250,00
4.	DAK Fisik Air Minum	8.843.280.727,00	8.824.790.742,00	99,79	18.489.985,00
5.	DAK Fisik Sanitasi	599.100.000,00	595.850.000,00	99,46	3.250.000,00
6.	DAK Fisik Perumahan dan Pemukiman	1.258.321.000,00	1.258.208.130,00	99,99	112.870,00
Jumlah		68.580.270.420,00	68.525.684.315,00	99,92	54.586.105,00
Rekapitulasi Realisasi Penyaluran DAK Fisik (DAK Penugasan) yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DAK Penugasan Jalan	17.246.597.300,00	17.234.922.300,00	99,93	11.675.000,00
2	DAK Penugasan Lingkungan Hidup	2.097.482.080,00	2.097.482.080,00	100,00	0,00
3	DAK Penugasan Irigasi	2.487.386.000,00	2.487.386.000,00	100,00	0,00
4	DAK Penugasan Pertanian	2.323.883.700,00	2.320.820.700,00	99,87	3.063.000,00
5	DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan	1.458.102.600,00	1.458.102.600,00	100,00	0,00
6	DAK Penugasan Industri Kecil dan Menengah	13.456.761.974,00	13.424.136.974,00	99,76	32.625.000,00
7	DAK Penugasan Pariwisata	3.131.891.000,00	3.131.891.000,00	100,00	0,00
Jumlah		42.202.104.654,00	42.154.741.654,00	99,89	47.363.000,00

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik Yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022						
No	Bidang	Sisa Dana di RKUD Tahun 31/12/2021 (Rp)	Jumlah Dana yang Ditransfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DAK Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan (BOK)	2.700.985.814,00	10.399.531.186,00	10.569.837.761,00	80,68	2.530.679.239,00
2	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	80.920.240,00	340.911.760,00	392.812.800,00	93,12	29.019.200,00
3	DAK Non Fisik Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	62.838.665,00	3.092.766.335,00	2.336.715.024,00	74,05	818.889.976,00
4	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas UKM	20.569.700,00	383.630.300,00	401.358.305,00	99,30	2.841.695,00
5	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	143.539.500,00	730.624.500,00	830.081.602,00	94,96	44.082.398,00
6	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	2.987.792.970,00	47.134.028.330,00	49.601.414.680,00	98,96	520.406.620,00
7	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	17.563.000,00	1.191.437.000,00	1.177.600.000,00	97,40	31.400.000,00
8	DAK Non Fisik Pelayanan dan Perlindungan	0,00	601.800.000,00	286.886.300,00	47,67	314.913.700,00

9	Perempuan dan Anak					
	DAK Non Fisik	0,00	106.800.000,00	101.771.000,00	95,29	5.029.000,00
	Ketahanan Pangan dan Pertanian					
10	DAK Non Fisik	0,00	2.192.348.000,00	1.454.624.373,00	66,35	737.723.627,00
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM					
11.	DAK Non Fisik	135.825.092,00	0,00	0,00	0,00	135.825.092,00
	Admindak					
<b>Jumlah</b>		<b>6.150.034.981,00</b>	<b>66.173.877.411,00</b>	<b>67.153.101.845,00</b>	<b>92,85</b>	<b>5.170.810.547,00</b>
<b>Rekapitulasi Realisasi Transfer Dana Bantuan Keuangan untuk Pemerintah yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022</b>						
<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)</b>	<b>Realisasi Dana (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Dana (Rp)</b>	
1.	DABA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.098.966.666,00	5.019.866.666,00	98,45	79.100.000,00	
2.	DABA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	0,00	
3.	DABA Sekretariat Daerah	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00	0,00	
<b>Jumlah</b>		<b>6.568.966.666,00</b>	<b>6.489.866.666,00</b>	<b>98,80</b>	<b>79.100.000,00</b>	

Rekapitulasi Realisasi Transfer Dana Insentif Daerah yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DID	14.987.147.000,00	14.987.147.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.987.147.000,00</b>	<b>14.987.147.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- b. Sisa Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2022 pada Rekening Umum Daerah per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**PERHITUNGAN PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (DTP GURU) PNSD  
TAHUN 2022  
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
BERSUMBER DARI APBN MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH  
( dalam rupiah )**

No.	Keterangan	Realisasi
1.	Sisa DTP Guru yang ada di Kas Daerah Th 2021	17.563.000,00
2.	Rincian Penerimaan DTP Guru Tahun 2022:	1.191.437.000,00
	- Triwulan I	425.700.000,00
	- Triwulan II	354.750.000,00
	- Triwulan III	354.750.000,00
	- Triwulan IV	56.237.000,00
3.	Jumlah DTP Th 2022(1+2)	1.209.000.000,00
4.	Pembayaran DTP Tahun 2022 (Berdasarkan SP2D):	1.184.250.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan I	244.000.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan II	302.250.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan III	319.500.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan IV	318.500.000,00
5.	Sisa Dana (3-4)	24.750.000,00
6.	Pengembalian di Triwulan I + II+III	6.650.000,00
7.	Sisa DTP Guru seluruh yang ada di Kas Daerah Kab. Bangka (5+6)	31.400.000,00

- c. Sisa Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2022 pada Rekening Umum Daerah per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU  
SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2022  
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
BERSUMBER DARI APBN MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH  
( dalam rupiah )**

No	Keterangan	Realisasi
1.	Sisa Dana Tunjangan Profesi yang ada di Kas daerah Th.2021	2.987.792.970,00
2.	Rincian Penerimaan Dana TPG Th.2022 :	47.134.028.330,00
	- Triwulan I	15.282.709.000,00
	- Triwulan II	12.735.590.000,00
	- Triwulan III	12.735.590.000,00
	- Triwulan IV	6.380.139.330,00
3.	Jumlah Dana TPG Th 2022 (1+2)	50.121.821.300,00
4.	Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Tahun 2022 (Berdasarkan SP2D) :	49.601.414.680,00
	a. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN I:	12.838.290.580,00
	- Tahap I	12.464.128.100,00
	- Tahap II	234.990.480,00
	- Tahap III	130.099.500,00
	- Tahap IV	9.072.500,00
	b. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN II:	12.533.403.800,00
	- Tahap I	12.465.174.300,00
	- Tahap II P3K	68.229.500,00
	c. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN III:	12.298.005.700,00
	- Tahap I	11.695.844.800,00
	- Tahap II	462.209.700,00
	- Tahap III	139.951.200,00
	d. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN IV:	11.931.714.600,00
	- Tahap I	11.931.714.600,00
5.	Jumlah Pembayaran Dana TPG	49.601.414.680,00
6.	Sisa Dana Tunjangan Profesi seluruh yang ada di Kas Daerah Kab Bangka (3-5)	520.406.620,00

d. Laporan Penggunaan Dana Covid-19 Kabupaten Bangka untuk Tahun 2022

**LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGKA  
UNTUK PERIODE S/D 31 DESEMBER 2022**

**I. BIDANG KESEHATAN**

**A. Penanganan Covid-19**

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1.000.000.000,00	629.209.370,00	62,92
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	629.209.370,00	62,92
		<b>Total</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>629.209.370,00</b>	<b>62,92</b>

**B. Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi**

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dinas Kesehatan		3.703.550.000,00	3.076.175.000,00	83,06
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.703.550.000,00	3.076.175.000,00	83,06
		<b>Total</b>	<b>3.703.550.000,00</b>	<b>3.076.175.000,00</b>	<b>83,06</b>

**C. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19**

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Kecamatan Sungailiat		1.200.000.000,00	1.131.097.880,00	94,26
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.200.000.000,00	1.131.097.880,00	94,26
2.	Kecamatan Belinyu		700.000.000,00	672.670.659,00	96,10
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	700.000.000,00	672.670.659,00	96,10
		<b>Total</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>1.803.768.539,00</b>	<b>94,94</b>

**D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19**

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dinas Kesehatan		5.500.000.000,00	4.412.767.423,00	80,23
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000.000,00	4.412.767.423,00	80,23
		<b>Total</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>4.412.767.423,00</b>	<b>80,23</b>

**E. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas**

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dinas Kesehatan		21.014.242.264,00	20.041.963.715,36	95,37
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.782.601.350,00	10.822.463.943,36	91,85
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	9.231.640.914,00	9.219.499.772,00	99,87
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		1.882.825.000,00	1.711.959.112,00	90,93
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.130.295.000,00	996.538.403,00	88,17
		Program Pemasaran Pariwisata	602.530.000,00	579.323.628,00	96,15
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	136.097.081,00	90,73
3.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan		151.263.000,00	126.404.342,00	83,57
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	88.390.000,00	65.967.842,00	74,63
		Program Penempatan Tenaga Kerja	62.873.000,00	60.436.500,00	96,12
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		184.404.000,00	183.509.900,00	99,52
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	184.404.000,00	183.509.900,00	99,52
5.	Dinas Pangan dan Pertanian		1.057.459.006,00	1.026.918.786,00	97,11
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	163.583.680,00	162.970.320,00	99,63
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	149.600.000,00	149.166.850,00	99,71
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	744.275.326,00	714.781.616,00	96,04

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
6.	Dinas Sosial		2.016.640.000,00	1.956.762.200,00	97,03
		Program Rehabilitasi Sosial	2.016.640.000,00	1.956.762.200,00	97,03
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1.050.486.000,00	855.434.570,00	81,43
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	750.486.000,00	555.434.570,00	74,01
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
8.	Dinas Perikanan		504.437.170,00	464.181.548,00	92,02
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	504.437.170,00	464.181.548,00	92,02
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		110.653.000,00	97.096.860,00	87,75
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	49.195.000,00	37.964.000,00	77,17
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	61.458.000,00	59.132.860,00	96,22
		<b>Total</b>	<b>27.972.409.440,00</b>	<b>26.464.231.033,36</b>	<b>94,61</b>

## II. PENANGANAN DAMPAK/DUKUNGAN EKONOMI

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		500.000.000,00	260.388.170,00	52,08
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	500.000.000,00	260.388.170,00	52,08
2.	Dinas Pangan dan Pertanian		948.835.540,00	931.726.742,00	98,20
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00	99.201.592,00	99,20
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	506.017.640,00	499.939.450,00	98,80
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	342.817.900,00	332.585.700,00	97,02
3.	Dinas Perhubungan		13.181.588.675,00	12.220.494.220,00	92,71
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.945.356.875,00	12.022.107.547,00	92,87
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	136.831.800,00	99.797.053,00	72,93
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	99.400.000,00	98.589.620,00	99,18
4.	Dinas Perikanan		504.437.170,00	464.181.548,00	92,02
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	504.437.170,00	464.181.548,00	92,02
5.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		5.593.881.000,00	5.543.344.000,00	99,10
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.593.881.000,00	1.572.011.000,00	98,63
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00	3.971.333.000,00	99,28
6.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		3.044.863.815,00	1.522.663.069,00	50,01
		Program Pengembangan Perumahan	34.850.000,00	32.824.980,00	94,19
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	49.550.000,00	49.324.700,00	99,55
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	694.619.850,00	585.802.245,00	84,33
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	146.950.000,00	137.752.644,00	93,74
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.099.909.050,00	118.212.260,00	10,75
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.018.984.915,00	598.746.240,00	58,76

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
7.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan		72.223.000,00	50.645.500,00	70,12
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	29.290.000,00	8.234.000,00	28,11
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	42.933.000,00	42.411.500,00	98,79
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		60.780.000,00	60.471.500,00	99,49
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.780.000,00	60.471.500,00	99,49
		<b>Total</b>	<b>23.906.609.200,00</b>	<b>21.053.914.749,00</b>	<b>88,07</b>

### III. BANTUAN SOSIAL SAFETY NET/JARING PENGAMAN SOSIAL

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dinas Sosial		964.975.000,00	927.050.640,00	96,07
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	456.000.000,00	423.304.400,00	92,83
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	49.700.000,00	49.560.000,00	99,72
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	62.700.000,00	62.063.100,00	98,98
		Penyediaan Alat Bantu	145.900.000,00	145.654.000,00	99,83
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	250.675.000,00	246.469.140,00	98,32
2.	Dinas Kesehatan		6.251.526.053,00	6.251.526.053,00	100,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.251.526.053,00	6.251.526.053,00	100,00
3.	Dinas Pangan Dan Pertanian		189.026.590,00	175.291.978,00	92,73
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	189.026.590,00	175.291.978,00	92,73
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		1.180.386.700,00	1.149.880.452,00	97,42
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.180.386.700,00	1.149.880.452,00	97,42
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan		1.061.200.800,00	1.050.427.644,00	98,98
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	161.200.800,00	150.427.644,00	93,32
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
6.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		1.431.000.000,00	939.000.000,00	65,62
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.431.000.000,00	939.000.000,00	65,62
7.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga		11.019.143.450,00	10.589.192.215,00	96,10
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.019.143.450,00	10.589.192.215,00	96,10
8.	BPBD		54.860.000,00	34.540.000,00	62,96
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	54.860.000,00	34.540.000,00	62,96
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		49.195.000,00	37.964.000,00	77,17
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49.195.000,00	37.964.000,00	77,17
10.	Seluruh OPD		12.170.303.529,00	10.173.441.069,00	83,59
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	6.895.464.529,00	4.997.625.773,00	72,48

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	258.088.666,00	254.254.055,22	98,51
		Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non AS	5.016.750.334,00	4.921.561.240,78	98,10
		<b>Total</b>	<b>34.371.617.122,00</b>	<b>31.328.314.051,00</b>	<b>91,15</b>

**E. Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2022**

1. Strategi: Keterjangkauan Harga

No	Nama OPD	Program/	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan</b>				<b>67.000.000,00</b>	<b>52.833.000,00</b>	<b>78,86</b>
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	42.000.000,00	40.340.000,00	96,05
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	12.493.000,00	49,97
<b>2.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>				<b>131.936.850,00</b>	<b>131.936.850,00</b>	<b>100,00</b>
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	131.936.850,00	131.936.850,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dinas Perikanan</b>				<b>23.680.000,00</b>	<b>21.440.000,00</b>	<b>90,54</b>
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	23.680.000,00	21.440.000,00	90,54
<b>4.</b>	<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga</b>				<b>3.719.888.200,00</b>	<b>3.715.958.200,00</b>	<b>99,89</b>
		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	652.753.200,00	652.753.200,00	100,00
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000,00	48.035.000,00	96,07
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.007.135.000,00	2.007.135.000,00	100,00
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	48.035.000,00	96,07

5.	Dinas Sosial				5.285.750.000,00	5.053.078.000,00	95,60
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117.500.000,00	115.431.320,00	98,24
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	114.500.000,00	112.525.880,00	98,28
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.703.750.000,00	4.497.355.400,00	95,61
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	350.000.000,00	327.765.400,00	93,65
6.	Dinas Penanaman Modal				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikr	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
7.	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)				83.000.000,00	82.632.836,00	99,56
		Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	83.000.000,00	82.632.836,00	99,56
				TOTAL	9.323.255.050,00	9.069.878.886,00	97,28

2. Ketersediaan Pasokan

No	Nama OPD	Program/	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Dinas Perikanan</b>				<b>2.396.872.470,00</b>	<b>2.201.049.428,00</b>	<b>91,83</b>
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	24.088.800,00	23.480.000,00	97,47
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	43.410.000,00	42.361.900,00	97,59
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	505.172.170,00	464.916.548,00	92,03
				Pembinaan dan Pemantauan	45.314.600,00	44.920.000,00	99,13



				Pembudidayaan Ikan di Darat			
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	29.232.500,00	24.694.000,00	84,47
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.662.110.000,00	1.518.763.200,00	91,38
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	16.180.000,00	15.450.000,00	95,49
			Pengelolaan dan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	71.364.400,00	66.463.780,00	93,13
2.	Dinas Pangan dan Pertanian				4.323.097.840,00	3.788.395.481,00	87,63
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan dan Zoonosis	568.088.600,00	557.470.759,00	98,13
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	50.000.000,00	46.971.000,00	93,94
		Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	163.583.680,00	162.970.320,00	99,63
		Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.703.925.560,00	1.651.871.202,00	96,95
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.837.500.000,00	1.369.112.200,00	74,51
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				180.885.100,00	179.640.450,00	99,31
		Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	124.314.000,00	123.728.400,00	99,53

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	18.882.000,00	18.725.200,00	99,17
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	37.689.100,00	37.186.850,00	98,67
<b>4.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal</b>				<b>232.327.400,00</b>	<b>227.034.400,00</b>	<b>97,72</b>
		Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	232.327.400,00	227.034.400,00	97,72
<b>5.</b>	<b>Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)</b>				<b>317.000.000,00</b>	<b>216.108.482,00</b>	<b>68,17</b>
		Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	234.000.000,00	133.475.646,00	57,04
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	83.000.000,00	82.632.836,00	99,56
			<b>TOTAL</b>		<b>7.450.182.810,00</b>	<b>6.612.228.241,00</b>	<b>88,75</b>

### 3. Kelancaran Distribusi

No	Nama OPD	Program/	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Dinas Perikanan</b>				<b>505.172.170,00</b>	<b>464.916.548,00</b>	<b>92,03</b>
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	505.172.170,00	464.916.548,00	92,03
<b>2.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>				<b>952.113.000,00</b>	<b>942.908.500,00</b>	<b>99,03</b>
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	652.113.000,00	651.400.000,00	99,89
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	300.000.000,00	291.508.500,00	97,17
<b>3.</b>	<b>Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)</b>				<b>124.838.000,00</b>	<b>124.671.995,00</b>	<b>99,87</b>
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	124.838.000,00	124.671.995,00	99,87
			<b>TOTAL</b>		<b>1.582.123.170,00</b>	<b>1.532.497.043,00</b>	<b>96,86</b>

### 4. Komunikasi Efektif

No	Nama OPD	Program/	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Dinas Perikanan</b>				<b>29.232.500,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>8,72</b>
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	29.232.500,00	2.550.000,00	8,72
2.	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>				<b>17.663.150,00</b>	<b>17.230.000,00</b>	<b>97,55</b>
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17.663.150,00	17.230.000,00	97,55
3.	<b>Dinas Sosial</b>				<b>117.500.000,00</b>	<b>115.431.320,00</b>	<b>98,24</b>
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117.500.000,00	115.431.320,00	98,24
4.	<b>Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik</b>				<b>3.255.466.060,00</b>	<b>3.116.996.243,00</b>	<b>95,75</b>
		Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	167.970.000,00	144.302.014,00	85,91
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.150.000.000,00	1.062.465.000,00	92,39
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	450.609.240,00	450.359.240,00	99,94
		Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.486.886.820,00	1.459.869.989,00	98,18
			<b>TOTAL</b>		<b>3.419.861.710,00</b>	<b>3.252.207.563,00</b>	<b>95,10</b>
			<b>TOTAL KESELURUHAN (1-4)</b>		<b>21.775.422.740,00</b>	<b>20.466.811.733,00</b>	<b>93,99</b>

## B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

### 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Anggaran Penggunaan SILPA pada Penerimaan Pembiayaan yaitu sebesar Rp125.339.422.816,43.

### 2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp125.339.422.816,43.

### 3. SILPA Tahun Berjalan

SILPA tahun berjalan diperoleh dari SILPA tahun 2022 pada LRA yaitu sebesar Rp150.937.095.945,22.

### 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp(0,00)

### 5. Lain-Lain

- a. Koreksi Pendapatan sebesar Rp0,00.
- b. Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00.
- c. Koreksi Saldo Awal Rp0,00.
- d. Koreksi BLUD Rp0,00.

### 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.937.095.945,22 yang terdiri dari:

▪ Kas daerah di bank		Rp108.494.127.189,90
▪ Kas di BLUD Dinkes (Bank)		Rp 42.035.983.822,32
▪ Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Dinkes:		Rp 34.300.550,00
▪ RSUD Eko Maulana Ali	Rp 8.676.550,00	
▪ RSUD Syafrie Rachman	Rp 1.306.500,00	
▪ RSUD Depati Bahrin	Rp20.992.000,00	
▪ PKM Sinar Baru	Rp 143.000,00	
▪ PKM Sungailiat	Rp 593.500,00	
▪ PKM Riau Silip	Rp 795.000,00	
▪ PKM Penagan	Rp 184.000,00	
▪ PKM Pemali	Rp 852.000,00	
▪ PKM Belinyu	Rp 255.000,00	
▪ PKM Batu Rusa	Rp 503.000,00	
▪ Kas di BOS APBN SDN & SMPN:		Rp 458.107.823,92
▪ Tunai	Rp 25.787.409,45	
▪ Bank	Rp432.320.414,47	
<i>(Lampiran Tambahan I)</i>		
▪ Kas Dana BOP PAUD		Rp 3.557.021,00
▪ Kas dibatasi Penggunaannya		(Rp 88.980.461,92)

Kas dibatasi Penggunaannya merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening KASDA Kabupaten Bangka, namun sampai tahun 2022 berakhir, belum dapat diketahui tujuan atas setoran tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015 sebesar Rp16.250.000,00, namun sampai dengan tahun 2022, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

1. Tanggal 08 April 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp7.500.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
2. Tanggal 08 April 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp5.000.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
3. Tanggal 25 Juni 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp3.700.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
4. Tanggal 27 Juni 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp50.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.

b. SKRDLB DPUPR sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata Tbk, yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas PUPR telah mengupayakan pertemuan pada tanggal 28 November 2019 dengan Provider Menara Telekomunikasi untuk membahas pengembalian lebih bayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut, tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada informasi lebih lanjut dari pihak PT XL Axiata Tbk mengenai pengembalian tersebut.

## C. NERACA

### 1. ASET

Total aset Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.320.572.273.330,56 yang terdiri dari:

#### 1.1. ASET LANCAR

Total Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp207.789.811.664,10 yang terdiri dari:

##### 1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.026.076.407,14 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.405.146.727,98 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.405.146.727,98 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.1.1.001 Kas di Kas Daerah

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.405.146.727,98 yang terdiri dari:

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Rekening Giro Bank Sumsel		
a. Rek. No. 145-3000-304	108.405.146.727,98	92.837.371.150,04
<b>Jumlah</b>	<b>108.405.146.727,98</b>	<b>92.837.371.150,04</b>

Saldo rekening giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.494.127.189,90 sedangkan saldo kas di kas daerah pada neraca sebesar Rp108.405.146.727,98. Selisih antara saldo di rekening giro dengan kas di kas daerah tersebut sebesar Rp88.980.461,92. Hal ini disebabkan karena utang kepada pihak ketiga yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 belum dibayarkan. Namun uang tersebut sudah masuk ke kas daerah, sehingga dianggap bukan merupakan bagian dari SILPA Pemerintah Kabupaten Bangka dan diakui sebagai Kas Lainnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Rp16.250.000,00 merupakan pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015, namun sampai dengan tahun 2022, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya.
- 2) SKRD LB pada DPUPR sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata, Tbk yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016.

#### 1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.300.550,00, yang terdiri dari:

##### 1.1.1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.300.550,00, yang terdiri dari:

1.1.1.2.1.001 Kas di Bendahara Penerimaan  
Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 adalah kas di bendahara penerimaan BLUD Dinkes per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.300.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	PKM Penagan	184.000,00	0,00
2.	PKM Puding Besar	0,00	0,00
3.	PKM Riau Silip	795.000,00	0,00
4.	PKM Bakam	0,00	0,00
5.	PKM Pemali	852.000,00	0,00
6.	PKM Batu Rusa	503.000,00	0,00
7.	PKM Belinyu	255.000,00	0,00
8.	PKM Sungailiat	593.500,00	0,00
9.	PKM Gunung Muda	0,00	0,00
10.	PKM Kenanga	0,00	0,00
11.	PKM Sinar Baru	143.000,00	0,00
12.	PKM Petaling	0,00	0,00
13.	RSUD DR. Eko Maulana Ali	8.676.550,00	1.122.800,00
14.	RSUD Depati Bahrin	20.992.000,00	14.798.000,00
15.	RSUD Sjafrie Rachman	1.306.500,00	465.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.300.550,00</b>	<b>16.385.800,00</b>

Atas saldo kas tersebut telah dilakukan pengesahan oleh BUD sehingga diakui sebagai Kas di BLUD Dinkes.

#### 1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, yang terdiri dari:

##### 1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, yang terdiri dari:

1.1.1.3.1.001 Kas di Bendahara Pengeluaran  
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

#### 1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.035.983.822,32 yang terdiri dari:

#### 1.1.1.4.1 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.035.983.822,32, yang terdiri dari:

##### 1.1.1.4.1.001 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.035.983.822,32, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.040.258.396,32 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Puskesmas Kenanga	146.296.953,00	252.283.817,00
2.	Puskesmas Belinyu	293.461.212,00	102.291.666,00
3.	Puskesmas Gunung Muda	101.914.943,00	130.596.698,00
4.	Puskesmas Sungailiat	481.491.905,00	422.581.914,00
5.	Puskesmas Baturusa	227.353.465,00	133.281.079,00
6.	Puskesmas Pemali	184.494.176,50	235.840.671,50
7.	Puskesmas Bakam	440.705.734,00	441.126.741,00
8.	Puskesmas Riau Silip	635.763.993,00	505.251.606,00
9.	Puskesmas Puding Besar	128.903.470,00	194.213.729,00
10.	Puskesmas Petaling	338.804.203,00	208.451.434,00
11.	Puskesmas Sinar Baru	99.996.075,00	102.742.195,00
12.	Puskesmas Penagan	78.704.455,30	180.230.320,30
13.	RSUD Eko Maulana	1.077.525.129,00	144.231.308,00
14.	RSUD Depati Bahrin	37.621.984.262,52	7.879.435.922,52
15.	RSUD Sjafrie Rachman	178.583.846,00	107.699.295,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.035.983.822,32</b>	<b>11.040.258.396,32</b>

#### 1.1.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp458.107.823,92 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.5.1 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp458.107.823,92 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.5.1.001 Kas Dana BOS

Saldo kas yang bersumber dari APBN sebesar Rp458.107.823,92 merupakan saldo kas tunai sebesar Rp25.816.414,99 dan saldo di bank sebesar Rp432.291.408,93 yaitu sebagai berikut: (*Lampiran Tambahan I*)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)		31 Desember 2021 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
1.	SDN	22.288.437,97	286.260.522,12	22.372.370,00	660.242.884,16
2.	SMPN	3.527.977,02	146.030.886,81	5.410,00	762.786.805,91
3.	<b>Jumlah</b>	<b>25.816.414,99</b>	<b>432.291.408,93</b>	<b>22.377.780,00</b>	<b>1.423.029.690,07</b>

Adapun rincian saldo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :



No	Sekolah	Saldo 2022 (Rp)		Saldo 2021 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
	<b>Kec. Sungailiat</b>				
1	SDN 1 Sungailiat	0,00	1.257.943,00	0,00	2.226.776,00
2	SDN 2 Sungailiat	0,00	272.122,00	0,00	3.536.532,00
3	SDN 3 Sungailiat	0,00	38.288,00	0,00	373.285,00
4	SDN 4 Sungailiat	0,00	344.738,00	0,00	7.695.140,00
5	SDN 5 Sungailiat	0,00	2.637.713,00	0,00	5.665.370,00
6	SDN 6 Sungailiat	0,00	37.192,00	0,00	8.493.859,00
7	SDN 7 Sungailiat	0,00	2.222.228,00	0,00	1.997.500,00
8	SDN 8 Sungailiat	0,00	2.207.736,00	0,00	2.423.513,00
9	SDN 9 Sungailiat	0,00	2.096.247,00	0,00	5.757.403,00
10	SDN 10 Sungailiat	0,00	56.503,00	0,00	903.889,00
11	SDN 11 Sungailiat	0,00	629.857,00	0,00	1.260.782,00
12	SDN 12 Sungailiat	0,00	43.184,00	0,00	975.719,00
13	SDN 13 Sungailiat	0,00	129.859,00	14.179.518,00	1.685.663,00
14	SDN 14 Sungailiat	0,00	8.227.014,00	0,00	5.764.224,00
15	SDN 15 Sungailiat	0,00	111.420,00	0,00	1.934.786,00
16	SDN 16 Sungailiat	0,00	1.884.565,00	0,00	15.100.830,00
17	SDN 17 Sungailiat	0,00	328.721,00	0,00	600.000,00
18	SDN 18 Sungailiat	0,00	1.496.950,00	0,00	653.791,00
19	SDN 19 Sungailiat	0,00	231,00	0,00	4.518.366,00
20	SDN 20 Sungailiat	0,00	130.907,00	0,00	5.572.530,00
21	SDN 21 Sungailiat	0,00	370.115,16	0,00	719.815,16
22	SDN 22 Sungailiat	0,00	664.492,00	0,00	375.508,00
23	SDN 23 Sungailiat	0,00	1.084.538,00	0,00	358.891,00
24	SDN 24 Sungailiat	0,00	2.400.000,00	0,00	2.579.500,00
25	SDN 25 Sungailiat	0,00	160.931,00	0,00	4.410.897,00
26	SDN 26 Sungailiat	0,00	5.463.678,02	0,00	2.286.339,00
27	SDN 27 Sungailiat	0,00	2.278.817,00	0,00	3.032.201,00
28	SDN 28 Sungailiat	0,00	20.306,00	0,00	2.839.131,00
29	SDN 29 Sungailiat	0,00	1.166.232,00	0,00	9.665.518,00
30	SDN 30 Sungailiat	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
31	SDN 31 Sungailiat	0,00	855.694,00	0,00	1.426.970,00
32	SDN 32 Sungailiat	0,00	2.600.504,00	0,00	7.401.764,00
	<b>Kec. Pemali</b>				
1	SDN 1 Pemali	0,00	101.561,00	0,00	983.357,00
2	SDN 2 Pemali	0,00	591.788,00	0,00	2.229.063,00
3	SDN 3 Pemali	0,00	235.939,00	62,00	1.709.000,00
4	SDN 4 Pemali	0,00	80.350,00	0,00	4.892.000,00
5	SDN 5 Pemali	0,00	401.485,00	0,00	10.854.879,00
6	SDN 6 Pemali	366.080,00	552,00	730,00	4.160.270,00
7	SDN 7 Pemali	0,00	1.118.811,00	66,00	636.340,00
8	SDN 8 Pemali	0,00	1.460,00	0,00	408.987,00
9	SDN 9 Pemali	0,00	6.990,00	0,00	408.229,00
10	SDN 10 Pemali	585,00	845.444,00	49.780,00	830.724,00
11	SDN 11 Pemali	0,00	21.690,00	0,00	2.575.078,00
12	SDN 12 Pemali	0,00	189.650,00	350,00	110.000,00
13	SDN 13 Pemali	259.000,00	0,00	161.000,00	1.647.071,00
14	SDN 14 Pemali	0,00	17.717,00	0,00	2.362.000,00
15	SDN 15 Pemali	0,00	357.568,00	0,00	2.545.651,00
	<b>Kec. Mendo Barat</b>				
1	SDN 1 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00
2	SDN 2 Mendo Barat	0,00	398.999,00	0,00	1.006.001,00
3	SDN 3 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Sekolah	Saldo 2022 (Rp)		Saldo 2021 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
4	SDN 4 Mendo Barat	0,00	3.922.500,00	0,00	39.679,00
5	SDN 5 Mendo Barat	0,00	103,00	0,00	591,00
6	SDN 6 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SDN 7 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SDN 8 Mendo Barat	150.000,00	0,00	0,00	1.495.876,00
9	SDN 9 Mendo Barat	0,00	8.100,00	1.114.900,00	27.000,00
10	SDN 10 Mendo Barat	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00
11	SDN 11 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12	SDN 12 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13	SDN 13 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SDN 14 Mendo Barat	591.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15	SDN 15 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SDN 16 Mendo Barat	143.998,00	0,00	6.533.002,00	0,00
17	SDN 17 Mendo Barat	1.087.400,00	0,00	0,00	0,00
18	SDN 18 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	855.000,00
19	SDN 19 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20	SDN 20 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SDN 21 Mendo Barat	0,00	3.548.500,00	0,00	26.000,00
22	SDN 22 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SDN 23 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
24	SDN 24 Mendo Barat	0,00	250.000,00	0,00	244.500,00
25	SDN 25 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SDN 26 Mendo Barat	213.911,00	0,00	711,00	58.910.594,00
27	SDN 27 Mendo Barat	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00
28	SDN 28 Mendo Barat	725.000,00	1.816.643,00	0,00	831.143,00
29	SDN 29 Mendo Barat	0,00	6.097.000,00	0,00	2.330.000,00
30	SDN 30 Mendo Barat	12.566,00	14.422.000,00	14.066,00	3.610.000,00
31	SDN 31 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SDN 32 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SDN 33 Mendo Barat	0,00	83.171,00	0,00	9.240.000,00
	<b>Kec. Riau Silip</b>				
1	SDN 1 Riau Silip	0,00	12.697.153,00	0,00	599.690,00
2	SDN 2 Riau Silip	0,00	55.719,00	0,00	1.432.046,00
3	SDN 3 Riau Silip	0,00	0,00	0,00	432.000,00
4	SDN 4 Riau Silip	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00
5	SDN 5 Riau Silip	9.356.300,00	106.602,00	0,00	10.690.254,00
6	SDN 6 Riau Silip	0,00	1.456.171,00	0,00	645.400,00
7	SDN 7 Riau Silip	29.005,00	1.442.891,00	0,00	819.000,00
8	SDN 8 Riau Silip	8.602.856,00	49.460,00	175.368,00	7.243.493,00
9	SDN 9 Riau Silip	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SDN 10 Riau Silip	77.749,00	0,00	0,00	525.000,00
11	SDN 11 Riau Silip	0,00	1.264.756,00	0,00	175.000,00
12	SDN 12 Riau Silip	0,00	14.102.538,00	0,00	5.016.450,00
13	SDN 13 Riau Silip	0,00	8.133,00	86.305,00	5.020.000,00
14	SDN 14 Riau Silip	42.525,00	0,00	36.260,00	26.000,00
15	SDN 15 Riau Silip	0,00	1.981.254,00	0,00	1.064.346,00
16	SDN 16 Riau Silip	1.141,00	34.500,00	18.859,00	15.000,00
17	SDN 17 Riau Silip	0,00	12.760,00	0,00	1.217.820,00
18	SDN 18 Riau Silip	0,00	0,00	0,00	799.870,00
	<b>Kec. Puding Besar</b>				
1	SDN 1 Puding Besar	0,00	6.702,00	0,00	883.645,00
2	SDN 2 Puding Besar	0,00	44,00	0,00	181.500,00
3	SDN 3 Puding Besar	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Sekolah	Saldo 2022 (Rp)		Saldo 2021 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
4	SDN 4 Puding Besar	0,00	698.570,00	0,00	2.255.276,00
5	SDN 5 Puding Besar	480.320,00	8.221.640,00	0,00	830.000,00
6	SDN 6 Puding Besar	0,00	16.260,00	0,00	0,00
7	SDN 7 Puding Besar	0,00	238.547,00	0,00	2.325.047,00
8	SDN 8 Puding Besar	0,00	3.864,00	0,00	53.000,00
9	SDN 9 Puding Besar	0,00	93.794,00	0,00	586.868,00
10	SDN 10 Puding Besar	0,00	39,00	0,00	917.700,00
	<b>Kec. Belinyu</b>				
1	SDN 1 Belinyu	0,00	1.094.380,00	0,00	6.250.058,00
2	SDN 2 Belinyu	0,00	2.335.443,00	0,00	6.911.260,00
3	SDN 3 Belinyu	3.031,00	183.714,00	0,00	502.531,00
4	SDN 4 Belinyu	0,00	49.376,00	0,00	402.753,00
5	SDN 5 Belinyu	0,00	33.228,00	0,00	1.755.700,00
6	SDN 6 Belinyu	50,00	46.574.332,00	0,00	20.422.054,00
7	SDN 7 Belinyu	0,00	531.919,00	0,00	2.127.700,00
8	SDN 8 Belinyu	0,00	3.436.658,00	0,00	2.580.510,00
9	SDN 9 Belinyu	0,00	493.293,00	0,00	930.791,00
10	SDN 10 Belinyu	0,00	771.419,00	0,00	1.959.688,00
11	SDN 11 Belinyu	0,00	68.691,00	0,00	4.724.534,00
12	SDN 12 Belinyu	0,00	8.438.540,00	0,00	51.217.115,00
13	SDN 13 Belinyu	0,00	147.500,00	0,00	7.480.600,00
14	SDN 14 Belinyu	0,00	101.060,00	0,00	106.740,00
15	SDN 15 Belinyu	0,00	2.384.168,00	0,00	572.750,00
16	SDN 16 Belinyu	0,00	397.247,00	0,00	1.081.565,00
17	SDN 17 Belinyu	0,00	14.033.480,00	0,00	1.117.243,00
18	SDN 18 Belinyu	0,00	3.735.652,00	0,00	2.016.917,00
19	SDN 19 Belinyu	0,00	867.363,00	0,00	2.986.400,00
20	SDN 20 Belinyu	23.260,00	320.000,00	0,00	485.951,00
21	SDN 21 Belinyu	0,00	0,00	0,00	3.373.640,00
22	SDN 22 Belinyu	0,00	214.102,00	0,00	17.794.413,00
23	SDN 23 Belinyu	0,00	250.011,00	0,00	3.829.909,00
24	SDN 24 Belinyu	0,00	528.342,00	0,00	1.258.345,00
25	SDN 25 Belinyu	0,00	2.366.995,00	0,00	604.330,00
26	SDN 26 Belinyu	0,00	842,00	0,00	10.600.896,00
27	SDN 27 Belinyu	0,00	3.405.193,00	0,00	10.775.671,00
	<b>Kec. Bakam</b>				
1	SDN 1 Bakam	0,00	967.497,00	0,00	6.719.267,00
2	SDN 2 Bakam	0,00	2.383.661,00	0,00	11.497.327,00
3	SDN 3 Bakam	0,00	112.739,00	0,00	1.347.561,00
4	SDN 4 Bakam	0,00	687.809,02	0,00	4.821.683,00
5	SDN 5 Bakam	0,00	574.716,00	0,00	6.171.800,00
6	SDN 6 Bakam	0,00	121.476,00	461,00	1.832.000,00
7	SDN 7 Bakam	0,00	5.002.087,00	0,00	2.562.500,00
8	SDN 8 Bakam	0,00	3.932.141,86	1,00	10.359.595,00
9	SDN 9 Bakam	0,00	374.323,00	0,00	1.257.350,00
10	SDN 10 Bakam	4.878,00	424.069,00	931,00	21.847.122,00
11	SDN 11 Bakam	0,54	1.283.777,06	0,00	6.596.833,00
	<b>Kec. Merawang</b>				
1	SDN 1 Merawang	0,00	9.193.574,00	0,00	987.640,00
2	SDN 2 Merawang	0,00	2.005.937,00	0,00	2.166.314,00
3	SDN 3 Merawang	0,00	10.574.663,00	0,00	430.425,00
4	SDN 4 Merawang	0,00	182.078,00	0,00	447.692,00

No	Sekolah	Saldo 2022 (Rp)		Saldo 2021 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
5	SDN 5 Merawang	0,00	1.001.601,00	0,00	22.056.746,00
6	SDN 6 Merawang	0,00	16.592,00	0,00	22.380.488,00
7	SDN 7 Merawang	0,00	55.185,00	0,00	9.463.696,00
8	SDN 8 Merawang	0,00	2.793.944,00	0,00	1.544.806,00
9	SDN 9 Merawang	0,00	0,00	0,00	314.456,00
10	SDN 10 Merawang	0,00	35.998,00	0,00	120.502,00
11	SDN 11 Merawang	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SDN 12 Merawang	0,00	1.050.150,00	0,00	7.505.000,00
13	SDN 13 Merawang	0,00	1.861.518,00	0,00	2.171.067,00
14	SDN 14 Merawang	0,00	818.338,00	0,00	1.963.187,00
15	SDN 15 Merawang	0,00	16.311.810,00	0,00	6.921.065,00
16	SDN 16 Merawang	0,00	1.702.250,00	0,00	2.514.175,00
17	SDN 17 Merawang	0,00	2.841.638,00	0,00	2.074.372,00
18	SDN 18 Merawang	0,43	90.682,00	0,00	9.007.300,00
19	SDN 19 Merawang	0,00	6.177,00	0,00	510.948,00
20	SDN 20 Merawang	117.782,00	0,00	0,00	334.973,00
	<b>Jumlah SD</b>	<b>22.288.437,97</b>	<b>286.260.522,12</b>	<b>22.372.370,00</b>	<b>660.242.884,16</b>
	<b>TINGKAT SLTP</b>				
1	SMPN 1 Sungailiat	0,00	1.637.992,00	0,00	63.196.238,00
2	SMPN 2 Sungailiat	0,00	10.793.414,00	0,00	132.627.388,00
3	SMPN 3 Sungailiat	0,00	241.397,00	0,00	118.010.968,00
4	SMPN 4 Sungailiat	0,00	3.869.223,00	0,00	7.578.902,00
5	SMPN 5 Sungailiat	3.458.898,00	54.025.000,00	0,00	125.924.451,00
6	SMPN 6 Sungailiat	0,00	370.003,91	0,00	170.004,91
7	SMPN 1 Belinyu	0,00	1.323.592,00	10,00	19.982.719,00
8	SMPN 2 Belinyu	0,00	13.716,00	0,00	62.180.951,00
9	SMPN 3 Belinyu	0,00	31.780.016,00	0,00	16.726.892,00
10	SMPN 4 Belinyu	0,00	2.851.970,00	5.400,00	12.678.320,00
11	SMPN 5 Belinyu	0,00	23.295,00	0,00	638.660,00
12	SMPN 1 Merawang	0,00	3.911.742,00	0,00	8.149.080,00
13	SMPN 2 Merawang	0,00	4.486.803,00	0,00	10.787.787,00
14	SMPN 3 Merawang	0,00	92.000,00	0,00	900.000,00
15	SMPN 1 Mendo Barat	0,00	10.438,00	0,00	20.995.122,00
16	SMPN 2 Mendo Barat	0,00	19.894.194,00	0,00	19.879.116,00
17	SMPN 3 Mendo Barat	0,00	454.487,00	0,00	5.230.650,00
18	SMPN 4 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	3.155.732,00
19	SMPN 5 Mendo Barat	0,00	1.026.729,00	0,00	2.282.892,00
20	SMPN 1 Bakam	0,00	201.192,00	0,00	1.881.760,00
21	SMPN 2 Bakam	0,00	627.491,00	0,00	2.802.964,00
22	SMPN 3 Bakam	0,00	554.639,64	0,00	10.160.590,00
23	SMPN 1 Pemali	0,00	127.227,00	0,00	36.269,00
24	SMPN 2 Pemali	611,00	0,00	0,00	19.915.883,00
25	SMPN 3 Pemali	0,00	179.337,00	0,00	16.912.890,00
26	SMPN 1 Puding Besar	0,00	3.004.578,00	0,00	10.850.627,00
27	SMPN 2 Puding Besar	0,00	100.000,00	0,00	1.873.453,00
28	SMPN 3 Puding Besar	0,00	1.615.066,00	0,00	7.365.000,00
29	SMPN 1 Riau Silip	0,00	0,00	0,00	44.703.431,00
30	SMPN 2 Riau Silip	0,00	499.388,26	0,00	2.899.751,00
31	SMPN 3 Riau Silip	0,00	776.956,00	0,00	1.792.515,00
32	SMPN 4 Riau Silip	68.468,02	1.539.000,00	0,00	10.495.800,00
	<b>Jumlah SMP</b>	<b>3.527.977,02</b>	<b>146.030.886,81</b>	<b>5.410,00</b>	<b>762.786.805,91</b>

#### 1.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.537.482,92 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.7.1 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.537.482,92 yang terdiri dari:

##### 1.1.1.7.1.001 Kas Lainnya

Jumlah kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.284.669,92 namun pada tahun 2022 sebesar Rp92.537.482,92 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp88.980.461,92 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015 sebesar Rp16.250.000,00, namun sampai dengan tahun 2022, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
    1. Tanggal 08 April 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp7.500.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
    2. Tanggal 08 April 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp5.000.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
    3. Tanggal 25 Juni 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp3.700.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
    4. Tanggal 27 Juni 2015 terdapat uang masuk sebesar Rp50.000,00 pada rekening KASDA Kabupaten Bangka.
  - SKRDLB DPUPR sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata Tbk, yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas PUPR telah mengupayakan pertemuan pada tanggal 28 November 2019 dengan Provider Menara Telekomunikasi untuk membahas pengembalian lebih bayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut, tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada informasi lebih lanjut dari

pihak PT XL Axiata Tbk mengenai pengembalian tersebut.

b. Kas BOP PAUD TA 2022

Saldo kas pada PAUD Negeri yang bersumber dari Dana BOP PAUD sebesar Rp3.557.021,00 yang terdapat pada:

- a. UPTD TKN Pembina Bakam sebesar Rp633.351,00.
- b. UPTD TKN Pembina Puding Besar sebesar Rp497.500,00.
- c. UPTD TKN Pembina Sungailiat sebesar Rp2.415.170,00.
- d. SKB Sungailiat sebesar Rp11.000,00.

### 1.1.3 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.066.213.649,95 yang merupakan piutang pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah diterbitkan. Rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

	Jenis Piutang Pajak	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	311.403.276,00	324.566.717,00
2.	Pajak Restoran	137.474.861,20	142.781.216,20
3.	Pajak Hiburan	29.910.150,05	29.910.150,05
4.	Pajak Reklame	302.550.782,00	239.665.844,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.829,34	6.829,34
6.	Pajak Parkir	0,00	0,00
7.	Pajak Air Tanah	67.561.993,56	49.586.701,56
8.	Pajak Sarang Burung Walet	171.575.000,00	171.575.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	299.254.082,80	94.165.732,80
10.	Pajak PBB-P2	15.746.476.675,00	13.997.468.139,00
11.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.066.213.649,95</b>	<b>15.049.726.329,95</b>

#### 1.1.3.06. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2021 sebesar Rp324.566.717,00 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2022 sebesar Rp13.163.442,00 jadi sisa Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp311.403.276,00 dan terdapat penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp1,00. Adapun yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh Parai Beach Hotel sebesar Rp258.018.276,00 Istana Pool Villa sebesar Rp38.560.000,00 Hotel Teluk Uber sebesar Rp12.145.000,00 dan Pantai Rambak sebesar Rp2.400.000,00 dan Rovandy (Sam Pesaren Hotel sebesar Rp280.000,00).

Rekapitulasi Piutang Pajak Hotel yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Hotel (Rp)
1.	< 1 Tahun	1,00
2.	1 - 2 Tahun	280.000,00
3.	2 - 5 Tahun	119.192.620,00

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Hotel (Rp)
4.	> 5 Tahun	191.930.655,00
	<b>Jumlah</b>	<b>311.403.276,00</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.07. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2021 sebesar Rp142.781.216,20 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2022 sebesar Rp6.456.355,00 selama tahun 2022 ada penambahan piutang sebesar Rp1.150.000,00, jadi sisa Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.474.861,20 adapun yang terdiri dari tunggakan yang dimiliki oleh Parai Beach Hotel sebesar Rp85.397.711,20, TokoAyin Rp17.466.400,00, CV Central Niaga Cipta Rp6.200.000,00, Lamongan Shokib Rp3.800.000,00, Rumah Makan Toha Makmur Rp3.200.000,00, Koperasi Jasa Wanita Mandiri Rp2.398.000,00, Hotel Teluk Uber Rp1.795.000,00 Warung Garuda Rp1.100.000,00, RM Pondok Minang Rp1.000.000,00, Lamongan Cak Nur Rp1.000.000,00 dan Rp14.117.750,00 piutang milik pihak lain yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Restoran yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Restoran (Rp)
1.	< 1 Tahun	1.177.000,00
2.	1 - 2 Tahun	17.466.400,00
3.	2 - 5 Tahun	45.658.139,00
4.	> 5 Tahun	73.173.322,20
	<b>Jumlah</b>	<b>137.474.861,20</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.08. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Tunggakan Pajak Hiburan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.910.150,05 tidak ada pembayaran selama tahun 2022 dan selama tahun 2022 tidak ada penambahan piutang jadi sisa Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.910.150,05 yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh Hotel Teluk Uber sebesar Rp11.198.750,00, Pantai Rambak.Azli Rp3.731.350,00, Kansas Bilyard Rp2.280.000,05, CV. Graha King Rp2.800.000,00, Orange Gym Rp1.800.000,00, Pijat Refleksi Bersih Sehat Rp1.650.000,00 yang memiliki nilai material dan piutang milik pihak lain sebesar Rp6.450.050,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Hiburan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Hiburan (Rp)
1.	< 1 Tahun	0,00
2.	1 - 2 Tahun	0,00
3.	2 - 5 Tahun	9.995.000,00
4.	> 5 Tahun	19.915.150,05
	<b>Jumlah</b>	<b>29.910.150,05</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.09. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp239.665.844,00 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2022 sebesar Rp31.865.313,00 selama tahun 2022 ada penambahan piutang sebesar Rp94.750.251,00 jadi sisa Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp302.550.782,00 yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh PT.Coca Cola Indonesia Rp16.202.667,00, PT.Djarum Rp18.387.370,00, Parai Beach Resort Rp7.309.688,00 PT.Sharp Cab.Babel Rp11.730.000,00, Citra Bangka Advertising Rp11.500.000,00, PT Asia Surya Perkasa Rp51.961.250,00 yang memiliki nilai material dan piutang yang dimiliki pihak lain sebesar Rp185.459.807,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Reklame yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Reklame (Rp)
1.	< 1 Tahun	94.750.251,00
2.	1 - 2 Tahun	8.570.987,00
3.	2 - 5 Tahun	79.648.437,00
4.	> 5 Tahun	119.581.107,00
	<b>Jumlah</b>	<b>302.550.782,00</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.10. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 Rp6.829,34 tidak ada pembayaran dan penambahan piutang selama tahun 2022 jadi sisa Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.829,34 yang dimiliki oleh PT. Tata Hampan Eka Persada sebesar Rp208,31, PT.GunungPelawan Lestari sebesar Rp24,29, PT Gunung Maras Lestari Rp6.572,21 dan PT Gemilang Cahaya Mentari Rp24,53.

Rekapitulasi Piutang Pajak Penerangan Jalan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Reklame (Rp)
1.	< 1 Tahun	6.503,19
2.	1 - 2 Tahun	27,69
3.	2 - 5 Tahun	298,46
4.	> 5 Tahun	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.829,34</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.11. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

#### 1.1.3.12. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.586.701,56 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2022 sebesar Rp2.108.001,00 selama tahun 2022 ada penambahan piutang sebesar Rp20.083.293,00, jadi sisa Piutang per 31 Desember 2022 adalah Rp67.561.993,56 yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh PT. Gunung



Pelawan Lestari Rp8.650.800,00, Pujati/Hotel Teluk Uber Rp6.000.572,00, PT Charoen Pokpand Rp2.176.350,00, Tanjung Pesona Hotel Rp1.258.125,00, Pabrik Es Setiabudi Rp4.404.642,00, Pabrik Kecap Rusa Rp3.362.898,00 yang memiliki nilai material dan piutang yang dimiliki pihak lain sebesar Rp41.708.606,56 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Air Tanah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Air Tanah (Rp)
1.	< 1 Tahun	21.272.178,00
2.	1 - 2 Tahun	13.664.481,00
3.	2 - 5 Tahun	28.466.718,46
4.	> 5 Tahun	4.158.616,10
	<b>Jumlah</b>	<b>67.561.993,56</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.13. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet Per 31 Desember 2021 sebesar Rp171.575.000,00 selama tahun 2022 tidak ada pembayaran, dan tidak ada penambahan piutang selama tahun 2022 sehingga jumlah tunggakan per 31 Desember 2022 adalah Rp171.575.000,00 yang terdiri dari piutang yang dimiliki oleh AHO/THIN HO Rp18.250.000,00, Djonto Rp15.000.000,00, Santoso Djauhari Rp10.000.000,00, Sihendra Rp8.000.000,00, Handoko Rp8.000.000,00, Sian Sugito Rp6.500.000,00 yang memiliki nilai material dan piutang pihak lain sebesar Rp105.825.000,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Sarang Burung Walet yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Sarang Burung Walet (Rp)
1.	< 1 Tahun	0,00
2.	1 - 2 Tahun	0,00
3.	2 - 5 Tahun	0,00
4.	> 5 Tahun	171.575.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>171.575.000,00</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.14. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.165.732,80 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2022 sebesar Rp21.600.000,00 selama tahun 2022 ada penambahan piutang sebesar Rp226.688.350,00 jadi sisa piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp299.254.082,80 yang terdiri dari piutang CV. Aurora Khadafi Rp7.576.884,80, PT.Pulomas Sentosa Rp61.510.000,00 PT. Aditya Buana Inter Rp226.688.350,00 yang memiliki nilai material dan sisanya piutang milik pihak lain sebesar Rp3.478.848,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)
1.	< 1 Tahun	229.372.350,00
2.	1 - 2 Tahun	61.510.000,00
3.	2 - 5 Tahun	744.848,00
4.	> 5 Tahun	7.626.884,80
	<b>Jumlah</b>	<b>299.254.082,80</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan VII)

#### 1.1.3.15. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.746.476.675,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS	SPT PBB YANG TERBIT SELAMA 2022 (Rp)	REALISASI PENERIMAAN 2022 (Rp)	PEMBATALAN/ PENUTUPAN	SALDO AKHIR 31 DES 2022 (Rp)
13.997.468.139,00	11.792.461,00	10.166.299.441,00	8.425.512.420,00	3.570.946,00	15.746.476.675,00

Untuk Mutasi Piutang Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

SALDO AWAL 01/01/2022 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2022 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2022 (Rp)	PENGURANGAN < TH.2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	MUTASI /REKLAS	PEMBATALAN/BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/22 (Rp)
15.049.726.329,95	11.792.461,00	65.229.120.016,56	62.750.805.223,48	944.932.569,00	474.883.580,92	0,00	3.570.946,00	17.066.213.649,95

#### 1.1.3.16. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Saldo piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

#### 1.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Merupakan piutang retribusi yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan sebesar Rp4.160.768.922,25 per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
01	Retribusi Jasa Umum	2.682.990.716,25	2.794.764.065,25
02	Retribusi Jasa Usaha	1.462.838.806,00	1.412.368.150,00
03	Retribusi Perizinan Tertentu	14.939.400,00	14.939.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.160.768.922,25</b>	<b>4.222.071.615,25</b>

Untuk Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel berikut :

SALDO AWAL 01/01/2022 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2022 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2022 (Rp)	PENGURANGAN < 2022	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	PEMBATALAN/BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/22 (Rp)
4.222.071.615,25	15.275.600,00	8.602.181.661,00	8.348.711.726,00	330.048.228,00	0,00	0,00	4.160.768.922,25

Untuk Tabel Piutang Retribusi yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada Lampiran LKPD Pemkab.Bangka Tahun 2022.

#### 1.1.4.01. Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo piutang retribusi jasa umum per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.682.990.716,25 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000,00	0,00
04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	365.011.900,00	365.011.900,00
05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	67.178.000,00	67.178.000,00
08	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00
09	Piutang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00
13	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.250.200.816,25	2.362.574.165,25
	<b>Jumlah</b>	<b>2.682.990.716,25</b>	<b>2.794.764.065,25</b>

##### 1.1.4.01.02. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2022 sebesar Rp600.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di OPD Dinas Lingkungan Hidup.

##### 1.1.4.01.04. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2022 sebesar Rp365.011.900,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun lalu di OPD Dinas Perhubungan.

##### 1.1.4.01.05. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.178.000,00 merupakan piutang retribusi pelayanan pasar tahun lalu di OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

##### 1.1.4.01.08. Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Saldo piutang retribusi penggantian biaya cetak peta per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

##### 1.1.4.01.09. Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Saldo piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

##### 1.1.4.01.13. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.362.574.165,25 mengalami pengurangan sebesar Rp112.373.349,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.250.200.816,25 yang ada pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

#### 1.1.4.02. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Saldo piutang retribusi jasa usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.462.838.806,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.015.306,00	290.384.650,00
02	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	649.362.000,00	568.522.000,00
05	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	553.461.500,00	553.461.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.462.838.806,00</b>	<b>1.412.368.150,00</b>

##### 1.1.4.02.01. Piutang Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp290.384.650,00 mengalami pengurangan sebesar Rp30.369.344,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp260.015.306,00 merupakan saldo piutang pada OPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp234.249.306,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sebesar Rp25.766.000,00.

##### 1.1.4.02.02. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan per 31 Desember 2021 sebesar Rp568.522.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp80.840.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp649.362.000,00 merupakan saldo piutang pada OPD Sekretariat Daerah sebesar Rp68.450.000,00 dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp580.912.000,00.

##### 1.1.4.02.05. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Saldo piutang retribusi Tempat Khusus Parkir per 31 Desember 2021 sebesar Rp553.461.500,00 tidak mengalami penambahan selama tahun 2022 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp553.461.500,00 merupakan saldo piutang pada

OPD Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Perdagangan.

#### 1.1.4.03. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo piutang retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.939.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
07	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	14.939.400,00	14.939.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.939.400,00</b>	<b>14.939.400,00</b>

##### 1.1.4.03.07. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan

Saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.939.400,00 merupakan saldo piutang tahun lalu pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Retribusi ini berubah nama dari Retribusi Izin Gangguan akibat terbitnya Permendagri No. 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016.

#### 1.1.6 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.364.149.257,31 yang terdiri dari :

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
03	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	168.152.100,00	198.421.945,00
05	Piutang Jasa Giro	0,00	1.183.401,41
06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.318.246.400,00	2.323.346.400,00
07	Piutang Pendapatan Bunga	19.391.041,20	0,00
12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.672.204.094,87	5.894.202.895,93
13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	145.428.150,24	141.709.842,43
15	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian	4.849.400,00	3.000.000,00
16	Piutang Pendapatan BLUD	8.961.078.071,00	35.382.269.708,00
23	Piutang Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	74.800.000,00	74.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.364.149.257,31</b>	<b>44.018.934.192,77</b>

Untuk Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Lingkup OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

SALDO AWAL 01/01/2022 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/ REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2022 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2022 (Rp)	PENGURANGAN < TH.2022 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	MUTASI / REKLAS	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN	SALDO AKHIR 31/12/22 (Rp)
44.018.934.192,77	5.308.746,03	79.590.349.564,45	108.145.287.140,94	225.308.409,13	2.586.591.379,00	1.015.869.999,00	93.841.320,12	18.364.149.257,31

#### 1.1.6.03. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Saldo piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan per 30 Desember 2021 sebesar Rp198.421.945,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.269.845,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.152.100,00, yang merupakan piutang atas kontribusi kemitraan

dengan pihak ketiga yang dikelola oleh Bidang Aset BPPKAD yang terdiri dari :

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
03.01	Piutang Hasil Sewa BMD	54.735.800,00	95.065.000,00
03.02	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	93.215.000,00	84.124.000,00
03.03	Piutang Hasil Dari Bangun Guna Serah	20.201.300,00	19.232.945,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.152.100,00</b>	<b>198.421.945,00</b>

Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.152.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PIUTANG / NAMA DEBITUR	NAMA WAJIB RETRIBUSI	LOKASI	NOMOR SKR /KONTRAK	TANGGAL SKR /KONTRAK			SALDO AKHIR PIUTANG KONTRIBUSI 31/12/22(Rp)
					MULAI	BERAKHIR	LAMA SEWA	
1.	PT. EL JOHN	JOHNNIE SUGIARTO	Kawasan Wisata Air Panas Pemali	119.556/407/II/2002 005/ELJOHN/SPK/XI /2002	30/11/200 2	30/11/2032	30 tahun	93.215.000,000
2.	PD. CIPTA PRATAMA (Ruko Permata Indah)	ROSFINA TUTILANI	Pembangunan Ruko dan Hotel (BOT)	640/018/IX/2005	12/02/200 7	12/02/2032	25 tahun	6.000.000,00
3.	PT RAMBANG JAYA SEMESTA	SJAHRUL G BASUMI	Objek Wisata Pantai Teluk Uber	028/4/DPPKAD/2012 018/RSJ/01/2012	12/01/201 2	12/01/2037	25 tahun	14.201.300,00
4.	PT. PULOMAS SENTOSA	DENNIS	Kawasan Industri Jeliti	593.1/2200/II/2016	01/12/201 6	01/12/2021	5 tahun	14.160.000,00
5.	PT PULOMAS SENTOSA	DENNIS	Kawasan Industri Jeliti	593.1/0990/II/2016	20/05/201 6	20/05/2021	5 tahun	24.950.000,00
6.	PT. ZHONG HUA INDONESIA	CHANDRA SATYA	Kawasan Industri Jelitik	593.1/0692/II/2016	25/04/201 6	25/04/2021	5 Tahun	15.625.800,00
<b>JUMLAH</b>								<b>168.152.100,00</b>

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	Keterangan
1.	PT. EL JOHN	1.070.053,92	17.834.678,22	74.310.267,86	0,00	
2.	PD. CIPTA PRATAMA (Ruko Permata Indah)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	PT RAMBANG JAYA SEMESTA	0,00	14.201.300,00	0,00	0,00	
4.	PT. PULOMAS SENTOSA	0,00	0,00	4.720.000,00	9.440.000,00	
5.	PT PULOMAS SENTOSA	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00	
6.	PT. ZHONG HUA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	15.625.800,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>7.070.053,92</b>	<b>32.035.978,22</b>	<b>79.030.267,86</b>	<b>50.015.800,00</b>	

#### 1.1.6.05. Piutang Jasa Giro

Saldo piutang jasa giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

#### 1.1.6.06. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo piutang hasil pengelolaan dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.323.346.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.100.000,00 karena ada pengembalian

pembiayaan koperasi UMKM dari BPRS Babel, sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.318.246.400,00.

Adapun mutasi piutang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahun Penyaluran Dana Bergulir	Per 31 Des 2022 (Rp)	Angsuran (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
2005	78.748.000,00	0,00	78.748.000,00
2006	177.910.800,00	0,00	177.910.800,00
2007 Gelombang I	228.809.500,00	5.100.000,00	233.909.500,00
2007 Gelombang II	73.687.500,00	0,00	73.687.500,00
Non Kolektif	245.486.000,00	0,00	245.486.000,00
2008	463.111.000,00	0,00	463.111.000,00
2009	626.312.100,00	0,00	626.312.100,00
2010	424.181.500,00	0,00	424.181.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.318.246.400,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>2.323.346.400,00</b>

Terdapat selisih saldo akhir pinjaman sebesar Rp2.134.000,00 antara pihak PT BPRS Babel yang mengakui sebesar Rp2.316.112.400,00 dengan Pemerintah Kabupaten Bangka sebesar Rp2.318.246.400,00 (*Lampiran Tambahan II*). Hal ini disebabkan adanya revisi data pada tahun 2013 atas margin atau bunga yang diperoleh, sedangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka hanya mengakui nilai pokok pinjaman saja.. Pada tahun 2019 dibentuklah tim yang bertugas melakukan monitoring dan mendata koperasi dan usaha mikro kecil (KUKM) untuk memastikan pengembalian pinjaman yang telah disalurkan, membuat kajian perpanjangan kerjasama dengan BPRS Bangka Belitung, melakukan koordinasi dengan BPRS Bangka Belitung dalam rangka penagihan pinjaman dana terhadap pihak terkait. Berdasarkan SK Bupati Bangka No. 188.45/91/BPKAD/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Piutang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (KUKM) di Kabupaten Bangka.

Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir yang diklasifikasikan berdasarkan umur nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	Debitur UMKM dan Koperasi	0,00	0,00	0,00	2.318.246.400,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.246.400,00</b>	

#### 1.1.6.07. Piutang Pendapatan Bunga

Saldo piutang pendapatan bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.391.041,20 merupakan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor ND-202/PB.6/2023. (*Lampiran Tambahan XI*).

#### 1.1.6.12. Piutang Hasil Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo piutang hasil pendapatan denda pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.894.202.895,93 mengalami penambahan sebesar Rp778.001.198,94 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.672.204.094,87 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
12.06	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	228.509.328,67	228.837.997,51
12.07	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	113.756.622,36	113.813.933,46
12.08	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	47.048.106,42	47.548.106,42
12.09	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	42.160.331,95	38.201.030,71
12.10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	113.106,73	113.106,73
12.11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.070.710,00	1.070.710,00
12.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.944.157,15	5.293.241,55
12.13	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Bulut Walet	2.170.500,00	2.170.500,00
12.14	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	187.031.601,55	167.763.584,55
12.15	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)	6.043.399.630,04	5.289.390.685,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.672.204.094,87</b>	<b>5.894.202.895,93</b>

Piutang Denda Pajak Hotel yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Hotel (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	228.509.328,67
	<b>Jumlah</b>	<b>228.509.328,67</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)

Piutang Denda Pajak Restoran yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Restoran (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	6.600,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	113.750.022,36
	<b>Jumlah</b>	<b>113.756.622,36</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)

Piutang Denda Pajak Hiburan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Hiburan (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	47.048.106,42
	<b>Jumlah</b>	<b>47.048.106,42</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)



Piutang Denda Pajak Reklame yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Reklame (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	220.800,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	487.570,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	41.451.961,95
	<b>Jumlah</b>	<b>42.160.331,95</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)

Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	113.106,73
	<b>Jumlah</b>	<b>113.106,73</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)

Piutang Denda Pajak Parkir yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Parkir (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	1.070.710,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.070.710,00</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)

Piutang Denda Pajak Air Tanah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Air Tanah (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	29.039,28
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	48.636,48
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	6.866.481,39
	<b>Jumlah</b>	<b>6.944.157,15</b>

(rincian terlampir pada Lampiran Tambahan XII)

Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00